

**Dr. Aswasulasikin, M.Pd.**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA  
DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  
“ Kajian Fenomenologi di Sekolah Dasar”**



# PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

## “ Kajian Fenomenologi di Sekolah Dasar”



Perencanaan pembangunan pendidikan dalam menghadapi pesatnya perkembangan IPTEK tidak terlepas dari peran serta masyarakat di dalamnya. Partisipasi masyarakat bagi keberhasilan program pendidikan berada pada posisi strategis, karena masyarakat pada dasarnya merupakan *Stakeholder* pendidikan yang paling utama. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pembangunan pendidikan masyarakat harus mendapat kesempatan tempat dalam pelaksanaan pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan mulai dari perumusan program (perencanaan), pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan.

Masyarakat dan orang tua adalah elemen terpenting dan utama dalam pembangunan pendidikan di sekolah dasar, sehingga perannya perlu dioptimalkan. Kegagalan dalam partisipasi masyarakat merupakan aral dalam penerapan program pembangunan pendidikan. Karena dalam penerapan manajemen pendidikan diperlukan keterlibatan elemen-elemen masyarakat. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kepentingan bersama dalam membangun pendidikan menuju bangsa yang maju dan siap bersaing di tingkat global.

Ketimpangan konsep pembangunan pendidikan yang bersifat multidimensial membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang mampu menempatkan pendidikan sebagai kekuatan budaya dan tidak terbelenggu dalam proses kapitalisasi pendidikan. Di sinilah partisipasi masyarakat diperlukan bagi penguatan proses pembangunan pendidikan demi tercapainya *Good Governance*. Kemampuan masyarakat secara sistematis dalam memahami permasalahan dalam pendidikan akan membentuk kemampuan berpikir yang dibutuhkan untuk membentuk kesadaran semua unsur bahwa pembangunan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, sehingga pelaksanaan pembangunan pendidikan berjalan sesuai amanat undang-undang. Pada intinya pendidikan adalah milik bersama, oleh karena itu pendidikan harus berorientasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)  
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku\_deepublish  
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Pendidikan

ISBN 978-602-453-757-9



9 786024 537579

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA  
DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  
“Kajian Fenomenologi di Sekolah Dasar”**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA  
DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  
“Kajian Fenomenologi di Sekolah Dasar”

**Dr. Aswasulasikin, M.Pd**



**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA  
DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  
“KAJIAN FENOMENOLOGI DI SEKOLAH DASAR”**

**Aswasulasikin**

Editor : Doni Septu Marsa Ibrohim  
Desain Cover : Dona Budi Martasari  
Tata Letak Isi : Invalindiant Candrawinata  
Sumber Gambar: Sumber

Cetakan Pertama: November 2017  
Hak Cipta 2017, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH  
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

---

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**ASWASULASIKIN**

Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pendidikan “Kajian Fenomenologi Di Sekolah Dasar”/oleh Aswasulasikin.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, November 2017.

xiv, 349 hlm.; Uk:14x20 cm

**ISBN 978-Nomor ISBN**

1. Pendidikan

I. Judul

370

## PENGANTAR PENULIS

Permasalahan desentralisasi pendidikan menekankan pada analisis sosiologis dalam memahami dinamika pendidikan yang belum dikaji secara utuh dalam sebuah buku. Kajian yang menfokuskan pada analisis partisipasi masyarakat dalam praksis pendidikan terutama di daerah pedesaan belum banyak dilakukan secara aplikatif dan menyeluruh.

Buku ini ditulis berdasarkan realitas empirik dan dibangun dalam tatanan konseptual agar dapat dimaknai lebih aplikatif dan interpretatif berdasarkan hasil data riset yang dipaparkan lebih fokus pada sekolah dasar di pedesaan. Dalam buku ini dipaparkan konsep dan proses partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan pendidikan secara kimprehensif sesuai dengan konsep desentralisasi pendidikan. Berbagai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat diuraikan dengan sistematis dan terperinci, sehingga buku ini menjadi wacana empiris tentang praksis pendidikan yang menarik untuk dibaca, terutama bagi para penulis yang sedang mengkaji masalah kebijakan pendidikan berbasis masyarakat.

Buku ini diperuntukan bagi semua pihak yang terkait dengan praksis pendidikan terutama instansi yang mengelola pendidikan, warga masyarakat, orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, komite sekolah, dan warga sekolah dapat

digunakan untuk mengembangkan wacana dan permasalahan pendidikan terutama di daerah pedesaan, sehingga secara sadar membantu mengembangkan kemampuan partisipasi edukatif secara menyeluruh. Penulis berharap semoga buku ini dapat memperkaya sumber bacaan tentang partisipasi masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Pancor, Oktober 2017  
Penulis

Dr. Aswasulasikin, M.Pd.

# **PENGANTAR DEKAN FKIP**

## **Universitas Hamzanwadi**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis buku ini sehingga dapat melahirkan karya akademik yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa, Kajian Fenomenologi di Sekolah Dasar".

Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah diutus Allah SWT, ke bumi untuk memberikan suritauladan dan pencerahan bagi sekalian ummat.

Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi, sudah barang tentu membawa banyak konsekwensi dan rasionalisasi pada segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Sentralisasi yang mengandung pengendalian pusat terhadap daerah, mengandung konsekwensi pada bentuk-bentuk penyeragaman, pragmatisme, harmonisasi dan tidak jarang bermuara pada bentuk-bentuk anti demokrasi, yang memiskinkan partisipasi masyarakat. Pergeseran bentuk pengelolaan pendidikan kearah desentralisasi, memang bukanlah perkara mudah dan sederhana, hal inilah yang dihadapi Indonesia hari ini, bagaimana ketimpangan antar

wilayah pusat dan daerah, antara desa dan kota menjadi fakta empiris, akan tetapi kondisi ini bukan berarti menegaskan bagaimana potensi desa, untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kearifan lokalnya.

Berangkat dari realitas di atas, penulis sebagai salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Hamzanwadi memotret fenomenologi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan pendidikan dengan segala dinamika didalamnya, yang bermuara pada keniscayaan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan sebagai suatu instrumen mendasar untuk mengembalikan pendidikan yang demokratis, membebaskan dan mencerahkan.

Sebagai sebuah karya akademik, terbitnya buku ini harus diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, tidak sebatas pertanggungjawaban dan pembuktian seorang sivitas akademika FKIP Universitas Hamzanwadi, tetapi karya ini menjadi bagian yang memperkaya khazanah keilmuan, dan pada akhirnya semoga memberikan kemanfaatan bagi sekalian ummat, karena bukankah kemuliaan kita ditentukan seberapa nilai kemanfaatan yang dikontribusikan bagi upaya perbaikan, khususnya dalam tatakelola dunia pendidikan kita.

*Wallahulmuafiqu Walhadi Ilasabilirrasyyad*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan FKIP Universitas Hamzanwadi,  
**Abdullah Muzakar, M.Si**

# DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS .....	v
PENGANTAR DEKAN FKIP .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II    PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.....</b>	<b>15</b>
A. Sekolah Dasar Negeri .....	16
B. Madrasah.....	21
C. Peran dan Fungsi Sekolah Dasar .....	24
D. Sekolah Bermutu .....	30
<b>BAB III    MASYARAKAT PEDESAAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pengertian Masyarakat .....	39
B. Masyarakat Pedesaan .....	45
C. Struktur Masyarakat.....	51
<b>BAB IV    <i>COMMUNITY-BASE EDUCATION</i></b> <b>(PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT) .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V    PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM</b> <b>PEMBANGUNAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>65</b>

A.	Pengertian Partisipasi.....	65
B.	Dimensi partisipasi masyarakat.....	72
C.	Tingkat Partisipasi.....	81
D.	Urgensi Partisipasi Masyarakat.....	88
E.	Syarat Timbulnya Partisipasi Masyarakat .....	92
F.	Masalah - Masalah Partisipasi Masyarakat .....	97
<b>BAB VI</b>	<b>MODAL SOSIAL DAN MODAL BUDAYA.....</b>	<b>105</b>
A.	Modal Sosial.....	107
B.	Modal Budaya.....	120
<b>BAB VII</b>	<b>PERAN ORANG TUA.....</b>	<b>127</b>
A.	Peran Orang Tua Dalam Praksis Pendidikan.....	127
B.	Partisipasi Orang Tua dalam Komite Sekolah .....	132
<b>BAB VIII</b>	<b>TUAN GURU SEBAGAI TOKOH MASYARAKAT.....</b>	<b>143</b>
A.	Istilah Tuan Guru.....	143
B.	Status Tuan Guru.....	145
C.	Peran Tuan Guru dalam Masyarakat .....	147
<b>BAB IX</b>	<b>PRAKSIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.....</b>	<b>157</b>
<b>BAB X</b>	<b>PENOMENA PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PRAKSIS PENDIDIKAN .....</b>	<b>171</b>

A. Gambaran Partisipasi Masyarakat Pedesaan.....	171
B. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Praksis Pendidikan di SD .....	178
C. Tingkat Partisipasi Masyarakat .....	198
D. Partisipasi Komite Sekolah Dalam Praksis Pendidikan.....	205
E. Peran Tuan Guru di Desa Jerowaru .....	240
F. Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan.....	270
<b>BAB XI PENUTUP .....</b>	<b>325</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>335</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Bentuk Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Praksis Pendidikan di Sekolah Dasar.....	179
Tabel 2	: Tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam praxis pendidikan.....	199
Tabel 3	: Indikator Peran Komite Sekolah.....	213
Tabel 4	: Bentuk Peran Komite Sekolah dalam pendidikan .....	217
Tabel 5	: Permasalahan Komite sekolah dalam Pembangunan Pendidikan .....	235
Tabel 6	: Program Pendidikan yang dikembangkan oleh Tuan Guru .....	260
Tabel 7	: Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan .....	301

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Interkasi partisipasi dalam pembangunan pendidikan .....	323
---	-----

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik telah membuka peluang yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk memberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya masing-masing. Desentralisasi merupakan gagasan perubahan yang berimbas pada pengelolaan pendidikan yang sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Dengan ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah, yang tercantum pada bab IV pasal 11 ayat 2 dijelaskan bahwa: “bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja”. Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah, tercantum pada bagian ketiga tentang hak dan kewajiban daerah terutama pasal 22 poin “e” dicantumkan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dasar pendidikan”. Undang-undang tersebut kemudian diperkuat oleh PP No. 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam pembagian urusan kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai otonom, maka penyerahan sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat diberika kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya kewenangan pengelolaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pelimpahan wewenang dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan prundang-undangan. Kewenangan yang luas tersebut diikuti dengan kewenangan dalam mengelola pemerintahan agar pemerintah daerah lebih leluasa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat lokal khususnya pendidikan. maka menjadi lebih jelas pembagian kewenangan dibidang pendidikan antara pemerintah pusat, propinsi, dan daerah atau kota.

Undang-undang otonomi daerah diartikan sebagai kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan pada semua lapisan masyarakat dan demokratisasi yang lebih baik. Otonomi daerah khususnya dalam bidang pendidikan diharapkan lebih memberikan otoritas kepada satuan pendidikan dan masyarakat sekitar dalam pengelolaanya. Otonomi dalam pendidikan akan membawa dua manfaaat, yaitu mendorong meningkatnya partisipasi dan perbaikan alokasi sumber daya proaktif dimasing-masing daerah agar kebijakan otonomi tepat

sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu dasar pemikiran makro yang melandasi lahirnya desentralisasi adalah, adanya kebutuhan untuk menghadapi tantangan persaingan global di era milenium ini. Dengan desentralisasi diharapkan masing-masing daerah lebih terpacu untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di tingkat global. Salah satu tujuan desentralisasi adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Desentralisasi di sektor pendidikan meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat setempat untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu otonomi pendidikan juga memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan dan semua unsur di dalamnya agar lebih berperan aktif dalam proses pengelolaan pendidikan agar menjadi sekolah yang bermutu.

Desentralisasi merupakan kecenderungan yang sangat dominan diantara fenomena global. Adapun tuntutan dan kebutuhan desentralisasi pendidikan muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda besar-global tentang demokrasi dan desentralisasi pemerintahan yang baik. Dwiningrum (2011) menjelaskan bahwa desentralisasi pendidikan diterapkan untuk meningkatkan

mutu pendidikan itu sendiri. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dampak positif atas kebijakan desentralisasi pendidikan meliputi: a) peningkatan mutu, b) efisiensi keuangan, c) efisiensi administrasi, d) pemerataan.

Perubahan kebijakan sentralistik ke desentralistik akan memberikan wacana bagi pengembangan dimensi demokrasi sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Tilaar (2002) bahkan mempertegas bahwa desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Tilaar menjelaskan ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan, yaitu 1) pembangunan masyarakat demokrasi, 2) pengembangan *sosial capital*, peningkatan daya saing. Ketiga hal tersebut sudah lebih dari cukup menjadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan sangat penting dalam perubahan dan peningkatan mutu pendidikan bangsa kita.

Dalam konteks pemikiran John Dewey; pendidikan merupakan arena tumbuh dan berkembangnya gaya hidup demokrasi. Artinya, penyelenggaraan, manajemen, proses belajar mengajar semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam masyarakat demokrasi, pendidikan adalah milik rakyat, dari dan untuk rakyat, sehingga pendidikan merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan sikap demokratis. Artinya pembangunan suatu masyarakat hanya akan terjadi apabila masyarakat mempunyai *sosial capital* yang besar dan bukan sekedar mempunyai dana yang cukup atau lembaga-lembaga yang mengatur dengan manajemennya yang terbuka. Otonomi

pendidikan mempunyai makna sebagai perwujudan penghargaan atas hak dan kewajiban rakyat memutuskan sendiri bagaimana pendidikan untuk anak-anaknya. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengambil keputusan tentang bentuk, proses dan keberadaan lembaga pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kehidupannya.

Desentralisasi di bidang pendidikan diharapkan akan lebih meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sehingga pemerataan pendidikan akan lebih cepat tercapai, karena pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan masyarakatnya, disamping mempunyai wewenang penuh untuk merencanakan dan mengeksekusi rencana tersebut. Otonomi pendidikan semakin mendekatkan masyarakat pada proses pendidikan, sehingga akuntabilitas layanan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal tersebut akan menuntut partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pelaksanaan pendidikan dan dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan.

Otonomi di bidang pendidikan memberikan keleluasaan pada sekolah dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan *social capital* dan *culture capital* dari masing-masing daerah untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu pendidikan. Otonomi pendidikan ini menuntut manajemen pendidikan agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan masyarakat secara efektif untuk

mendukung pembangunan pendidikan. Desentralisasi pendidikan dalam pelaksanaannya sangat memerlukan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan *output* pendidikan terutama dalam proses pembangunan pendidikan di daerah pedesaan.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan pendidikan, baik perseorangan maupun secara kelompok, karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Menurut beberapa pakar pendidikan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat bersifat sangat penting; *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa adanya partisipasi program-program pendidikan akan gagal. Alasan *kedua* bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pendidikan jika masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan perencanaannya, pelaksanaan, sampai evaluasi program pendidikan, karena mereka akan mengetahui secara mendasar bagaimana program-program pendidikan yang dilaksanakan. Alasan *ketiga* partisipasi menjadi penting dalam pembangunan pendidikan karena timbul anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pendidikan. Artinya adalah masyarakat memiliki hak untuk menentukan ide dan saran dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan.

Peningkatan mutu merupakan suatu keharusan dalam pembangunan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, sesuai dengan amanat tiga undang-undang tujuan pendidikan Indonesia, karena mutu merupakan isu strategis yang merupakan salah satu isu pokok dalam pendidikan. Disamping itu tingginya kebutuhan masyarakat terhadap *output* pendidikan yang bermutu seharusnya mendorong keperdulian berbagai pihak untuk terus berupaya membangun suatu pendidikan dan terus meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun pendidikan yang bermutu, diantaranya adalah memperbaiki manajemen pendidikan, meningkatkan profesional guru serta memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan pendidikan pada masing-masing daerah. Secara empiris ditunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam peningkatan mutu dalam pembangunan pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan.

Upaya pembangunan pendidikan di Indonesia mengalami banyak permasalahan dan hambatan, permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Rendahnya mutu pendidikan terjadi hampir pada semua daerah di Indonesia terutama daerah yang sedang berkembang dan daerah-daerah yang baru dimekarkan. Berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi di

Indonesia lebih banyak terjadi pada daerah pedesaan. Mutu pendidikan di daerah pedesaan memang pada kenyataannya lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan. Proses pembangunan pendidikan masih membutuhkan upaya maksimal agar mutu pendidikan bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan undang-undang pendidikan Indonesia.

Pendidikan di daerah pedesaan masih memiliki banyak tantangan dengan berbagai masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Pendidikan di pedesaan harus segera diperbaiki agar rencana pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan dan tujuan pendidikan bisa tercapai secara maksimal. Usaha dalam pembangunan pendidikan dan peningkatan mutu dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melakukan *research* (penelitian) mengenai permasalahan yang dialami dalam proses pembangunan pendidikan di pedesaan. Buku ini bisa bermanfaat menemukan hambatan dan sekaligus bisa memberikan solusi sumbang saran pentingnya pembangunan pendidikan di pedesaan. Kaitanya dengan pemaparan di atas tulisan ini mencoba menggali berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Desa Jerowaru Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

Masalah pendidikan sering kali muncul akibat adanya ketidak meratan pendidikan, adanya perbedaan antara kualitas pendidikan di perkotaan dan di pedesaan, kualitas pendidikan pedesaan membuat pemerintah sulit

menetapkan standar pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan di pedesaan karena dilatar belakangi rendahnya minat dari orang tua untuk menyekolahkan anak mereka, kondisi sosial budaya berkaitan dengan budaya masyarakat berupa pandangan masyarakat tentang pendidikan, adat istiadat, dan habite. Sebagian masyarakat pedesaan memandang bahwa pendidikan formal tidak begitu penting, mereka merasa percuma saja sekolah karena hanya akan menghabiskan banyak biaya dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Selain itu, kesadaran orang tua akan dunia pendidikan yang rendah juga menjadi penghambat majunya pembangunan pendidikan di pedesaan. Pola pikir masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa anak diwajibkan membantu untuk meringankan beban orang tua, sehingga sekolah bukanlah menjadi kewajiban bagi anak.

Pada dasarnya pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis. Langkah yang dilakukan antara lain memfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan dengan memberi suntikan dana 20% dari APBN, hal ini dilakukan karena kualitas sumber daya manusia tergantung dari kualitas pelaksanaan pendidikan sebagai agen dan pencetak sumber daya manusia. Alasan lain pemerintah memprioritaskan pembangunan dibidang pendidikan adalah melihat kenyataan bahwa berdasarkan data UNDP tentang Human Development Index (HDI: 2016) menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan 113

dari 188 negara dan wilayah. HDI mengukur peringkat suatu negara dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. (Sumber: UNDP - HDI 2017). Menurunnya peringkat Indonesia tersebut khususnya dalam bidang pendidikan adalah salah satu faktor yang menyebabkan sekolah-sekolah di Indonesia belum dapat bersaing dalam tataran global.

Dilihat dari konteks sosial budaya, karakteristik masyarakat pedesaan merupakan masyarakat selalu hidup dalam kebersamaan di dalam perilaku keseharian mereka. Karakteristik masyarakat pedesaan merupakan budaya saling menghargai, gotong royong, saling membantu satu sama lain, memiliki kehidupan yang sederhana, menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, religius, ramah dan kekeluargaan. Tetapi dengan adanya perubahan sosial dan kebudayaan serta teknologi dan informasi, sebagian karakteristik tersebut sudah mulai pudar dan bahkan sudah ada yang hilang. Sedangkan cara beradaptasi masyarakat sangat sederhana, yaitu dengan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dan gotong royong antara sesama. Uniknyanya tanpa harus dimintai pertolongan mereka akan serta merta saling bahu membahu untuk meringankan pekerjaan tetangganya ataupun pekerjaan yang mereka sepakati bersama.

Budaya masyarakat pedesaan dikenal suka saling membantu dan selalu berpartisipasi dalam membantu meringankan beban tetangga mereka. Bahkan dalam membangun desa mereka pun selalu bergotong royong dan

selalu patuh pada pimpinan atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang ada di desa mereka. Karakteristik masyarakat di atas akan berbeda jika dihadapkan pada praksis pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan secara umum masih minim, sehingga mutu pendidikan di pedesaan menjadi rendah. Masyarakat pedesaan tidak terlalu peduli dengan kondisi pendidikan yang ada di desa mereka, masyarakat umumnya acuh dengan proses pendidikan. Minimnya partisipasi ini membuat tanda tanya besar, dengan karakteristik masyarakat yang masih menganut budaya gotong royong, saling menghargai, dan memiliki rasa saling percaya (*trust*) yang tinggi seharusnya berimbang pada tingginya tingkat partisipasi dalam pendidikan. Keperdulian masyarakat terhadap pendidikan memang sangat kurang. Rendahnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam pendidikan perlu perhatian penuh dari pemerintah daerah atau tokoh-tokoh yang ada agar partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terus ditingkatkan, karena partisipasi masyarakat akan sangat menentukan kemajuan pembangunan pendidikan.

Partisipasi masyarakat perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermanfaat bagi sekolah dan masyarakat dalam pembangunan dan efektifnya proses pendidikan, sehingga pendidikan di pedesaan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan; tercapainya

tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan sudah diatur dalam undang-undang pendidikan, hal ini akan memperluas peluang kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil pengamatan penulis di desa Jerowaru menunjukkan bahwa; partisipasi masyarakat dalam pendidikan sudah ada tetapi masih bersifat fisik atau sumbangan tenaga dan hanya dilakukan pada beberapa sekolah swasta atau madrasah, karena madrasah merupakan pendidikan yang sifatnya swadaya masyarakat. Sementara sekolah dasar (SD) dianggap tanggung jawab pemerintah, sehingga kerap kali diabaikan oleh masyarakat setempat.

Peran masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, kurikulum (proses pembelajaran), monitoring, motivasi dan kebijakan-kebijakan lain dalam pelaksanaan pendidikan masih belum maksimal dan bahkan belum ada sama sekali dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan di desa Jerowaru menghasilkan *output* yang kurang berkualitas dan kurang mampu bersaing ditingkat nasional dan global. Partisipasi masyarakat yang belum optimal akan mengakibatkan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan juga tidak akan memadai walaupun pemerintah daerah berupaya maksimal untuk membantu, sehingga proses

pembangunan pendidikan menjadi tidak maksimal dan tidak bisa mencapai tujuan pendidikan dengan baik.

Berbagai persoalan pendidikan yang digambarkan di atas memerlukan kajian yang mendalam untuk menemukan solusi dari semua permasalahan pendidikan yang ada di desa Jerowaru tersebut. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di sekolah dasar ini perlu dilakukan, karena pembangunan pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) merupakan pondasi proses pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan SD/MI merupakan proses pendidikan yang dilakukan setelah pendidikan yang dilakukan oleh orang tua sejak anak-anak belum memasuki bangku pendidikan. Pendidikan di SD/MI merupakan modal utama dalam menunjang proses pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Buku ini menjelaskan tentang pembangunan pendidikan di daerah pedesaan. Karena masyarakat pedesaan identik dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga penulis tertarik untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat pedesaan terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan pendidikan. Kemudian salah satu ciri masyarakat pedesaan dilihat dari segi pendapatan dan mata pencahariannya; masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian berupa pertanian, nelayan, beternak, buruh, dan buruh tani. Buku ini menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi

masyarakat dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat serta bagaimana proses partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan pendidikan.

## **BAB II** PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Tingkat satuan pendidikan yang dianggap sebagai dasar pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) yang dikelola oleh swasta, di sekolah inilah anak didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Secara umum pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan mendasari proses pendidikan selanjutnya. Pendidikan ini diselenggarakan untuk anak-anak yang telah berusia tujuh tahun dengan asumsi bahwa anak seusia tersebut mempunyai tingkat pemahaman dan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan dirinya. Sekolah dasar memang diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi anak didik. Pendidikan inilah yang selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas diri anak didik.

Proses pembangunan pendidikan disekolah dasar seharusnya dipahami secara luas dengan tujuan agar dapat mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan di tingkat ini. Walaupun, kita mengenal pendidikan anak usia dini (PAUD), tetapi setidaknya PAUD lebih mengedepankan untuk melatih anak bersosialisasi dengan teman dan masyarakat, bukan untuk mengikuti pendidikan dan

pembelajaran yang mengarah pada pemahaman pengetahuan (kognitif) siswa.

### **A. Sekolah Dasar Negeri**

Pendidikan di sekolah dasar negeri (SDN) merupakan tempat proses kegiatan yang mendasari tiga aspek-aspek dasar dalam pendidikan, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga aspek ini merupakan dasar atau landasan pendidikan yang paling utama. Hal ini karena ketiga aspek tersebut merupakan hal paling hakiki dalam kehidupan. Kita membutuhkan sikap-sikap hidup yang positif agar kehidupan kita lancar. Kita juga membutuhkan dasar-dasar pengetahuan agar setiap kali berinteraksi tidak ketinggalan informasi, yang tidak kalah pentingnya adalah keterampilan. Pendidikan pada sekolah dasar merupakan kegiatan pembekalan diberikan selama enam tahun berturut-turut. Pada saat inilah anak didik dikondisikan untuk dapat bersikap sebaik-baiknya. Pengertian sekolah dasar sebagai basis pendidikan harus benar-benar dapat dipahami oleh semua masyarakat sehingga mereka dapat mengikuti pola pendidikannya. Tentunya, dalam hal ini, kegiatan pendidikan dan pembelajarannya mengedepankan landasan bagi kegiatan selanjutnya. Tanpa pendidikan di sekolah dasar, tentunya sulit bagi kita untuk memahami konsep-konsep baru pada tingkatan lebih tinggi.

Muhadjir (2001) menjelaskan bahwa, "*schooling* mencakup semua upaya pendidikan dengan program yang

eksplisist direncanakan. Pendidikan formal, nonformal, ataupun *adult education* termasuk dalam konsep *schooling*". Pemisahan antara pengajaran yang hanya menekankan materi pembelajaran dengan pendidikan yang menekankan pendidikan nilai kepribadian, sudah perlu ditinggalkan. Sejarah berbagai bangsa telah membuktikan bahwa pengembangan sumberdaya manusia lewat pendidikan, yang tidak lain lewat *schooling* (baik lewat formal, nonformal, ataupun lewat *adult education*) telah mampu memacu pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan menjadi lebih cepat. "*Rate of return jenjang schooling*" menurut Muhadjir terkait dengan tingkat perkembangan masyarakatnya.

Sejarah membuktikan bahwa lembaga nonformal berfungsi mengisi tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh pendidikan formal, hal tersebut dijelaskan oleh Coombs dalam Muhadjir (2001). Pada saat ini peranan yang tidak dapat diberikan oleh pendidikan formal dan dapat diberikan oleh pendidikan nonformal. Noeng mengutip dari "*the international conference on adult education and development*" yang diselenggarakan di Dar es salam Tanzania yang intinya adalah:

- a. Didasari tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana dan bagian pembangunan;
- b. Bila pendidikan orang dewasa harus memberikan sumbangan pada pembangunan, maka harus merupakan integral bagi kehidupan;

- c. Pendidikan orang dewasa harus mendorong perubahan, mulai dengan mendorong perubahan, mulai dengan menumbuhkan kesadaran tentang kebutuhan mereka, dilanjutkan dengan membantu agar mereka mampu memecahkan mereka sendiri (Hall & Kidd, 1978)

Bila ditelaah lebih dalam peran pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk menumbuhkan dan mendorong perubahan serta menumbuhkan kesadaran bagi umat manusia agar mampu menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan hidupnya di masa yang akan datang. Bila ditelaah lebih dalam, maka sebagian besar usaha pengembangan sumberdaya manusia ini harus melalui proses pendidikan mulai dari anak-sampai dewasa. Usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia terutama di daerah pedesaan atau dinegara yang sdang berkembang, masih bersifat mentransfer teknologi, memindahkan produk budaya suatu masyarakat ke masyarakat lain.

Secara makro, pengembangan kemampuan, keterampilan dan keahlian sumber daya manusia perlu mempunyai arah yang memberikan prospek masa depan yang lebih cerah. Menurut Muhadjir (2001), program pengembangan sumber daya manusia mempunyai dua kutub. Kutub pertama adalah pengembangan yang menyangkut sumber daya para warga masyarakat yang masih berada pada tingkat pengembangan minimal. Untuk mereka perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga

mampu berpartisipasi sebagai warga negara, berpenghasilan yang layak untuk hidup, cukup sehat, dan mempunyai keluarga sejahtera. Kutub kedua adalah program yang menyangkut pengembangan optimal. Warga masyarakat yang memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi dan mempunyai kemampuan prospektif perlu disediakan peluang cukup untuk menghasilkan produk-produk profesional kualitas tinggi. Identifikasi siswa berbakat dan intelegensi perlu dilacak sejak awal.

Pertanyaan besarnya adalah, apakah pendidikan di negara kita sudah mampu mengembangkan sumberdaya manusia seperti yang diharapkan? Jawabannya adalah; untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, maka sistem pendidikan yang ditepkan di Indonesia masih butuh perbaikan dari berbagai sisi, diantaranya adalah, perbaikan sistem pemerataan akses, dalam perbaikan kurikulum diperlukan kajian yang lebih mendalam dan persiapan yang lebih akurat, dan pengelolaan pendidikan yang lebih profesional, serta peningkatan kesejahteraan guru (memadai, jujur, dan adil); maka dengan ini pengembangan sumber daya akan bisa tercapai dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Saat ini, sistem pendidikan tradisional telah menjadi sistem yang dominan ditingkat pendidikan dasar dan menengah. Friere (2009) membagi Sistem pendidikan tradisional menjadi beberapa asumsi yang umumnya diterima oleh orang meskipun tidak disertai bukti

mendalam atau kesahihan. Asumsi Friere tersebut yaitu: 1) adanya suatu kumpulan pengetahuan dan keterampilan penting tertentu yang harus dipelajari oleh anak; 2) tempat terbaik bagi sebagian besar anak untuk mempelajari unsur-unsur ini adalah sekolah formal; 3) cara terbaik supaya anak bisa belajar adalah mengelompokkan mereka dalam kelas-kelas yang ditetapkan berdasarkan usia mereka.

Sulit untuk memikirkan sasaran-sasaran pendidikan tanpa memper-hitungkan konteks sosial. Sampai taraf tertentu sasaran pendidikan tumbuh dari harapan masyarakat terhadap sekolah-sekolahnya. Dengan adanya tuntutan masyarakat pada sekolah, sasaran pendidikan mungkin akan terwakili dalam tuntutan kebutuhan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, sekolah dasar harus melibatkan orang tua karena proses pembelajaran bukan hanya tanggung jawab guru tetapi juga orang tua. Friere (2009) mencontohkan sebagian Sekolah Dasar mengadakan pertemuan orang tua murid dengan guru untuk menyampaikan perkembangan siswa-siswinya, khususnya pada kelas-kelas terbawah. Beberapa sekolah memadukan pertemuan langsung dan penyerahan raport. Bagaimanapun orang tua biasanya dilibatkan secara langsung untuk membahas perkembangan anak-anak karena para guru harus menentukan apakah anak tertentu akan naik kelas atau harus mengulang setahun lagi di kelas yang sama.

Dalam sistem pendidikan SD/MI bisanya bimbingan dan penyuluhan formal dilakukan oleh para guru dan

kepala sekolah, dimana seorang guru mengajar dikelas tertentu untuk (hampir semua bidang studi dan sekaligus menjadi wali kelasnya). Secara keseluruhan para guru dan kepala sekolah memberi bimbingan pada murid-murid dalam persoalan-persoalan pribadi, keluarga, pergaulan disekolah dan luar sekolah, masalah belajar, dan apapun yang dikeluhkan oleh murid-murid mereka.

## **B. Madrasah**

Madrasah merupakan salah satu penyelenggara pendidikan yang biasanya bernaung di bawah yayasan pondok pesanteren dan Departemen Agama. Menurut Tilaar (2004) Madrasah sebagai salah satu wadah pengembangan sesuai dengan perkembangan visi dan misi kehidupan bangsa dalam era reformasi dengan mengaktualisasikan potensi-potensi positif yang dimiliki madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan khas islam sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita nasional, oleh karena bukan saja peserta didiknya yang signifikan tetapi juga karena karakteristik madrasah sangat sesuai dengan cita-cita reformasi.

Apabila disimak dari sejarah lahirnya dan perkembangan madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari dan untuk masyarakat. inilah identitas madrasah. Malik Fajar dalam Tilaar (2004) mengatakan bahwa. "madrasah adalah madrasah" artinya lembaga madrasah tidak dapat digantikan dengan lembaga-

lembaga lainya karena madrasah mempunyai visi, misi dan karakteristik yang sangat khas di dalam masyarakat dan bangsa indonesia baik dilihat dari segi kebudayaan, pendidikan, politik bahkan ekonomi.

Nahti (2012) menjelaskan Model pendidikan madrasah merupakan pendidikan yang diadopsi dari model pendidikan barat yang di kembangkan Indonesia. Walaupun madrasah juga dikenal dalam tradisi pendidikan Islam di Timur Tengah, dalam hal substansi materi pembelajaran tetap saja menyangkut ilmu-ilmu keislaman, bukan pengetahuan umum sebagaimana dikenal di Madrasah dalam tradisi pesantren Indonesia dewasa ini, yang diperkenalkan sejak tahun 1970-an.

Madrasah umumnya berada di bawah Departemen Agama Republik Indonesia dan sebagian besar berada di bawah naungan yayasan pondok pesanteren. Ciri umum madrasah yang berada di bawah naungan pesantren memiliki *culture* yang berbeda dengan kultur disekitarnya atau sub-kultur yang bersifat *idiosyncretic*. Fenomena pesantren sebagai sub-kultur sebagaimana Raharjo (1985) bertitik tolak pada dua asumsi. *Pertama*, bahwa gerak dan dinamika pesantren mengikuti gerak dan dinamika masyarakat. Peran pendidikan tidak berhenti pada mobilitas vertikal, yakni menjaga keutuhan hubungan dengan tuhan melalui penjelajahan materi agama islam tetapi juga berkembang melalui wilayah horizontal. *Kedua*, bahwa pesantren adalah sistem.

Pada masa kolonial sesuai dengan misi kolonialisme, pendidikan islam dianaktirikan. Pendidikan islam dikategorisasikan sebagai sekolah liar. Bahkan menurut Tilaar (2004) Pemerintah kolonial telah melahirkan peraturan-peraturan yang membatasi bahkan mematikan sekolah-sekolah partikular termasuk madrasah dengan mengeluarkan peraturan yang terkenal "*wilde schoolen ordonantie*" tahun 1933. Akibat pemberlakuan yang negatif dari pemerintah kolonial maka pendidikan islam termasuk madrasah menghadapi kesulitan-kesulitan dan terisolasi dari arus modernisasi.

Organisasi pendidikan Islam memang terus hidup namun tidak memperoleh perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan islam dibiarkan hidup meskipun di dalam keadaan yang sangat sederhana dan hidup apa adanya. Kemudian pada tahun 70-an perhatian pemerintah mulai ditunjukkan kepada pembinaan madrasah misalnya dengan lahirnya SKB 3 Menteri. Masuknya Madrasah sebagai sub-sistem Nasional mempunyai berbagai konsekuensi antara lain dimulainya suatu pola pembinaan melalui satu ukuran yang mengacu kepada sekolah-sekolah pemerintah. Madrasah mengikuti kurikulum Nasional, ikut serta dalam Ujian Nasional, dan berbagai peraturan yang diatur oleh Departemen Pendidik Nasional (DEPDIKNAS) padahal Madrasah Bernaung di bawah Departemen Agama (DEPAG).

Berkembangnya madrasah yang sebagian besar merupakan sekolah swasta membuka peluang bagi

masyarakat untuk membangun pendidikan formal melalui partisipasi yang lebih aktif dan efektif. Sistem pendidikan ini semestinya dikembangkan menuju sistem pendidikan yang terpadu dan tidak saling tumpang tindih kebijakan antara DEPAG, DIKNAS dan Yayasan. Sehingga akan memungkinkan masyarakat memiliki akses dan pilihan yang semakin luas dan fleksibel terhadap pendidikan.

Dewasa ini harapan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu semakin meningkat. Dilihat dari sudut pandang pemerintah dan yayasan yang menaungi penyelenggaraan pendidikan, maka Jalal dkk. (2001) menyatakan bahwa “penyelenggaraan pendidikan melalui madrasah merupakan tantangan baru terhadap dunia pendidikan. Karena pendidikan tidak bisa lagi hanya didasari niat asal berjalan, melainkan harus lebih bermutu dan akuntabel”.

Akuntabilitas pendidikan bukan lagi hanya kepada pemerintah atau yayasan penyelenggara, yang lebih penting lagi adalah orang tua, masyarakat, dan *stakeholders* yang harus ikut secara langsung terlibat dalam proses pembangunan pendidikan. Hal ini menuntut pendidikan baik itu pendidikan di swasta ataupun negeri untuk lebih berdaya dalam mengemban misinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **C. Peran dan Fungsi Sekolah Dasar**

Sekolah dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam

meningkatkan sumberdaya manusia, karena pendidikan pada dasarnya merupakan usaha mengembangkan sumberdaya manusia. Sekolah dasar diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Dalam konteks pembangunan bangsa dan negara pendidikan peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan negara dan bangsa. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharjo (2006) maju mundurnya negara dan bangsa tergantung dari maju mundurnya pendidikan. Dengan demikian pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekolah sebagai komponen sistem pendidikan nasional, mengembangkan banyak peran dan fungsi. Dalam undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 menyebutkan fungsi dan tujuan sekolah adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang ingin dicapai adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Mahas Esa, berkhlah mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Suyata (2006) dalam makalahnya yang disampaikan dalam konsultasi semlok pengembangan pendidikan dasar kawasan miskin di bali pada tanggal 26-28 April,

menjelaskan; idealnya setiap pribadi itu cerdas, baik dan terampil. Untuk itu suatu keharusan diciptakannya pendidikan dasar bermutu bagi semua warga negara antara lain membangun sekolah-sekolah bermutu di tingkat pendidikan dasar. Dominasi otak perlu diimbangi dengan hati dan tangan. Pendidikan watak, moral, nilai serta pendidikan keterampilan menempati posisi lemah disekolah dalam urusan tersebut. Pembahasan lebih populer tentang fungsi pendidikan akan mempermudah pemahaman, terutama fungsi sekolah. Di mana saja sekolah membawa misi membangun pribadi dan membangun bangsa, secara lebih luas fungsi ini berupa (1) mengembangkan warga negara yang baik, (2) mengembangkan pribadi yang utuh, (3) menyiapkan pemimpin disemua urusan dan tingkat, (4) membangun watak dan menyatukan bangsa, dan (5) mematuhi pemerintah yang syah. Mengutip pendapat Jhon Goodlad dalam Suyata (2006). Dalam konteks membangun pribadi utuh, dimensinya meliputi kesemuanya: akademik (berfikir), sosial, personal (moral-spiritual), dan vokasional. Sistem pendidikan nasional kita nampaknya kedodoaran alam fungsi dan tujuan tersebut. Peran serta masyarakat secara luas akan memberdayakan sekolah dan warganya.

Mengacu pada fungsi pendidikan nasional di atas maka standar yang perlu dirujuk untuk pendidikan dasar perlu dicermati dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

misalnya tentang standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar termuat dalam pasal 26 ayat (1) meletakkan dasar kecardasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup untuk mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Hal ini perlu menjadi pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak. Sekolah tidak dapat berhasil mencapai tujuan pendidikan dengan standar yang ada tanpa dukungan keterlibatan orang tua dan masyarakat. pentingnya peran serta masyarakat telah dituangkan dalam pasal 54 yang mengatur siapa saja yang dapat berperan dalam pendidikan untuk apa saja serta bentuknya. Sebelum undang-undang nomor 20 tahun 2003 ini keluar, PP tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional no 39 tahun 1992 telah ditetapkan namun kurang efektif, fokus peran serta cenderung pada orang tua siswa. Standar pendidikan nasional tidak menyinggung peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Sejak dilaksanakannya program wajib belajar 9 tahun, fungsi pendidikan dasar telah mengalami perubahan. Sekolah dasar tidak menjalankan fungsi terminal melainkan fungsi transisional. Artinya bagi setiap anak usia sekolah (6-13 tahun) menamatkan pendidikan di SD bukan lagi sebagai kondisi akhir dari pendidikan formal yang diharapkan, melainkan sebagai tujuan, karena semua pihak harus membantu individu yang tamat SD/MI untuk melanjutkan pendidikan ke SLTP/Mts. Sebagai konsekuensi dari perubahan fungsi pendidikan ini maka

aspek-aspek sistemik dalam pendidikan dasar akan mengalami perubahan. Ikhsanuddin (2010) menjelaskan Fungsi yang sangat mendasar dan menonjol pada sekolah dasar adalah:

1. Fungsi *educatif* merupakan upaya bimbingan dan pengajaran diorientasikan pada pembentukan landasan kepribadian yang kuat. Fungsi ini diwujudkan dengan modeling yaitu memberikan contoh kongkrit dan keteladanan perilaku yang etis, normatif dan bertanggung jawab dalam setiap berinteraksi dengan siswa.
2. Fungsi pengembangan dan peningkatan, merupakan penjabaran dari fungsi *educatif* yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Fungsi ini dirujuk pada optimalisasi potensi siswa melalui penciptaan pembelajaran yang kondusif, yaitu lingkungan interaksi yang sehat dan memberikan kemudahan kepada siswa untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan sistem nilai dimana dia hidup.

Pada intinya fungsi pendidikan sekolah dasar harus mengacu pada fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan, harkat dan martabat manusia, dan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Program pendidikan dasar lebih memperhatikan perkembangan kognitif (pengetahuan), afektif (perilaku

siswa), dan didukung oleh psikomotor (keterampilan) siswa sehingga pendidikan yang diberikan kepada siswa menjadi lebih bermakna.

Dalam proses pendidikan, sekolah dasar menempati posisi yang sangat vital dan strategis. Kesalahan dalam melaksanakan pendidikan di tingkat dasar ini akan berakibat fatal bagi pendidikan selanjutnya. Sebaliknya, keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan mempermudah keberhasilan pada tingkat-tingkat berikutnya. Menurut Zamroni (2000), usaha untuk meningkatkan mutu sekolah dasar sudah sangat mendesak. Tanpa ada peningkatan kualitas sekolah dasar, usaha peningkatan kualitas sekolah lanjutan tidak akan berhasil dengan maksimal. Dia mengidentifikasi dua bentuk usaha peningkatan kualitas sekolah. Bentuk pertama adalah peningkatan kualitas sistem dan manajemen sekolah. Hal ini berhubungan dengan "*the flow of students*". Kedua, peningkatan kualitas berkenaan dengan proses belajar mengajar di ruang kelas.

Dua bentuk peningkatan kualitas pendidikan disekolah dasar yang dikemukakan oleh Beeby di atas, peningkatan kualitas sekolah dasar juga dipengaruhi oleh orang tua dan masyarakat. Hasil pendidikan disekolah dasar juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Bantuan dan petunjuk bagi anak sekolah dasar dalam kegiatan belajar sangat diperlukan, selain itu orang tua perlu memberikan *support* dan dorongan agar anak tetap bisa interest dan kesenangan dalam belajar.

Dengan kata lain untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar perlu adanya kerjasama yang erat antara orang tua dan guru, antara sekolah dan rumah, dan antara sekolah dengan lingkungannya dalam hal ini adalah masyarakat sekitar. Masyarakat harus tau apa yang terjadi di sekolah, apa yang dibutuhkan sekolah, dan apa kekurangan sekolah yang perlu diperbaharui, sebaliknya pihak sekolah memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat dan orang tua tentang apa dan bagaimana proses pendidikan serta memberikan informasi apa yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menciptakan sekolah dasar yang bermutu.

Perlu dipertegas bahwa orientasi tujuan pendidikan nasional menjadi sangat penting sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dasar 1945. Yamin (2013) menjelaskan beberapa tujuan yang bisa disampaikan yang meliputi tujuan pendidikan yang berorientasi pada bangsa yang berkualitas, bangsa mandiri, bangsa beradab, dan bangsa berdaya saing tinggi.

#### **D. Sekolah Bermutu**

Pendidikan harus mengubah paradigmanya, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus bisa memberdayakan semua unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, termasuk diantaranya adalah sumberdaya masyarakat yang ada, sarana, dan memperbanyak profesionalisme pendidik. Arcoro (2005) mengatakan manajemen mutu merupakan sarana yang

memungkinkan para profesional pendidikan dapat beradaptasi dengan “kekuatan perubahan” yang menghantam sistem pendidikan bangsa kita.

Pengertian mutu dijelaskan oleh Jerome bahwa mutu merupakan sebuah proses struktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Fokus mutu didasari upaya positif yang dilakukan oleh individu. Berbicara perbaikan mutu pendidikan, sering kali yang dibicarakan adalah perbaikan peringkat kenaikan kelas atau nilai raport. Sekolah yang bertipe seperti ini, tanggung jawab perbaikan pendidikan lebih banyak difokuskan pada guru. Secara umum guru hanya terfokus pada aspek pendidikan seorang siswa: membantu siswa belajar dan dan mendapatkan pengetahuan. Seharusnya mutu pendidikan akan membuat semua orang akan bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang baik dengan segala aspek pendukung dan produk pendidikan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Prinsip-prinsip mutu pendidikan menurut Arcoro (2005) adalah menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil-wakil masyarakat dan pembuka bisnis untuk bekerja bersama guna memberikan kepada siswa sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan kebutuhan masyarakat, bisnis, dan akademik sekarang dan masa depan. Dalam mengembangkan mutu pendidikan di desa, dibutuhkan pemimpin/pengelola satuan pendidikan dalam kajian ini adalah SD/MI yang bertanggung jawab dalam manajemen

untuk memberikan arahan. Pengelola satuan pendidikan harus mengembangkan visi dan misi sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masing-masing wilayah. Visi dan misi harus didukung oleh guru, staf, siswa, orang tua, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya.

Menurut Zamroni (2001) untuk meningkatkan mutu sekolah, selain melakukan pendekatan secara konvensional (*input oriented*) sebagaimana selama ini perlu diiringi pula dengan pendekatan inkonvensional, yaitu membangun budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan situasi yang akan memberikan landasan dan arah untuk berlangsungnya suatu proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Budaya sekolah dapat dideskripsikan sebagai pola nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, mitos, dan kebiasaan yang dibentuk dalam proses pendidikan.

Untuk mendukung transformasi pendidikan menuju pendidikan bermutu maka pengembangan visi dan misi sekolah yang dibuat harus mengacu pada visi pendidikan Nasional yaitu: “pendidikan yang mengutamakan kemandirian menuju keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai pancasila”. Makna visi pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional diharapkan mampu menghasilkan manusia dan masyarakat Indonesia yang demokratis-religius yang berjiwa mandiri, bermartabat, menjunjung tinggi harkat manusia dan menekankan keunggulan sehingga tercapai kemajuan dan kemakmuran.

Mengutip penjelasan Jalal dkk. (2001) terkait penjelasan visi pendidikan nasional. Dikatakan bahwa “pengertian rumusan visi pendidikan nasional mengandung sejumlah unsur penting, yaitu kemampuan (*abilitas*), sifat-sifat demokratis, tolen, kreatif, estetis, kritis, bijaksana dan bermoral”. Dengan sejumlah sifat tersebut, kemandirian harus diartikan pula dimilikinya kemampuan untuk berperan dalam tata hubungan sistemik dan sinergik pada skala nasional maupun global. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa penerapan prinsip mutu dalam pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan di desa, juga mengandung maksud bahwa keunggulan atau mutu pendidikan tersebut hanya dapat dilakukan secara selektif, dengan urutan prioritas karena tidak mungkin semua sektor akan diunggulkan, hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat pedesaan masih banyak kekurangan, diantaranya adalah tingakt pendidikan masih rendah, sosial ekonomi yang belum memadai, sarana pengembangan pendidikan belum mendukung, dan partisipasi masyarakatnya masih sangat rendah.

Satu hal lagi yang perlu diingat bahwa sistem pendidikan nasional tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemandirian, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Untuk menjadikan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam

praksis pendidikan perlu dikembangkan dengan berakar kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Pemerintah dan pengelola pendidikan sekolah dasar harus memberikan otoritas kepada masyarakat untuk mengelola sekolah di wilayah mereka sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat berhak mengatur pendidikan di desa mereka, orang tua berhak untuk mengatur pendidikan anak-anak mereka, warga desa sadar akan keharusan untuk menyejahterakan desanya.

Dalam Pemberdayaan masyarakat tidak boleh terjadi *involusi*, yaitu proses yang semakin jauh ke bawah sehingga menjadi tidak bermutu. Perlu dikembangkan teknologi informasi di pedesaan agar membantu untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mereka tentang bagaimana pentingnya pendidikan dan bagaimana memanfaatkan pendidikan itu sendiri. Karena sampai saat ini pemahaman masyarakat desa tentang makna dan pentingnya pendidikan masih perlu terus ditingkatkan dalam proses pembangunan pendidikan.

Aktualisasi pendidikan nasional mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak lagi dipikul hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibebankan kepada masyarakat. Artinya adalah pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab pada segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki keperdulian yang sama terhadap mutu dan keberhasilan pembangunan pendidikan. Masyarakat yang selama ini pasif terhadap pendidikan, ditantang agar lebih

aktif dan bahkan proaktif sebagai penanggung jawab pembangunan pendidikan di wilayah mereka masing-masing.

Tanggung jawab pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat tidak hanya sekedar memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah, tetapi yang lebih penting masyarakat diharapkan turut menentukan jenis pendidikan yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah turut bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan desa dan bahkan ikut memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Peningkatan mutu pendidikan bersifat dinamis yang sangat terkait dengan berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh sekolah secara keseluruhan. Teori-teori dan gagasan tentang peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan, akan tetapi peran teori dan gagasan tersebut tidak berguna jika tidak dibarengi dengan aktivitas riil dalam proses peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, karena implementasi tidak akan bisa semulus dan semudah teori yang ada.

Berdasarkan paparan di atas, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya cukup dengan teori, tetapi harus diimplementasikan secara riil. Dalam upaya peningkatan mutu sekolah Nugroho (2008) mengangkat isu-isu yang berkenaan dengan mutu pendidikan dalam tatanan implementasi dan sangat penting untuk diperhatikan,

yaitu: kualitas kurikulum, kualitas lulusan, gurkualitas guru (sumberdaya), kualitas infrastruktur pendukung, dan kualitas buku pelajaran. Jika semua kualitas tadi bisa terpenuhi dan di implementasi dalam proses pendidikan, maka akan bisa tercapai pendidikan yang bermutu.

Pandangan Riant Nugroho di atas dikuatkan oleh pendapat Mortimore dkk. (1988) bahwa peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kepemimpinan yang memiliki tujuan; peran aktif wakil kepala sekolah; fokus pada proses pembelajaran; keterlibatan guru yang profesional; konsistensi diantara guru; belajar yang sistematis dan terstruktur; komunikasi antara guru dan siswa; keterlibatan orang tua; dan suasana yang positif.

Agar proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar memiliki kekuatan penuh, maka diperlukan kesepakatan semua pihak tentang konsep sekolah bermutu atau sekolah yang baik perlu diusahakan. Menurut Suyata (2006) kita menemukan banyak sekolah yang baik, tetapi kita kesulitan menemukan praktek untuk mencapai mutu yang bagus tersebut. Yang ada adalah *best result* tanpa *best practises*. Memang tidak semua sekolah yang ada di pedesaan dapat menjadi unggul, tetapi perlu diyakini bahwa semua sekolah dapat menjadi baik dan terus menjadi baik.

Umumnya kriteria sekolah didasarkan pada pencapaian kelulusan pada ujian dengan standar alat ukur standar dengan prestasi akademik yang telah lama

digunakan. Tes semacam itu oleh Goodlad dikecam akan mengandung bias. Goodlad (1984) mengajukan ukurannya kepuasan: orang tua, siswa dan guru terhadap sekolah dan pelayanannya. Kepuasan ini digali dari berbagai hal menyangkut tingkat kepuasan iklim sekolah, iklim sekolah, hubungan kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, pembelajaran, kurikulum, hubungan guru dengan orang tua dan indikator yang memerlukan kesepakatan lain.

Untuk mencapai sekolah bermutu Glasser (1992), menyarankan lima syarat sebagai berikut:

1. Mutu merupakan produk yang hangat serta perduli hubungan antar manusia.
2. Mutu selalu berguna dalam beberapa hal, misalnya dalam kehidupan pribadi.
3. Mutu terbaik adalah hal bagi setiap orang, yang bekerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dapat dicapai dalam waktu tertentu.
4. Mutu selalu dapat di tingkatkan, walaupun hanya sedikit atau pada batas-batas tertentu.
5. Mutu dirasakan baik, semakin besar mutu maka semakin lama rasa baik itu ada.

Jika seorang kepala sekolah memiliki tujuan untuk menghasilkan sekolah bermutu seharusnya kepala sekolah setuju untuk memasukan lima kondisi usulan Glasser di atas walaupun dalam definisi mutu permulaan. Maka kesuksesan untuk mencapai mutu akan tergantung pada seberapa baik kondisi ini dapat diimplementasikan.

Sekolah dan masyarakat pada setiap daerah perlu menyepakati posisi mutu pendidikan di sekolah dasar pada daerah masing-masing, menetapkan keyakinan bahwa semua sekolah dapat menjadi lebih baik, menyepakati permasalahan-permasalahan yang utama yang timbul dan maknanya, menyepakati gagasan sekolah bermutu dan basis nilainya, menyepakati rencana perbaikan jangka panjang dan, menyediakan sumber pendanaan dan informasi pendidikan bermutu terus berkembang. Melalui kesepakatan inilah makan proses pembangunan pendidikan dengan peningkatan mutu melalui usaha mengembangkan partisipasi masyarakatnya.

## BAB III

# MASYARAKAT PEDESAAN

### A. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan, untuk menuju tujuan yang sama. Manusia hidup berbudaya dan bermasyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki karakteristik dengan berelasi atau berhubungan diantara individu pada kultur atau institusi tertentu. Pengertian yang dipaparkan Arifin mengandung makna bahwa masyarakat kumpulan beberapa manusia yang berada dalam suatu tempat tinggal tertentu, yang berkarakter dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akan membentuk satu kultur dalam suatu daerah. Sedangkan Setiadi dkk. (2011) menjelaskan masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal pada daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama.

Dalam konteks lain Gidden (1984) mengemukakan terma masyarakat memiliki dua pengertian pokok yaitu: pengertian pertama berupa konotasi umum "*social association*" (asosiasi sosial) atau interaksi; pengertian lainnya berupa "masyarakat" sebagai sebuah kesatuan,

yang memiliki batas-batas yang membedakannya dengan masyarakat-masyarakat lain yang mengelilinginya. Ambiguitas terma ini dalam kaitannya dengan dua pengertian di atas sesungguhnya tidak separah kelihatannya. Hal ini karena totalitas masyarakat sama sekali tidak berarti selalu memiliki batas-batas yang benar-benar jelas, meskipun totalitas masyarakat tersebut lazimnya berkaitan dengan bentuk-bentuk kelokalan yang tegas.

Masyarakat menurut konsepsi baru yang dikemukakan oleh Veeger (1985) bahwa "individu dan masyarakat tidak mungkin dipisah-pisahkan antara yang satu dengan lain". maksud dari Veeger adalah kebebasan individu tidak mungkin dipikirkan tanpa adanya ikatan dan keterikatan dengan orang lain. independensi sebagai individu tidak mungkin ada tanpa dependensi dari masyarakat. Antara kedua kutub tersebut terdapat suatu relasi timbal balik, sebagaimana tiap-tiap pribadi menghidupi masyarakatnya, begitu juga tiap-tiap masyarakat menghidupi pribadinya. Tanpa individu tidak akan ada masyarakat, dan tanpa masyarakat tidak akan ada individu. Penjelasan yang dikemukakan oleh Veeger menunjukkan adanya hubungan imbal balik antara individu dengan masyarakat, karena tidak akan ada masyarakat kalau tidak ada individu sebaliknya tidak akan ada aktivitas sosial dalam masyarakat kalau individu tidak terlibat didalamnya.

Pengertian yang diungkapkan oleh Veeger juga menunjukkan bahwa individu hidup untuk bermasyarakat karena keterlibatan individu akan menimbulkan aktivitas sosial. Konsepsi masyarakat yang dihasilkan oleh pandangan ini bercorak "*kolektivitis*" dan "*organistis*". *Kolektivitis* adalah ciri masyarakat yang cenderung untuk meremehkan, bahkan akan menghapus keunikan dan kepentingan individu sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab, demi kepentingan dan kemauan kolektif masyarakat, bangsa, atau negara. Masyarakat mengenakan suatu pola pikir dan bertindak yang seragam pada anggotanya. "*Holistis* adalah kecenderungan untuk menekankan secara berlebihan kesatuan kehidupan umat manusia dengan tindakan mengakui perbedaannya", (Veeger, 1985). Pandangan tentang masyarakat *kolektivitis* dan *holistis* mempunyai akar pada realisme yang merupakan aliran filsafat yang mengajarkan bahwa konsep-konsep umum seperti manusia, binatang, pohon, keadilan, keindahan dan sebagainya mewakili suatu realitas yang nyata diluar orang yang memimirkan mereka. Konsep masyarakat juga mempunyai realitas dalam dirinya dan diluar pikiran manusia itu sendiri.

Pandangan Veeger di atas menunjukkan bahwa antara individu dan masyarakat akan membentuk aktifitas sosial untuk mendapatkan kehidupannya, dan terbentuk sesuai dengan perkembangan sosialnya. Toennies dalam Veeger (1985) menjelaskan bahwa "masyarakat bukan organisme yang dihasilkan oleh proses-proses biologis, juga bukan

mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian individual yang masing-masing berdiri sendiri, sedang mereka didorong oleh naluri-naluri spontan yang bersifat menentukan bagi manusia". artinya terbentuknya masyarakat merupakan usaha manusia untuk mengedakan dan memelihara relasi-relasi timbal balik yang mantap, karena kemauan manusia yang mendasari masyarakat. Relasi tersebut berpengaruh pada corak dan ciri interaksi orang dalam kelompok atau masyarakat tertentu.

Relasi dan interaksi yang membentuk corak dan ciri yang terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hubungan antara manusia yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama. Sergiovanni (1994) menjelaskan bahwa "relasi dari orang-orang untuk satu tujuan dan hubungan antar orang-orang tidak didasarkan pada kontrak tetapi komitmen. Masyarakat sosial terorganisir disekitar hubungan dan merasa saling ketergantungan diantara mereka". Masyarakat diartikan sebagai pusat hubungan dan keterikatan antara nilai, dan keyakinan yang menyediakan kondisi yang diperlukan untuk menciptakan rasa kebersamaan dalam satu ikatan.

Hidup dalam organisasi dan kehidupan di masyarakat berbeda dalam kualitas dan jenis. Menurut Sergiovanni bahwa, dalam masyarakat menciptakan kehidupan sosial dengan orang lain yang memiliki niat yang sama. Dalam organisasi hubungan yang dibangun akan menjadi kodifikasi dalam sistem hirarki, peran, dan harapan. Disamping itu masyarakat juga dihadapkan

dengan masalah kontrol. Bukannya mengandalkan komunitas tindakan pengendalian eksternal tapi lebih mengandalkan norma, tujuan, nilai-nilai, sosialisasi profesional, kolegalitas, dan saling ketergantungan secara alami. Setelah terbentuk, ikatan masyarakat di sekolah dapat menjadi pengganti untuk sistem formal supervision, evaluasi, dan pengembangan staf untuk manajemen dan skema organisasi yang berusaha untuk mengkoordinasikan apa yang guru lakukan dan bagaimana mereka bekerja sama dan kepemimpinan itu sendiri.

Ikatan masyarakat di sekolah juga perlu mendefinisikan ulang bagaimana ide-ide tertentu harus dipahami. Misalnya dengan masyarakat setempat, pemberdayaan guru, siswa, dan lain-lain fokus pada kebijaksanaan dan kebebasan, dan lebih penting adalah komitmen terhadap kewajiban, dan tugas bersama. Menurut Sergiovanni (1994), hasil kolegalitas yang kurang dari pengaturan organisasi, memaksa orang untuk bekerja sama dari sumber-sumber eksternal lainnya. Anggota masyarakat terhubung dengan satu sama lain sebagai akibat dari merasa ketergantungan, memiliki kewajiban bersama, dan hubungan lainnya.

Interaksi seseorang dalam kelompok atau masyarakat dapat di bedakan menjadi dua tipe yaitu *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Sergiovanni (1994) menterjemahkan *Gemeinschaft* merupakan "komunitas" dan *Gesellschaft* adalah "masyarakat". sedangkan Veeger (1985)

mengartikan *Gemeinschaft* adalah paguyuban, persekutuan hidup yang hidup bersama dalam langkah atau tindakan untuk tujuan hidup pada dirinya sendiri. *Gesellschaft* diartikan (dalam bahasa jawa: petembayan atau suatu bentuk organisasi). Dalam kelompok ini relasi-relasi kebersamaan dan kebersatuan dari masing-masing orang berasal dari faktor-faktor lahiriah. Artinya adalah kelompok individual yang hidup bersama dan tinggal bersama secara alami dan damai.

*Gemeinschaft* terdiri dari tiga bentuk: *Gemeinschaft* dengan kekerabatan, tempat, dan pikiran Tonnies (Sergiovanni, 1994). *Gemeinschaft* dengan kekerabatan berasal dari kesatuan dalam arti identitas "kita" bahwa keluarga dan keluarga besar memberikan *Gemeinschaft* tempat muncul dari berbagi habitat umum atau lokal. Pikiran *Gemeinschaft* mengacu pada ikatan kebersamaan yang saling terikat dan menghasilkan tujuan bersama. Pikiran *Gemeinschaft* semakin memperkuat identitas "kita". Pikiran *gemeinschaft* sangat penting untuk membangun komunitas di sekolah. Tonnies menjelaskan, *Gemeinschaft* mengungkapkan pikiran masyarakat dari kehidupan mental. Dalam hubungannya dengan orang lain, jenis ini merupakan bentuk dari *gemeinschaft*.

Argumen dasar Tonnies adalah bahwa sebagai kemajuan masyarakat modern, dunia hanyut semakin jauh dari *gemeinschaft* ke *gesellschaft*. Nilai-nilai masyarakat akan diganti dengan kontrak. Hubungan kelompok sekunder-mendominasi hubungan kelompok utama Cooley

(Sergiovanni, 1994). Masyarakat menjadi kurang sakral dan lebih sekuler. Hidup menjadi lebih impersonal. Hubungan antara orang-orang dan di antara mereka dan lembaga mereka menjadi lebih dibuat sendiri. Makna dan arti dalam kehidupan menjadi lebih sulit untuk ditemukan. "Teori *gesellschaft* berkaitan dengan konstruksi buatan agregat manusia yang dangkal menyerupai *gemeinschaft* sejauh individu-individu hidup dan tinggal bersama-sama dengan damai. Namun, dalam *gemeinschaft* mereka tetap pada dasarnya bersatu terlepas dari semua faktor memisahkan, sedangkan di *gesellschaft* mereka pada dasarnya terpisah terlepas dari semua faktor yang menyatukan.

*Gemeinschaft* merupakan suatu kemajuan. sedangkan *gesellschaft* terlalu banyak menciptakan hilangnya makna masyarakat. Artinya adalah tidak untuk mengubah kembali ke dunia *gemeinschaft* lebih romantis, tapi untuk membangun *gemeinschaft* dalam *gesellschaft*. Kita perlu menentukan teori yang harus mendominasi bidang kehidupan kita. Kebanyakan orang akan setuju bahwa keluarga, keluarga besar, dan lingkungan dalam konteks ini adalah masyarakat pedesaan harus didominasi oleh nilai-nilai *gemeinschaft*.

## **B. Masyarakat Pedesaan**

Makna masyarakat pedesaan hingga saat ini belum ada kesepakatan umum tentang keberadaan masyarakat pedesaan dalam bentuk pengertian yang baku. Akan tetapi

menurut Setiadi dan Usman (2011) bahwa pedesaan memiliki arti tersendiri dalam kajian struktur sosial atau kehidupannya. Dalam keadaan yang sebenarnya pedesaan dianggap sebagai standar dan pemeliharaan sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti gotong royong, tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, kesenian, kepribadian dalam berpakaian, adat isitiadat, nilai-nilai, dan norma. Pedesaan acap kali dideskripsikan sebagai tempat kehidupan bermasyarakat dimana anggota masyarakatnya bergaul dengan dengan rukun, tenang selaras dan akur.

Definisi resmi yang tertuang dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1979, pengertian desa dipahami sebagai “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sementara para ahli sosiologi lebih memusatkan perhatiannya bagi masyarakat desa “sebagai unit sosial” yaitu sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu, yang tidak selalu sama dengan administrasi setempat, dan mencakup tanah pertanian yang kadang-kadang dikuasai secara bersama.

Beberapa ciri umum desa yang universal di jelaskan oleh Setiadi dan Usman (2011: 38) sebagai berikut: (1) desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan

wilayah usaha tani, (2) dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan, (3) karena faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, (4) populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari dirinya sendiri”, (5) kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan (6) desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada di kota.

Ciri-ciri masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan yang kuat antara sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat hakekatnya, bahwa seseorang merasa bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimana dia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. selanjutnya Setiadi dan Usman (2011) merinci ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain:

1. Di dalam masyarakat pedesaan diantara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya.
2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan.

3. Sebagian warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.
4. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama dan adat istiadat.

Ciri-ciri masyarakat di atas memberikan berbagai definisi dan gambaran tentang masyarakat pedesaan. Wasistiono dan Tahir (2006) menjelaskan khusus tentang desa; definisi desa sama dengan pengertian tentang masyarakat pedesaan, sampai saat ini masih perlu di kaji karena batasannya masih mejadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Karena desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Kata "desa" berasal dari bahasa india yaitu "*swadesi*" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sedangkan Soetardjo (1984) menjelaskan dalam istilah berbeda, sebutan untuk desa dapat dilihat dari tujuan sudut pandang suatu daerah misalnya: di Aceh memakai nama "*Gampong*" atau "*meunasah*" bagi daerah hukum yang paling bawah. Di daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian dinamakan Nagari, di daerah Minahasa diberi nama "*wanua*", di daerah Ujung Pandang di beri nama "*Gaukang*". Sedangkang di daerah lombok sendiri daerah hukum terendah namanya tetep "desa" atau daerah hukum yang paling rendah di bawah desa adalah "*Keliang*" yang artinya adalah Kepala Dusun.

Wasistiono dan Tahir (2006) menjelaskan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat dan kebiasaan setempat, menurut peraturan Negara dan peraturan daerah yang berlaku.
- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- c. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala desa dapat diberikan bantuan atau sumbangan.

Selanjutnya Wasistiono dan Tahir (2006) memaparkan beberapa unsur desa yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Ketiga unsur tersebut yaitu: 1) Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat; 2) Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat; 3) tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa, yang menyangkut seluk beluk masyarakat desa (*rural society*). Unsur-unsur desa yang dipaparkan di atas juga di terangkan oleh Setiadi, Usman, dkk. dalam buku pengantar sosiologi.

Corak kehidupan di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan suatu "*gemeinschaft*" yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini dapat dimengerti karena penduduk desa merupakan "*face to face group*" dimana mereka betul-betul saling mengenal seolah-olah mengenal dirinya sendiri. Pada dasarnya desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal. Secara sosiologis masyarakat desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya.

Kehidupan masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang masih menganut pola kehidupan tradisional walaupun tidak selamanya benar. Sebab pada awalnya pola masyarakat pertanian pedesaan secara tradisional digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan dewasa ini di beberapa pedesaan sudah banyak yang menganut pola bisnis, dimana pola bercocok tanam sudah mengarah pada agrobisnis. Dari sisi kebudayaan menurut Setiadi dan Usman (2011) masyarakat pedesaan yang tradisional tersebut merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial di sekitarnya tanpa menerima pengaruh luar. Pernyataan Elly dan Usman ada benarnya karena masyarakat pedesaan hidup di daerah yang secara geografis terlatak jauh dari keramaian kota. Dengan demikian masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat dengan sifat-sifat yang hampir seragam.

### C. Struktur Masyarakat

Struktur sosial difahami sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur ini saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Unsur pembentuk masyarakat dapat berupa manusia atau individu yang ada sebagai anggota masyarakat, tempat tinggal atau lingkungan kawasan yang menjadi tempat di mana masyarakat itu berada dan juga kebudayaan serta nilai dan norma yang mengatur kehidupan bersama.

Struktur masyarakat Indonesia secara umum ditandai oleh dua ciri yang unik yaitu ciri yang bersifat horizontal dan vertikal. Menurut Nasikun (2011) struktur masyarakat secara horizontal merupakan struktur masyarakat yang ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Ciri masyarakat horizontal yang dipaparkan oleh Nasikun ini sering disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia *majemuk*, suatu istilah untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda.

Sifat struktur masyarakat menurut Nasikun (2011) juga dijelaskan oleh Setiadi dan Usman (2011) sebagai dimensi struktur sosial vertikal dan dimensi struktur sosial

horizontal. Dimensi vertikal akan melihat masyarakat secara bertingkat. Sebagai kenyataan sosial, dimensi sosial akan tampak pada stratifikasi sosial, kelas sosial, dan status sosial dalam masyarakat. Sedangkan dimensi horizontal disebut sebagai diferensiasi atau pengelompokan sosial; yaitu perbedaan sosial secara horizontal dalam arti perbedaan-perbedaan tersebut tidak mengandung perbedaan secara bertingkat, melainkan berbeda saja satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut walaupun tidak mengandung unsur perbedaan secara vertikal namun dalam masyarakat sering muncul penilaian yang memandang perbedaan tersebut dengan dimensi pertikal.

Struktur masyarakat Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Nasikun dan Setiadi (2011) menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Pluralitas masyarakat Indonesia yang bersifat multidimensional akan menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal, sementara stratifikasi sosial sebagaimana yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia akan memberi bentuk pada integrasi nasional yang bersifat vertikal.

Struktur masyarakat yang dijelaskan di atas berbeda dengan pendapat Bourdieu (1990). Menurut pandangan Bourdieu bahwa susunan struktur masyarakat berdasarkan perspektif struktur fungsional (perspektif fungsional) memiliki asumsi utama yaitu melihat

masyarakat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat sub-sistem.

Sub-sistem tersebut masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat di tukar satu sama lain. Agar sistem berjalan stabil dan baik maka sub-sistem harus ini selalu ada, dan menjalankan fungsinya masing-masing. Apabila salah satu atau beberapa sub-sistem yang ada tidak berperan stabil sebagaimana fungsinya, maka sistem tersebut akan hancur berantakan atau sistem struktur masyarakat akan mengalami kekacauan.

Pendapat Bourdeu di atas diperkuat oleh Dahrendof (1959) yang mengemukakan empat asumsi dasar perspektif fungsional yaitu:

*Pertama*, setiap masyarakat merupakan suatu struktur unsur yang relatif gigih atau stabil. Masyarakat dipandang sebagai bangunan yang statis. *Kedua*, masyarakat mempunyai struktur unsur yang terintegrasi dengan baik. *Ketiga*, Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, memberikan sumbangan pada terpeliharanya masyarakat sebagai suatu sistem. *Keempat*, setiap unsur dalam struktur sosial berfungsi atas dasar konsensus mengenai nilai dikalangan para anggotanya.

Konsep penting perspektif fungsional di atas adalah struktur dan fungsi yang menunjukkan pada dua atau lebih bagian komponen yang berbeda dan terpisah, akan tetapi berhubungan satu sama lain. Struktur sosial terdiri atas berbagai komponen masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat/lokal

dan sebagainya. Dari konteks ini terdapat dua elemen dalam struktur masyarakat dari para fungsionalis dalam menganalisis pendidikan, yaitu: apa fungsi pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan? Dan apa fungsi hubungan fungsional antara institusi pendidikan dengan bagian institusi yang lain dalam sistem sosial?. Secara umum para analis fungsionalis melihat fungsi serta kontribusi yang positif lembaga pendidikan dalam memelihara atau mempertahankan keberlangsungan sistem sosial.

Konsep Struktur bisa digunakan secara teknis dan *general* jika struktur dipahami sebagai aturan dan sumber daya. Giddens (2010) menjelaskan bahwa struktur akan terlibat secara berulang dalam reproduksi sistem-sistem sosial dan berfungsi sebagai dasar teori strukturasi. Apabila digunakan secara bebas, struktur bisa mengacu pada sifat-sifat struktural masyarakat. menurut Giddens struktur merupakan sebuah kategori yang terlibat pada masing-masing konsep struktural yang ditampilkan sebagai berikut:

- (1) *prinsip-prinsip struktural*: prinsip pengorganisasian totalitas masyarakat;
- (2) *struktur*: rangkaian aturan sumber daya, yang terlibat dalam pengejawantahan institusional sistem sosial;
- (3) *sifat-sifat struktural*: ciri-ciri institusional sistem sosial, yang menentang lintas ruang dan waktu.

Kombinasi prinsip-prinsip struktural dalam sistem masyarakat yang dikemukakan oleh Giddens merepresentasikan tingkat analisis institusional yang

paling komperhensif. Analisis tentang prinsip-prinsip struktural mengacu pada pola-pola diferensiasi instusi. Kajian tentang struktur meliputi pemisahan, pengelompokan, ralisasi transformasi/mediasi yang tersirat dalam prinsip-prinsip struktural. *Struktur set* (rangakaian struktur) dibentuk oleh sifat yang dapat mengubah aturan dan sumber daya secara timbal balik yang terlibat dalam reproduksi sosial.



## BAB IV

# COMMUNITY-BASE EDUCATION (PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT)

Tujuan pendidikan nasional adalah memberi peluang secara luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, karena pemerintah bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan. Sumarno dkk. (2001) mengatakan bahwa Sosok masyarakat masa depan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan sendiri untuk menetapkan idialisasi masa depannya, memilih alternatif kebijakan yang akan ditempuh, mengelola jalanya kehidupan, dan mengadakan kontrol sosial sendiri. Semua itu tumbuh tidak secara *top-down*, melainkan secara *bottom-up*. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pembenahan sebagai kebijakan dasar sebagai mana diuraikan berikutnya.

Selama ini telah terjadi kesenjangan antara masyarakat dengan sekolah, seolah ada jurang pemisah. Bahkan terjadi anggapan bahwa sekolah hanyalah sekedar tempat penitipan anak karena orang tua tidak memiliki waktu untuk menjaga dan mendidik, atau mungkin tidak bisa dan tidak tau cara mendidik anak. Pada era otonomi dewasa ini keluarga dan masyarakat bukan lagi pihak yang pasif hanya menerima keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. "Masyarakat harus proaktif,

menentukan, dan membuat program pendidikan bersama sekolah dan pemerintah” (Nurkholis, 2006). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan terutama di pedesaan sangat bermanfaat bagi dalam peningkatan sumber daya manusia, karena pendidikan merupakan jalan utama menuju gerbang kesejahteraan suatu bangsa. Rhoda dalam Nurkholis (2006) mengemukakan bahwa keikutsertaan keluarga (orang tua) dan masyarakat dalam pendidikan memiliki banyak keuntungan, sebagaimana diantaranya yaitu:

“*Pertama* pencapaian akademik dan perkembangan kognitif siswa berkembang secara signifikan, *kedua* orang tua siswa dapat mengetahui perkembangan anaknya dalam proses pendidikan di sekolah, *ketiga* orang tua akan menjadi guru yang baik di rumah dan bisa menerapkan formula-formula positif untuk mendidik anaknya, *keempat* akhirnya orang tua memiliki sikap dan pandangan positif terhadap sekolah.

Pendidikan diartikan sebagai bentuk kegiatan orangtua untuk mempengaruhi kehidupan anak. Orang tua menanamkan nilai-nilai yang ada di masyarakatnya sehingga generasi muda siap secara fisik dan mental memasuki kehidupan masyarakat yang memiliki nilai-nilai kolektif tertentu (Maliki, 2008). Artinya adalah pendidikan bukan hanya menjadi tugas sekolah, akan tetapi pendidikan kepada anak juga perlu dilakukan oleh orang tua dan masyarakat. sehingga proses pendidikan itu tidak terputus dan tidak hanya terbatas di sekolah formal saja.

Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbagai institusi kemasyarakatan harus ditingkatkan wawasan, sikap, kemampuan, dan komitmennya sehingga dapat berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Menurut Sumarno dkk. (2001) apabila lebih banyak institusi kemasyarakatan peduli terhadap pendidikan maka pendidikan akan lebih mampu menjangkau berbagai kelompok sasaran seperti kelompok wanita anak-anak kurang beruntung (miskin, berkelainan, tinggal di daerah terpencil).

Menurut Tilaar (2004) bangsa dan masyarakat Indonesia telah bertekad untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru sebagai hasil dari reformasi untuk meninggalkan kehidupan yang telah dibangun orde baru yang telah menafikan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Visi dari pembangunan nasional yaitu kesepakatan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tentram aman dan damai. Visi tersebut telah lahir dari pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam krisis nasional yang berkepanjangan. Kondisi kehidupan nasional termasuk pendidikannya yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik. Saat ini kualitas kehidupan dan jati diri bangsa telah menurun. Visi masyarakat Indonesia baru tersebut dituangkan di dalam misi bidang pendidikan nasional yaitu mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Misi pendidikan untuk membangun

masyarakat Indonesia baru menurut Tilaar yaitu berbagai usaha untuk mengembangkan kualitas-kualitas manusia Indonesia yang: (1) demokratis; (2) berakhlak mulia; (3) kreatif; (4) inovatif; (5) berwawasan kebangsaan; (6) sadar hukum dan lingkungan; (7) disiplin; (8) bertanggung jawab, dan (9) menguasai IPTEK.

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin di atasi hanya oleh lembaga persekolahan saja, untuk melaksanakan program-programnya, sekolah seharusnya perlu didukung oleh berbagai pihak di antaranya masyarakat dan *stakeholders* lainnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pembangunan pendidikan. Partisipasi itu perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektivitas pendidikannya. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk dana, melainkan juga sumbangan pemikiran dan tenaga.

Praxis pembangunan pendidikan menurut Pidarta (2005) termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan-kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah bisa dilepas dari masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan masyarakat dimasukkan dalam manajemen sekolah agar lebih mudah mengadakan kontak langsung dengan

mereka, manajemen sekolah diharapkan berinisiatif dan bertindak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan yang aktif, karena kerjasama dengan masyarakat sudah menjadi bagian kegiatan penting dalam proses pembangunan pendidikan.

Dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), para orang tua menerima pelayanan yang berkualitas melalui siswa-siswa yang menerima pendidikan yang mereka butuhkan pula. Peran orangtua sebagai *partner* dan pendukung pembangunan pendidikan. orangtua dapat berpartisipasi dalam proses sekolah, mendidik siswa secara kooperatif, berusaha membantu perkembangan sekolah yang sehat dan maju, memberi sumbangan sumberdaya dan informasi, mendukung dan melindungi sekolah pada saat mengalami kesulitan dan krisis, Nurkolis (2006). Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praksis pembangunan pendidikan di sekolah dasar diperlukan adanya kerjasama antara sekolah dan masyarakat, hubungan tersebut dibangun melalui komunikasi yang baik, sesuai dengan pengertian hubungan yang dijelaskan oleh Daryanto (2006) sebagai berikut:

Secara sederhana “hubungan” “*communication*”. (di Indonesia: komunikasi) dapat diartikan sebagai “*process by wich a person transits a massage to another*”. (proses penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain). Komunikasi di dalam administrasi sekolah adalah suatu proses penyampaian sesuatu (berita/ide kepada orang lain). Hal ini bisa secara

intern yaitu didalam organisasi sekolah itu sendiri. Juga bisa ekstern, artinya antara sekolah dengan pihak lain (keluar) masyarakat lembaga/instansi yang lain.

Selanjutnya Columna et all. (2008) menyatakan bahwa:

*“Teachers need to create culturally responsive pedagogical practices (Sutliff, 1996). In other words, APE and PE teachers should consider various cultural customs, values, and leisure preferences. This may enable teachers to understand cultural behaviors and norms and respond in an appropriate pedagogical manner. Once teachers develop responsive pedagogical practices, services can be modified to meet the needs of all learners.*

*Regardless of how familiar families are with APE services, teachers need to be the ones to initiate contact with families. It is always important to share information with Hispanic parents in their language of preference (Spanish or English) in order to achieve optimal understanding of content. Moreover, IDEIA of 2004 mandates that information for special education meetings and services be provided in the preferred language of the family. Research findings suggest that first-generation Hispanics in the United States tend to have limited proficiency in the English language compared with subsequent generations (Shaull & Gramann, 1998).”*

Hubungan antara sekolah dan masyarakat yang dijelaskan oleh Daryanto dan Luis Columna dkk. di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terlihat adanya berbagai unsur peran masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan diantaranya yaitu; (1) Komunikator, yaitu

orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain (juga sebagai sumber berita); (2) Apa yang disampaikan (isi/informasi); (3) Alat atau media yang digunakan (dapat berupa kata-kata, laporan); (4) Tujuan penyampaian (dapat berupa perintah, pemberitahuan, laporan); (5) Orang menerima informasi (komunikasi/ *communicatte/recever*); (6) *Responce*/jawaban yang diberikan oleh si penerima

Komunikasi yang dimaksud pada hakikatnya adalah hubungan kerja yang erat antara masing-masing manusia (*human relationship*), karena antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, di dunia ini manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia harus saling berkomunikasi agar mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya Glen Hass dan Parkay (1974: 86) mengatakan : *"the present challenge to work within an educational system whose traditional has been to prepare student for a homogeneous, well balance, unchanging society"*.

Menurut Daryanto (2006) dalam dunia pendidikan dikenal dua macam hubungan (komunikasi): 1) Komunikasi dalam penyelenggraan program pendidikan dengan masyarakat sekolah. Dalam hal ini administrasi sekolah hendaknya membina para guru dan murid untuk: (a) belajar membaca secara komperhensif, diskriminatif dan komunikatif, (b) belajar mendengarkan secara tepat dan kritis, menilai dan mempertimbangkan gagasan-gagasan yang didengarnya, (c) sanggup mengekspresi dalam berbicara yang jelas lancar dan efektif, (d) sanggup mengemukakan pendapat/gagasan dalam bentuk tertulis sehingga orang lain lain dapat membaca dan mengerti, (e)

sanggup melakukan penilaian secara kritis terhadap apa yang dilihatnya. Semuanya ini merupakan komunikasi intern bahkan sifatnya lebih subjektif. 2) Komunikasi dengan masyarakat di luar sekolah merupakan suatu kenyataan bahwa sekolah tidak bisa berdiri sendiri dan terpisah dari dunia luar, melainkan beda dalam suatu sistem yang masyarakat yang tetap. Kehadiran sekolah berlandaskan kerjasama pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang mendukungnya. Oleh karena itu orang-orang yang bekerja di sekolah mau tidak mau harus bekerjasama dengan masyarakat. Masyarakat dimaksud adalah orangtua murid, kelompok-kelompok atau forum, organisasi-organisasi. Tugas sekolah adalah bagaimana menumbuhkan rasa ikut memiliki dan rasa ikut bertanggung jawab masyarakat terhadap sekolah.

Berbagai paparan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di pendidikan telah dijelaskan di atas, akan tetapi belum dijelaskan secara rinci dan detail tentang pengertian partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk dan dimensi partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi, urgensi partisipasi dan syarat timbulnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Maka pada bab berikutnya akan dijelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan secara rinci.

## BAB V

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

### A. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Echols dan Shadily, 2006), sedangkan dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionary* dijelaskan *participation means (actin of)*, (Hornby, 2003). Partisipasi masyarakat memiliki banyak arti, dalam buku reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah dijelaskan partisipasi masyarakat berarti bahwa masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan upaya, memperbesar kapasitas atau memperluas hak dan kewajiban masyarakat. Ketika masyarakat terlibat seharusnya masyarakat memberikan waktu, uang, gagasan, kepercayaan dan kemauan.

Menurut Suryosubroto (2002) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberikan inisiatip terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Davis (2002) memberikan definisi tentang partisipasi sebagai berikut: "*participation definet a mental and emotional involved*

*at a person in a group situation which encourager then contribut to group goal and share responsibility in them".* Pengertian singkat tentang partisipasi yang dikemukakan oleh Davis dapat dijabarkan menjadi tiga ide pokok sebagai berikut: 1) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi, partisipasi masyarakat bukan sekedar aktivitas fisik saja tetapi keterlibatan seseorang lebih bersifat ikatan emosional atau psikologis, sehingga akan menimbulkan *trust* dan ikatan yang kuat antara pengelola pendidikan dengan masyarakat setempat. 2) ide dari partisipasi ini adalah motivasi seseorang untuk memberikan bantuan yang terwujud dalam kesempatan untuk mengembangkan inisiatif dan kreatifitas serta tercapainya tujuan kelompok masyarakat. Dengan demikian partisipasi bukan sekedar memberikan persetujuan atas sesuatu yang harus diputuskan, tetapi lebih kearah hubungan sosial psikologis diantara anggota pada suatu kelompok. 3) ide partisipasi merupakan penerimaan tujuan dalam aktivitas-aktivitas kelompok masyarakat untuk pembangunan pendidikan yang ada di wilayah mereka.

Definisi partisipasi masyarakat juga dikemukakan oleh Dwiningrum (2011) yaitu, "keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal". Partisipasi masyarakat bersifat proaktif dan reaktif (artinya adalah masyarakat ikut bernalar atau bertindak), ada kesempatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan

yang mengisi kesepakatan, pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Paparan definisi partisipasi di atas dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di SD/MI merupakan keterlibatan masyarakat secara mental, emosi, dan fisik anggota masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada suatu daerah tertentu. Partisipasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah keterlibatan masyarakat Desa Jerowaru dengan terlibat langsung dalam proses pembangunan pendidikan di (SD/MI) atau melalui perwakilan orang tua siswa yaitu komite sekolah. Masyarakat ikut terlibat sepenuhnya dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proses pembangunan pendidikan yang ada di wilayah desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

Keterlibatan seseorang baik pikiran maupun tenaga dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, mengevaluasi dan memperoleh manfaat dari program-program pembangunan pendidikan di daerah mereka. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa esensi partisipasi adalah keterlibatan sikap dan perbuatan nyata dalam kegiatan menyusun rencana, melakukan program, memanfaatkan hasil, mengevaluasi program, menanggung resiko dan bertanggung jawab atas suatu program kegiatan pembangunan pendidikan di sekolah dasar. Partisipasi dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh frekuensi dari

partisipasi masyarakat setempat. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003, maka masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pemerintah desa yang merupakan wakil dari pemerintah daerah harus berusaha membangun kemitraan dan bersama-sama mengembangkan konsensus dalam berbagai hal untuk meningkatkan kualitas dalam pembangunan pendidikan di daerah pedesaan.

Praxis pendidikan di pedesaan dalam melibatkan masyarakat telah terjadi kesalahan yang fundamental, oleh karena itu perlu adanya perubahan mendasar dalam menyusun hubungan sinergik antar unsur dan komponen dari berbagai lapisan masyarakat dengan penyelenggara yang pendidikan yang ada. Muhadjir (2000) mengatakan "era kekinian disebut sebagai era reformasi, perubahan yang terlihat belum dapat diartikan sebagai reformasi". Yang dimaksud perubahan reformasi oleh Muhadjir adalah perubahan fundamental filosofinya dan teorinya. Transfer nilai-nilai *filosofi* dan teori yang melandasi reformasi di masyarakat akan menjadikan reformasi suatu transformasi pendidikan.

Dalam visi pemberdayaan masyarakat menurut Muhadjir (2000) adalah semua masalah dan cita kemasyarakatan menjadi tugas masyarakat itu sendiri. Suatu *welfare state* yang *community based* mencitakan semua masalah kesejahteraan warga masyarakat diatasi dan

dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri. *Empowering* atau pemberdayaan merupakan konsep mutakhir dalam proses pembangunan pendidikan di pedesaan. Konsep terdahulu berubah sebatas *liberation* atau kebebasan. Konsep yang terkait dengan *development* atau pengembangan pembangunan pendidikan menurut Muhadjir (2000) bahwa *social empowering yang community based* memiliki paradigma yang berbeda dengan desentralisasi. Desentralisasi menggunakan paradigma bahwa pemerintah yang memiliki otoritas, lalu didelegasikan kepada pengelola pendidikan dan masyarakat, sedangkan *Social empowering yang community based* menggunakan paradigma yang menekankan atau mengekspose penting kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk olahan dan keputusan dari dan untuk masyarakat itu sendiri, dalam konteks ini adalah keterlibatannya dalam praksis pembangunan pendidikan di daerah pedesaan.

Dengan demikian konsep yang memudahkan menyingkronkan paradigma pemikirannya dengan *social empowering* adalah otonomi, bukan desentralisasi. Otonomi yang dimaksud oleh Muhadjir di atas adalah pengakuan atas otoritas masyarakat untuk membuat keputusan kebijakannya perlu diakui. Meskipun demikian harus disadari bahwa harkat dan martabat manusia menuntut kualitas kehidupan yang terus meningkat, dan itu pula perlu disadari oleh semua kelompok masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang memiliki wawasan tentang suatu kemajuan maka tuntutan tidak terlalu tinggi, dan

juga tidak peka terhadap *deviant-deviant* sosial. Muhadjir (2000) menjelaskan; agar harkat dan martabat manusia dapat terus dikembangkan, maka otonomi perlu dilengkapi dengan standar mutu dan norma ideal agar harkat dan martabat manusia tetap terjaga.

Pendapat Muhadjir di atas kaitanya dengan desentralisasi dan otonomi pendidikan, maka Sumarno dkk. (2001) memaparkan bahwa “perumusan kebijakan operasional dalam otonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan pendidikan, yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan, dan sarana prasana. Agar efektif, maka implementasi dari kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi daerah”. Dalam konteks otonomi pendidikan, untuk melaksanakan program-programnya sekolah perlu mengundang berbagai pihak (keluarga, masyarakat, dan *stakeholders*) untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan pendidikan.

Perkembangan partisipasi masyarakat berkaitan dengan *opinion leader* sebagaimana Muhadjir (2000) menyatakan bahwa “untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat, peran *opinion leader* sangat penting. *Opinion leader* inilah yang mampu menjamin kehidupan demokratis, karena para *opinion leader* memang tumbuh dalam konteks yang demokratis”. Pemberian wawasan tentang perubahan sosial, pembekalan pengetahuan, dan peningkatan kemampuan organisasi kepada para *opinion leader* akan menghasilkan suara

mayoritas yang bervariasi kedepan. Artinya, *opinion leader* diharapkan dapat menjadi basis kekuatan pemberdayaan masyarakat dari *grass root*, pemberdayaan masyarakat yang *community based*.

Arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan menunjukkan bahwa partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi hubungan antara pemerintah dan masyarakat, maupun sinergi dalam *community network* (jaringan komunitas) dalam proses pembangunan pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan; partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pendidikan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan satuan pendidikan sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan menikmati hasil dari peningkatan mutu pendidikan.

Terbentuknya kesempatan bagi masyarakat dalam proses pendidikan memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahkan tidak hanya masyarakat sekitar, karena target dan standar yang harus dicapai adalah skup regional dan daerah, maka pemerintah daerah akan secara langsung terlibat dalam menyukseskan pendidikan di wilayah masing-masing. Dengan adanya kesempatan yang

diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan maka keberhasilan sekolah dalam pembangunan pendidikan melalui peningkatan mutu pendidikan akan bisa dicapai secara maksimal.

## **B. Dimensi partisipasi masyarakat**

Dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan adanya partisipasi semua *stakeholders* pendidikan, termasuk masyarakat dan orang tua murid. Dalam berpartisipasi, masyarakat harus melakukannya sesuai dengan tanggung jawab dan kepentingannya. Hal ini diketahui sejauh mana anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut ikut berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. *Participation is the degree to which member of social system are involved in the decision-making process;* (Rogers dan Shoemaker, 1995).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan penting bukan karena bagaimana hasilnya secara material, melainkan bagaimana prosesnya, artinya bagaimana masyarakat dalam keseluruhan proses yang menggambarkan pengakuan terhadap kapasitas masyarakat yang bersangkutan. Menurut Soetomo (2010) Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kesadaran, artinya adalah dalam usaha pembangunan pendidikan di daerah pedesaan bahwa masyarakat semata-mata tidak

diperlakukan sebagai objek saja, tetapi lebih sebagai dari itu yaitu aktor atau pelaku pendidikan itu sendiri.

Pada dasarnya Soetomo menempatkan masyarakat sebagai subjek dibandingkan sebagai objek partisipasi dalam pembangunan pendidikan, masyarakat harus menjiwai dan mewarnai tahapan-tahapan proses pembangunan pendidikan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan dimulai dengan pelibatan masyarakat dalam identifikasi masalah, perumusan program, evaluasi program dan terakhir dapat menikmati hasil program pembangunan pendidikan yang dirancang.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan program menjadikan masyarakat sebagai produsen bukan hanya seledar sebagai konsumen semata, karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan atau perumusan program. Hal itu akan mengakibatkan masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut, sehingga akan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk terus berpartisipasi pada program-program berikutnya, dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program akan terbentuk karena kesadaran dan determinasinya, bukan karena mobilisasi oleh pihak eksternal, (Soetomo, 2010).

Masyarakat juga perlu menikmati hasil dari partisipasi yang telah dilaksanakan, karena melalui bentuk partisipasi ini hasil pembangunan pendidikan melalui

peningkatan mutu dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat secara proporsional. Apabila partisipasi masyarakat dalam memikul beban perbaikan persekolahan dimaknai sebagai kewajiban dan tanggung jawab, maka hasil pembangunan pendidikan dan peningkatan mutu dapat dilihat sebagai hak warga masyarakat.

Partisipasi masyarakat menurut Dwiningrum (2011) bahwa partisipasi yang dikembangkan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu “partisipasi fisik dan partisipasi non fisik, partisipasi profesional dan parsial”. Partisipasi profesional menurut Dwiningrum yaitu partisipasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan suatu program pembangunan pendidikan, sedangkan partisipasi parsial yaitu partisipasi yang dilakukan dalam suatu fase atau beberapa fase proses pembangunan pendidikan.

Sedangkan Subakir dan Sapari (2001) menjelaskan tingkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan mulai dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi sebagai berikut:

- 1) Sekedar menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, misalnya masyarakat (orang tua) hanya sekedar menyekolahkan anaknya;
- 2) Masyarakat ikut berperan memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga;
- 3) Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti membina secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain;

- 4) Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu, misalnya kepala sekolah dan komite sekolah berkonsultasi tentang program kerja sekolah;
- 5) Keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu, biasanya sebagai mitra pihak lain;
- 6) Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasikan, misalnya pihak sekolah meminta bantuan komite sekolah dan masyarakat memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan.

Peran serta masyarakat yang sesungguhnya adalah dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang pendidikan, misalnya komite sekolah ikut serta dalam membicarakan dan mengambil keputusan tentang rencana pembagian beasiswa. Subakir dan Sapari lebih lanjut menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program berupa: 1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan. 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. 3) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil. 4) Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa apa saja yang relevan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik berupa fisik maupun nonfisik sebagaimana dijelaskan oleh Dwiningrum di atas. Peraturan pemerintah (PP) nomor 39 tahun 1992, bab III pasal 4, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional menjelaskan bentuk dan sifat peran serta masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan dan pada semua jenjang pendidikan;
- 2) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pengajaran atau pembimbingan;
- 3) Pengadaan atau pemberian tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- 4) Pengadaan program pendidikan yang belum diadakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
- 5) Pengadaan dana atau pemberian bantuan dapat berupa wakaf hibbah, sumbangan, beasiswa;
- 6) Pengadaan bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan KBM;
- 7) Pengadaan dan pemberian buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan KBM;
- 8) Pemberian kesempatan untuk magang
- 9) Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggara satuan pendidikan untuk melaksanakan KBM;
- 10) Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- 11) Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;

- 12) Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fantini dan beberapa peneliti lain yang dikutip oleh Fullan (1982) mencatat bentuk-bentuk utama keterlibatan orang tua:

....we can list the main forms of parent involvement. 1) a. Instruction : at school (e.g., parent aides. b. Instruction : at home (e.g., parent as tutors). 2) Governence (e.g., parent advisory councils). 3) Home-school relations (e.g., project to increase community support). 4) Community service (e.g., adult education, use of facilities.....

Dari uraian di atas, Fullan membagi bentuk partisipasi masyarakat dan orang tua menjadi empat bagian yaitu: *instruksi orang tua* di sekolah artinya adalah orang tua memberikan bantuan ke sekolah dalam bentuk saran, kemudian di rumah orang tua sebagai tutor bagi anak-anaknya. *Pemerintah*; pada pemerintah terdapat dewan penasehat sekolah yang berperan sebagai perwakilan pemerintah untuk mengontrol praksis pendidikan. Berikutnya adalah *hubungan sekolah-rumah*; misalnya proyek untuk pembangunan pendidikan melalui partisipasi masyarakat, pengelola satuan pendidikan harus memperhatikan program atau kegiatan yang banyak melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar, agar mereka merasa diperhatikan sehingga proses pendidikan bisa berjalan maksimal. Yang terakhir adalah *pelayanan kepada masyarakat*; memberikan layanan pendidikan kepada orang

dewasa yang belum mengenyam pendidikan, misalnya dengan program keangsaan fungsional (KF), memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih merasa diperhatikan sehingga makin erat hubungan antara sekolah-rumah.

Telaah pengertian dan berbagai pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan *intrinsik* maupun alasan *ekstrinsik* dalam seluruh proses kegiatan pembangunan pendidikan di pedesaan yang mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan) serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

Dwiningrum (2011) mengemukakan beberapa dimensi penting dalam partisipasi masyarakat. Dimensi pertama adalah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Apakah penduduk setempat, pemimpin masyarakat, pegawai pemerintah, atau pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam proses pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Dimensi kedua adalah bagaimana partisipasi itu berlangsung. Dimensi ini menurut Dwiningrum (2011) penting untuk diperhatikan terutama untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan inisiatif, dorongan dan

ruang lingkup partisipasi. Lebih rinci Dwiningrum membagi dimensi partisipasi menjadi enam, yaitu:

- (1) apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat setempat,
- (2) apakah dorongan partisipasi itu dorongan sukarela atau paksaan,
- (3) saluran partisipasi itu apakah berlangsung secara individu atau kolektif, formal atau informal, dan apakah partisipasi itu terlibat langsung atau menggunakan perwakilan,
- (4) durasi partisipasi,
- (5) ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara atau berlanjut dan meluas, dan
- (6) memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan yang mengarah pada hasil yang diharapkan”.

Pemahaman terhadap kelangsungan dimensi partisipasi di atas terwujud dari suatu dinamika dan akibat dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Jika partisipasi masyarakat diterapkan dengan tepat dan efektif maka kesimpulannya adalah mengenai “siapa” yang berpartisipasi dan dalam aktivitas “apa” yang dipertimbangkan dalam partisipasi tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan akan tercapai.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan berupa a) partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pendidikan, b) partisipasi orang tua dalam proses pelaksanaan pendidikan anak disekolah maupun dirumah, c) partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, d) dan partisipasi masyarakat dalam komite sekolah. Menurut Dwiningrum (2011) partisipasi masyarakat sebagai prasyarat penting bagi peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektivitas antara sekolah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Artinya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan berhasil jika ada pemahaman yang sama antara masyarakat dengan sekolah.

Desentralisasi pendidikan memerlukan partisipasi masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Dwiningrum (2011) menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah 1) kesiapan sumber daya manusia secara profesional, 2) *stakeholders* mendukung program sekolah, 3) menghadiri pertemuan sekolah untuk mengetahui perkembangan siswa, 4) membantu siswa untuk belajar dirumah, dan 5) mencari sumber-sumber lain/pendukung untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Partisipasi masyarakat yang digambarkan di atas tentunya memiliki permasalahan yaitu belum semua masyarakat menyadari bahwa keterlibatan secara aktif dalam pembangunan pendidikan sangat bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.

### C. Tingkat Partisipasi

Uraian di atas menjabarkan kegiatan-kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah bisa terlepas dari peran masyarakat di sekitarnya. Sebab ada hubungan timbal balik, saling mendukung, dan saling menguntungkan antara pendidikan dengan masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses pembangunan pendidikan. Partisipasi masyarakat sudah menjadi bagian terpenting dalam upaya perbaikan pendidikan terutama di pedesaan. Partisipasi masyarakat memiliki tingkatan-tingkatan dalam proses pembangunan pendidikan, Arstein (1969) menulis dalam sebuah Jurnal yang berjudul “*A Leader of Citizen Participation*”. Arstein membagi tingkat partisipasi pendidikan menjadi delapan tingkatan tangga yaitu *Manipulation, Terphy, Informating, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control*. Tingkat partisipasi masyarakat tersebut menggambarkan hirarki yang kiranya terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan. tingkat partisipasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Manipulation* (Manipulasi)

Pada tingkat ini masyarakat dilibatkan secara semu atau hanya sebagai stempel dan hanya sekedar sebagai pendukung semu saja dalam proses pelaksanaan pendidikan. Tujuannya adalah masyarakat hanya dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya.

Sesungguhnya tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah disalah gunakan atau diselewengkan dan dipakai sebagai alat pencapaian tujuan tertentu.

2. *Teraphy* (Terapi)

Pada tingkat ini pemegang kebijakan dalam hal ini adalah pemegang kebijakan pendidikan bisa disamakan sebagai ahli jiwa atau psikiater. Mereka menganggap ketidak-berdayaan masyarakat sebagai penyakit mental. Dengan berpura-pura mengikut sertakan masyarakat dalam suatu proses kegiatan pendidikan, mereka sebenarnya menganggap masyarakat sebagai sekelompok orang yang memerlukan pengobatan.

Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengembangan pendidikan, namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya (penyakitnya) dan bukannya menemukan penyebab luka tersebut. Kaitanya dengan proses partisipasi masyarakat, pada tingkat ini masyarakat hanya dilibatkan sekedar untuk mengobati dan mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam proses pendidikan.

3. *Informating* (Menginformasikan)

Dengan memberi informasi kepada masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab dan pilihan mereka adalah langkah awal yang sangat penting

dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. akan tetapi sering kali pemberian informasi dari pemegang kebijakan kepada masyarakat hanya bersifat satu arah, artinya adalah masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik dan tidak memiliki power untuk melakukan negosiasi. Sehingga pada tingkatan ini masyarakat hanya pasif dan hanya menunggu informasi tentang perkembangan pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan itu sendiri.

4. *Consultation* (Konsultasi)

Pada tingkat ini adalah meminta pendapat dari masyarakat secara langsung. Hal ini adalah suatu langkah yang logis menuju partisipasi yang penuh. Akan tetapi partisipasi ini merupakan partisipasi semu karena tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan bisa diperhatikan atau dilaksanakan dalam implementasi. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini adalah jajak pendapat, pertemuan warga dan dengar pendapat antara warga masyarakat. Pada dasarnya masyarakat dianggap sebagai abstraksi statistik, karena partisipasi hanya diukur dari frekuensi kehadiran dalam pertemuan. Dengan demikian pemegang kebijakan telah merasa memiliki bukti bahwa mereka telah mengikuti rangkaian partisipasi masyarakat.

5. *Placation*

Pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak dijamin akan diperhatikan. Masyarakat memang diperbolehkan untuk memberikan masukan atau mengusulkan beberapa rencana tetapi tetap pemegang kekuasaan lah yang berwenang untuk menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan.

6. *Partnership* (kerjasama)

Pada tingkat ini, kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pelaksana satuan pendidikan dalam hal ini pihak sekolah atau bahkan pemerintah pemegang kebijakan pendidikan dan masyarakat. Antara masyarakat dan pelaksana pendidikan sama-sama sepakat untuk memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan atau proses perbaikan pendidikan. Aturan ditentukan melalui mekanisme *take and give*, sehingga segala hal yang terkait dengan proses pendidikan tidak mengalami perubahan sepihak tidak diputuskan sepihak oleh pengelola pendidikan itu sendiri.

*Partnership* dapat berjalan efektif apabila dalam masyarakat ada kekuatan yang terorganisir, memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang memahami maksud dan tujuan suatu organisasi dilaksanakan. Dengan demikian masyarakat benar-benar memiliki posisi tawar yang

tinggi, sehingga akan mampu mempengaruhi suatu proses yang akan dilaksanakan. Kaitanya dengan proses pembangunan pendidikan, peran masyarakat dianggap sangat penting dan sangat sentral, pengelola pendidikan sebagai pemegang kebijakan selalu berkomunikasi dan berdiskusi dalam rangka pengembangan program-program pendidikan kedepan. Sehingga masyarakat lebih aktif berpartisipasi demi tercapainya pendidikan yang bermutu di daerah mereka.

7. *Delegated Power* (Pelimpahan wewenang)

Negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan kepada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak berperan dan bahkan memiliki kekuasaan dalam menentukan atau memutuskan suatu program-program pendidikan. Selain itu masyarakat juga memegang peran penting dalam menjamin akuntabilitas program tersebut.

Masyarakat memiliki kekuatan untuk merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi proses pembangunan pendidikan di daerah mereka. Dominasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di suatu desa/daerah tertentu biasanya terjadi pada sekolah-sekolah swasta yang bernaung di bawah kontrol tokoh masyarakat atau ketua-ketua pondok pesantren. Masyarakat diberikan

kewenangan untuk ikut berpartisipasi dalam banyak program pengembangan pendidikan.

8. *Citizen Control* (kontrol yang dilakukan oleh warga masyarakat)

Pada tingkat ini masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur program kegiatan atau kelembagaan yang diberikan kepada mereka, masyarakat sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kegiatan, kebijakan, dan aspek-aspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada *stakeholders* yang bisa membantu proses pelaksanaan program-program pendidikan. Dengan demikian masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui perantara. Artinya, masyarakat memiliki wewenang penuh untuk mengelola atau membangun dan mengembangkan pendidikan di daerah mereka. Masyarakat dapat memberikan warna dan arah tertentu sesuai dengan keinginan masyarakat dalam satu wilayah tertentu.

Tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Arstein di atas berbeda dengan tingkat atau tahapan yang dikemukakan oleh Wilcox dalam Mardikarto dan Poerwoko (2012). Wilcox mengemukakan adanya lima tahapan atau tingkat partisipasi, yaitu:

- 1) *Information* (Memberikan informasi ); masyarakat hanya memberikan informasi terkait dengan

pendidikan di sekitar mereka. Mereka tiak terlibat secara langsung. Dan seolah tidak memiliki peran dalam proses pembangunan pendidikan.

- 2) *Consultation* (Konsultasi), yang dimaksud dengan konsultasi oleh Wilcox adalah menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;
- 3) *Deciding together* (pengambilan keputusan bersama), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan;
- 4) *Acting together* (bertindak bersama), artinya adalah, tidak hanya sekedar terlibat dalam pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- 5) *Supporting independent community interest* (memberikan dukungan) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain, untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Praktik partisipasi yang melibatkan langsung warga masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan sehingga akan terjalin sinergi antara warga, pemerintahan, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kepercayaan sebagai modal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dari berbagai tingkatan partisipasi yang dijelaskan di atas

menggambarkan keterlibatan langsung dari warga masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan dengan meningkat kualitas pendidikan tersebut. Partisipasi dapat berperan pendidikan dalam pengambilan keputusan, kontrol serta koordinasi dalam mempertahankan hak-hak sosialnya dalam proses peningkatan mutu pendidikan demi tercapainya pembangunan pendidikan yang baik.

#### **D. Urgensi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran pendidikan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berarti pula pemberdayaan masyarakat itu sendiri di dalam menentukan arah dan isi pendidikan. Mengutip pendapat Diana Coyner dalam Suparjan dan Suyatni (2003) bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat bersifat sangat penting.

*Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program-program akan gagal. Alasan *kedua* bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program jika masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan mengetahui secara mendasar bagaimana program yang akan dilaksanakan. Alasan *ketiga* partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu

hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pendidikan.....

Pendidikan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Karena penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan, agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat, Rasyidi dan Sudarwan (2004). Jika sebuah pendidikan berkualitas maka manfaatnya terhadap masyarakat sangat baik, sebaliknya jika pendidikan tidak berkualitas maka akibatnya juga berimbas ke masyarakat. Maka disinilah dibutuhkan peran aktif dari masyarakat setempat agar ikut terus berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengembangan pendidikan di daerah mereka masing-masing sehingga menjadi sekolah yang berkualitas dan manfaatnya bisa dirasakan bersama.

Menurut *Keith Davis* dalam Suryosubroto (2002) manfaat yang prinsip partisipasi yaitu:

- a. lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar
- b. dapat digunakan kemampuan berfikir kreatif dari para anggota
- c. dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia motivasi serta membangun kepentingan bersama
- d. lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab
- e. lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan-perubahan

Partisipasi akan memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan tujuan sebuah organisasi atau kelompok

masyarakat diantara yaitu: 1) Memungkinkan diperolehnya keputusan yang lebih akurat dan memadai karena banyak sumbangan ide-ide dan pemikiran dari masyarakat. 2) Akan memungkinkan adanya pengembangan potensi dan dan kreativitas masyarakat. 3) Melatih untuk lebih bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun kepentingan bersama. Dengan demikian bahwa partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar terutama di pedesaan.

Pelibatan memungkinkan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelanjutan program-program yang sudah dirancang. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreativitas masyarakat dapat lebih tergali. Dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam proses pembangunan pendidikan di pedesaan maka segala bentuk perencanaan baik dalam bidang kurikulum maupun bidang-bidang lain yang terkait dengan proses pembangunan pendidikan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pendidikan, masyarakat hendaknya dilibatkan dalam beberapa hal sebagaimana dijelaskan oleh Suparjan dan Suyatni (2003), masyarakat hendaknya dilibatkan dalam beberapa hal yaitu: (1) identifikasi permasalahan; masyarakat bersama dengan penyelenggara pendidikan dalam hal ini pihak sekolah dan pemerintah desa hendaknya bersama-sama dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan, (2) proses

perencanaan, di mana masyarakat dilibatkan dalam menyusun rencana dan strategi dengan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pendidikan tersebut, pelibatan masyarakat dalam perencanaan sangat dibutuhkan, karena jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pendidikan maka masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap rencana program pendidikan yang sudah dirancang secara bersama-sama dengan pengelola dan pengembang pendidikan, (3) pelaksanaan pendidikan, di mana masyarakat ikut memantau dan berperanserta dalam proses pendidikan tersebut. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program-program pendidikan yang sudah dirancang bersama. Masyarakat ikut ambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan secara proporsional dan sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat berdasarkan kebutuhan pengelolaan pendidikan, kaitanya dengan penelitian ini adalah pendidikan di sekolah dasar, (4) evaluasi, masyarakat terlibat langsung dalam mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Artinya; masyarakat berpartisipasi melakukan evaluasi proses program-program pendidikan yang sedang dan sudah dilaksanakan oleh pengelola pendidikan, (5) memonitoring; masyarakat secara langsung memonitoring atau mengawasi dan mengontrol secara langsung pelaksanaan program-program pendidikan yang sudah dirancang bersama pengelola pendidikan.

Satu hal yang penting dalam konsep partisipasi adalah partisipasi tidak sekedar dilihat dari aspek fisik saja. Selama ini ada kesan bahwa seseorang dikatakan berpartisipasi ketika sudah terlibat secara fisik, seperti ikut kerja bhakti, ikut menghadiri penyuluhan dan lain-lain. Padahal esensi yang terkandung dalam partisipasi sebenarnya tidak seperti itu. Inisiatif ataupun sumbang saran dari masyarakat sebenarnya dapat dikatakan sebagai suatu wujud dari partisipasi. Hal inilah yang kemudian juga mengakibatkan konsep partisipasi sekedar dimaknai sebagai keterlibatan dalam memberikan partisipasi secara materi. Muhadjir (2011) mengatakan “pemberdayaan harus berangkat dari motivasi diri sendiri untuk mampu mengatasi sendiri *problame* yang dihadapi”. Begitu pula kaitanya dengan pembangunan pendidikan di daerah pedesaan. Partisipasi masyarakat harus berdasarkan motivasi dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, tidak ada unsur paksaan atau rasa terpaksa untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. masyarakat harus menyelesaikan masalah pendidikanya sendiri atas dasar kondisi dan kebutuhan pengembangan pendidikan di desa/daerahnya sendiri.

#### **E. Syarat Timbulnya Partisipasi Masyarakat**

Pada hakekatnya upaya mewujudkan partisipasi masyarakat adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pendidikan yang bertujuan

untuk pembangunan pendidikan sehingga akan tercipta pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui hasil pendidikan yang bermutu akan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan pendidikan, namun dalam praktiknya, tidak terlalu diupayakan secara sungguh-sungguh, terutama pada masyarakat pedesaan.

Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi dapat didekati dengan berbagai konsep keilmuan. Menurut konsep pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan, dalam hal ini fungsi dari manfaat (*reward*) yang dapat diharapkan Berlo dalam Mardikarto dan Poerwoko (2012). Disamping itu, dengan melihat kesempatan, yang bersangkutan juga akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan untuk dapat berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan. Mardikarto merinci beberapa upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam konsep pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan yang dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kearifan tradisional.
2. Penyampaian informasi tentang adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, yang dibarengi

dengan dorongan dan harapan-harapan agar masyarakat mau berpartisipasi, serta upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi.

3. Berkaitan dengan dorongan dan harapan yang disampaikan, perlu adanya penjelasan kepada masyarakat tentang manfaat dari hasil partisipasi.

Terkait dengan rincian di atas sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat ketika menyerahkan anak-anaknya kesekolah adalah agar anak-anak belajar meningkatkan *skill* yang mereka miliki melalui proses pembelajaran di sekolah (*Robert and Joanne, 2000*). Artinya apa yang dilakukan oleh sekolah akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga perlu dorongan partisipasi dan perlu penyampain informasi kepada masyarakat manfaat dan pentingnya partisipasi bagi pembangunan pendidikan di wilayah mereka. Untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat tersebut diharapkan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan terus ditingkatkan.

Dwiningrum (2011) menjelaskan bahwa seseorang akan berpartisipasi terhadap sesuatu dimana dalam hal ini dikondisikan sebagai suatu perwujudan perilaku seseorang terhadap suatu obyek kegiatan. Dwiningrum mengutip pokok pemikiran Blumer bahwa “manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna”. Dalam kaitanya terhadap suatu stimulus untuk memperoleh pemaknaan terhadap suatu obyek tindakan, selain

menggunakan paradigma fakta sosial dalam menjelaskan perilaku dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, tindakan yang dilakukan masyarakat dalam memperhatikan atau kepedulian pada kelanjutan pendidikan anak mereka.

Dalam tindakan sosial yang dikemukakan oleh Dwiningrum selalu didasarkan pada empat proporsi, yaitu (a) proporsi keberhasilan: makin positif respons yang diterima maka makin sering tindakan tersebut dilakukan; (b) proporsi stimulus: jika ada kesamaan stimulus yang menguntungkan, maka semakin besar pengulangan tindakan; (c) proporsi nilai: semakin bermakna hasil yang diterima, maka makin sering tindakan tersebut diulangi; (d) proporsi berjenah kerugian: semakin sering menerima respons yang istimewa, maka respons tersebut makin berkurang nilainya.

Dalam penjelasan teori partisipasi Ife dan Frank (2008) mengemukakan bahwa program pengembangan masyarakat harus mendorong pengakuan dan peningkatan hak maupun kewajiban untuk berpartisipasi. Mendorong partisipasi merupakan bagian terpenting dari proses peningkatan mutu pendidikan. Kondisi yang mendorong partisipasi menurut Ife dan Frank (2008) adalah sebagai berikut:

- 1) orang akan berpartisipasi apabila isu atau aktivitas tersebut penting. Cara ini dapat secara efektif dicapai jika masyarakat sendiri telah mampu menentukan isu atau aksi, dan telah mendominasi kepentingannya,

bukan berasal dari orang luar yang memberikan mereka apa yang harus dilakukan.

- 2) harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan. Jika orang tidak percaya bahwa aksi masyarakat akan membuat perubahan terhadap prospek peluang ikut andil dalam pembangunan pendidikan, akan kecil kemungkinan untuk mereka berpartisipasi aktif. Perlu dibuktikan bahwa masyarakat dapat memperoleh sesuatu yang akan membuat perbedaan dan akan menghasilkan perubahan pada apa yang telah mereka lakukan.
- 3) semua bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai.
- 4) isu-isu seperti keamanan waktu, lokasi partisipasi harus diperhatikan juga.

Dalam pengembangan partisipasi masyarakat di pedesaan, konsep partisipasi diartikan sebagai jaringan hubungan segi tiga antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. jaringan ini merupakan manifestasi egaliter bagi ketiga jaringan program pembangunan pendidikan melalui *trust* (kepercayaan), sehingga dapat dilakukan sinergi efektif terhadap program peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di pedesaan. Pemahaman yang benar mengenai konsep partisipasi dari warga masyarakat maupun para birokrat pemerintah di dalam melibatkan masyarakat pada akhirnya akan menjadi *point* penting dalam setiap tahapan proses pengembangan dan pembangunan pendidikan. Pemahaman masyarakat bahwa partisipasi adalah kunci keberhasilan sebuah

program pendidikan. Menurut Suparjan dan Suyatni (2003), “dalam melibatkan masyarakat partisipasi perlu juga menjadi prinsip pertukaran dasar (*basic exchange principles*) sebagai acuan. Untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan maka pengelolaan pendidikan harus ada manfaatnya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Upaya melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya harus dimulai dari bawah misalnya melalui forum warga, baik yang bersifat administratif seperti forum RT, RW, maupun forum-forum warga yang berbasis pada kelembagaan dan komunitas, kelompok tani, kelompok pengajian, kelompok *tahlilan*, kelompok peternak, kelompok pedagang dan sebagainya. Masyarakat diajak untuk membicarakan berbagai persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di desa, mereka akan lebih merasa dihargai jika dimanfaatkan tenaga dan fikiranya. Jadi Partisipasi masyarakat desa dilakukan dengan lebih mengefektifkan kelompok masyarakat agar lebih memudahkan komunikasi antara pemerintah sebagai pengelola pendidikan dengan masyarakat. Warga masyarakat diajak berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.

#### **F. Masalah - Masalah Partisipasi Masyarakat**

Pelaksanaan Pendidikan yang seharusnya mendapat perhatian penuh dari masyarakat dan pemerintah masih

belum terpenuhi. Secara umum peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia rata-rata masih kurang. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat masih banyak mengalami kendala, banyak hal yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam hal pendidikan. Sumarno dkk. (2001) menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan yaitu:

- a. sistem perencanaan, pengangguran dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut pemerintah yang masih menganut sistem perencanaan (*top down*) yang mematikan kreativitas di lapangan dan membuka peluang untuk memanipulasi.
- b. kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan dan kekuatan energi masyarakat untuk menganbil peran dalam melaksanakan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat memaksakan kehendak dan pengorbanan hasil program.
- c. sikap birokrat, birokrat belum mampu membiasakan diri bertindak sebagai pelayan, masyarakat cenderung berperilaku sebagai penentu yang selalu ingin jadi ingin dihormati dan berkuasa karena merasa memiliki dana. Hal ini akan menyebabkan sikap apatis dari masyarakat dan menurunkan sikap masyarakat untuk berpartisipasi.

- d. kebutuhan belajar; karakteristik kebutuhan masyarakat untuk belajar sangat beraneka ragam, sedangkan sistem perencanaan yang dianut masih turun dari atas dan bersifat standar.
- e. sikap masyarakat; pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-hal yang bersifat kebutuhan badaniah, sedang yang berkaitan dengan pendidikan yang memerlukan waktu dan pengorbanan sikap masyarakat masih perlu digubah.
- f. Keenam, budaya menunggu; sebagian besar masyarakat masih memiliki budaya yang statis, merasa puas dengan apa yang ada, bersifat menunggu, menerima, kurang proaktif untuk mengambil prakarsa dan melakukan tindakan yang bermanfaat untuk masa depan.
- g. Ketujuh, tokoh panutan; tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya berperan sebagai penuntun sering berperilaku sebagai birokrat. Hal ini menyebabkan warga enggan untuk berperan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program.
- h. Kedelapan, lembaga sosial masyarakat; jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan masih sangat kurang. Hal ini mengakibatkan kelambanan dalam menggerakkan masyarakat terhadap pendidikan berbasis masyarakat berkurang.

- i. Kesembilan, anggaran; keterbatasan anggaran dukungan dan prosedur yang berbelit-belit dan keterbatasan sarana dan prasana belajar serta tenaga kependidikan dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan berbasis masyarakat berkurang.
- j. Kesepuluh, egoisme sektoral; masih ada keraguan dari para petugas instansi yang berbeda tentang kepemilikan PKBM sebagai wadah pendidikan berbasis masyarakat, masih menonjolkan kekarakteristikanya masing-masing dan ada keinginan untuk saling berinteraksi. Hal ini mengakibatkan keengganan instansi untuk melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat.

Masalah-masalah partisipasi masyarakat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari lingkup yang lebih makro. Yang berasal dari masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat desa dalam tingkat perkembangan sosial ekonomi tertentu. Masalah pada umumnya muncul berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan pandangan atau cakrawala berfikir masyarakat seperti tingkat fatalisme, paternalisme dan sebagainya. Permasalahan lain yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi serta kemampuan memahami makna dan manfaat partisipasi dalam skala makro. Menurut Soetomo (2012), pada dasarnya masyarakat tahu betul apa yang menjadi kebutuhannya.

Hanya saja karena berbagai keterbatasan, dalam hal-hal tertentu masih perlu membedakan antara kebutuhan yang dinyatakan, kebutuhan yang dirasakan, dan kebutuhan nyata. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih membutuhkan campur tangan pemerintah yang perannya adalah membuat masyarakat menjadi lebih kompeten terhadap permasalahannya sendiri sehingga merasa ingin terlibat di dalam keseluruhan proses pembangunan pendidikan.

Permasalahan yang berkaitan dengan lingkup yang lebih makro adalah sekitar benturan kepentingan lokal (masyarakat desa) dengan kepentingan yang lebih luas, termasuk kepentingan nasional dan global. Sehubungan dengan hal ini Soetomo menjelaskan bahwa suatu masalah yang sangat urgen dipandang dari skala lokal, tetapi menjadi dianggap kurang berarti dalam skala nasional. Oleh karena itu kebijakan pendidikan nasional tidak dapat diimplementasikan dalam skala lokal (desa) karena permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat tidak mampu mendukung program dan kebijakan pemerintah. Permasalahan lain biasanya muncul dari pertimbangan efektifitas dan idialisme akan keseragaman yang diharapkan oleh pemerintah mencerminkan integritas nasional. Sehingga kebijakan seperti itu dapat menghasilkan bentuk-bentuk program pendidikan yang kurang memperhatikan modala sosial, mudal budaya, sosial-ekonomi dan kualitas sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat. sehingga kebijakan-kebijakan tersebut kurang memperhatikan perbedaan lokal dan lebih

mementingkan keseragaman, walaupun belum tentu relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal (desa) yang memang cukup bervariasi.

Proses peningkatan partisipasi masyarakat mengalami banyak permasalahan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Kaitanya dengan masalah partisipasi masyarakat Soetrisno (1995) mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan partisipasi yaitu: *belum difahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi*, pemerintah masih bersifat otoriter sehingga menimbulkan budaya diam, adanya peraturan yang bersifat birokratis. Dari penjelasan Soetrisno dapat dijabarkan sebagai beberapa masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Masalah pertama berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat adalah “belum difahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi” oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan pendidikan diantaranya adalah:
  - (a) Pada tingkat perencanaan, partisipasi diartikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pendidikan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh penyelenggara satuan pendidikan dan pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif.
  - (b) Pada tatanan implementasi, pendidikan yang yang dirancang oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan pendidikan yang dirancang oleh masyarakat

didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas yang lebih rendah.

- (c) Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai kerjasama pengelola pendidikan dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem, sehingga aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pendidikan.
- 2) Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pendidikan sebagai sebuah ideologi baru yang harus di amankan dan dijaga dengan ketat, sehingga mendorong pemerintah bersifat otoriter. Kondisi seperti itu dapat mendorong reaksi balik berupa “budaya diam” yang pada gilirannya menumbuhkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi.
- 3) Masalah ketiga adalah, banyaknya peraturan yang nantinya akan meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi

Berdasarkan beberapa permasalahan yang menghambat partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di atas, maka upaya menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi dapat diupayakan dengan berusaha memperkecil atau menghindari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan partisipasi tersebut.



## BAB VI

# MODAL SOSIAL DAN MODAL BUDAYA

Pendidikan merupakan bagian dari proses pembudayaan artinya apabila manusia itu dilepas dari kebudayaan maka tujuan pendidikan dapat dimanipulasi ke arah yang kurang jelas dan dapat direkayasa oleh kekuatan-kekuatan politik penguasa. Proses pendidikan diarahkan pada pelestarian atau pemeliharaan nilai-nilai kebudayaan (*culture*), dan fungsi lembaga pendidikan adalah mentransfer warisan budaya dan warisan sejarah pada setiap generasi baru. Dalam proses transfer warisan budaya dan warisan sejarah sangat dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, karena semua lapisan masyarakat ikut ambil bagian dalam aksi pendidikan yang merupakan modal sosial dan modal budaya.

Modal sosial dan modal budaya dalam kajian ini tidak dipisahkan satu sama lain, atau sebagai kesatuan (*unity*). Asumsi yang mendasari pertimbangan ini adalah, pertama, bahwa modal sosial merupakan fenomena empirik dalam sistem sosial yang kehadirannya dapat melahirkan modal-modal lain untuk terjaganya keseimbangan sistem sosial. Driyarkara (1980) menerangkan bahwa budaya selamanya sosio-budaya. Artinya adalah manusia itu harus memanusiasiakan dirinya

dan ini berarti membudaya, maka dengan sendirinya berarti membudaya bersama, karena cara kita berada ini tidak bisa lain dari cara kita bersama. Dari penjelasan ini dapat kita artikan bahwa kebudayaan tidak mungkin terjadi secara individu, kebudayaan akan terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan karena budaya sangat erat kaitannya dengan sosial.

Barker (2000) menyatakan bahwa telah terjadi sebuah kategori hubungan-hubungan dan relasi-relasi substantif, dari seluruh ranah pendidikan dan kebudayaan dipandang mengandung aneka bentuk dan relasi manusia. Relasi dimaksud oleh Barker mulai dari interaksi mikro-interpersonal, proses-proses dan nilai-nilai norma kelompok sampai dengan bentuk-bentuk komunikasi, teks-teks dan gambar-gambar; kemudian menjangkau bentuk - bentuk dan hambatan-hambatan institusional, representasi sosial dan imajiner sosial; dan bahkan meluas sampai determinasi ekonomi, politik dan ideologi.

Dari urutan kehadirannya, modal sosial muncul lebih dulu dalam sistem sosial dibanding modal budaya. Dalam bahasa yang agak berbeda, namun dapat membantu pemahaman tentang keberadaan modal sosial dan modal budaya Karena itu, dalam kajian teori ini, pembahasan akan diawali dengan pembahasan modal sosial, berikutnya bagaimana modal-modal sosial membangun pola perilaku sebagai modal budaya.

## A. Modal Sosial

Modal sosial merupakan istilah ilmu sosial yang terkait dengan kemiskinan, organisasi sosial, dan partisipasi masyarakat. Istilah ini mengacu pada modal di luar kekayaan dan uang yang bermanfaat dalam mengembangkan modal-modal lain. Modal sosial merupakan kemauan baik, rasa bersahabat, saling empati, serta hubungan sosial dan kerja sama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Jhon Field (2011) mendefinisikan modal sosial merupakan "hubungan antar sesama manusia". Untuk bisa menjalin hubungan antara sesama manusia seperti yang diungkapkan oleh Jhon Field adalah dengan membangun hubungan dengan seluruh kelompok dalam lapisan masyarakat, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu. Orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendiri atau yang dapat mereka capai dengan susah payah. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal.

Perkembangan konsep modal sosial menurut Bourdieu merupakan merupakan suatu upaya untuk membentuk agen sosial dalam habitus sebagai individu-

individu yang mengkonstruksi dunia disekeliling mereka. Lebih lanjut Boudieu (1990) menjelaskan bahwa:

Masyarakat sebagai semacam sistem ranah-ranah, sehingga anda harus berfikir berdasarkan sebuah sistem dan relasi-relasi. Sistem ranah yang terdapat (dalam ruang sosial) ini hampir dapat dibayangkan, sederhananya, sebagai sebuah sistem planet, karena ruang sosial merupakan suatu ranah integral. Setiap anah memiliki struktur dan kekuatan-kekuatan sendiri, serta ditempatkan dalam suatu ranah yang lebih besar yang juga memiliki kekuatan strukturnya sendiri, dan seterusnya.

Coleman (1994) mengidentifikasi tiga unsur pokok modal sosial. Pertama, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa percaya dalam lingkungan sosial. Kedua, arus informasi yang lancar dalam struktur sosial akan mendorong berkembangnya kegiatan masyarakat. Arus informasi yang tidak lancar menjadikan orang tidak tahu dan ragu, bahkan tidak berani melakukan sesuatu. Ketiga, norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Tanpa norma yang disepakati dan dipatuhi bersama akan muncul kondisi anomie, di mana setiap orang cenderung berbuat menurut kemauan sendiri tanpa merasa terikat oleh orang lain.

Putnam (1993), menjelaskan beberapa ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama. Dengan semuanya, masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dengan cara

memfasilitasi tindakan-tindakan yang dilakukan secara terkoordinasi. Putnam memberi tiga alasan atas pandangannya tentang pentingnya modal sosial, yaitu sebagai berikut:

- (1) jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang menumbuhkan saling percaya sesama anggota masyarakat.
- (2) kepercayaan (*trust*) berimplikasi positif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan melalui bagaimana orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial akan memperkuat norma dengan keharusan saling membantu.
- (3) keberhasilan yang dicapai oleh jaringan sosial dalam waktu sebelumnya akan mendorong keberhasilan pada waktu-waktu berikutnya.

Modal sosial dapat menjadi jembatan bagi jurang yang memisahkan kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Coleman dan Putnam dalam Portes (1998) juga mengemukakan bahwa modal sosial bukan hanya sekumpulan instusi yang menyangga masyarakat melalui "*social trust*" dan "*social norm*", namun sebagai perekat yang menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Melalui aneka ikatan horizontal, modal sosial berperan dan dibutuhkan untuk memberi masyarakat suatu *sense*

identitas dan tujuan bersama dalam mencapai tujuan yaitu pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu sesuai dengan kebutuhan bersama. Modal sosial merangkai berbagai aset sosial, psikologis, kultural, kognitif, dan institusional yang dapat meningkatkan perilaku kooperatif yang saling menguntungkan. Bahkan tidak saja menjadi perekat, sebagaimana Portes, modal sosial dengan *social trust* dan *social norm* dalam jaringan sosial dapat dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalah (*common problem*) pendidikan secara bersama.

Modal sosial yang menunjukkan bahwa *trust* dan norma sangat esensi agar masyarakat mendapatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan yang bersangkutan. Fukuyama (1999) menyoroti pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Fukuyama mengatakan bahwa kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antar sesama warga. Melalui bukunya yang lain, Fukuyama (1995) mengungkapkan:

*“Social capital can be defined simply as a set of informal values or norm shared among members of group that permits cooperation among them. If a members of the group came to expect that others will be have reliably and honestly. Trust is like lubrican that makes the running of any group or organization more efficient”* (1999).

Fukuyama (1999) berpendapat bahwa modal sosial akan semakin kuat dalam masyarakat yang berlaku norma saling bantu membantu dan kerja sama yang kompak

dalam satu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Kepercayaan berkaitan dengan budaya, terutama etika dan moral. Akhirnya, Fukuyama berkesimpulan, “tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan”.

Rasa saling percaya (*trust*) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan dan senantiasa akan bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Kepercayaan pada tingkat individual muncul dari adanya nilai yang bersumber dari kepercayaan yang dianut, kompetensi seseorang dan keterbukaan yang telah menjadi norma di masyarakat, Nahapiet dan Ghoshal (1998). Pada tingkat komunitas, kepercayaan dari norma sosial yang memang melekat pada struktur sosial itu, Coleman (1994). Pada tingkat institusi, kepercayaan bersumber dari karakteristik sistem tersebut yang memberi nilai tinggi pada rasa tanggung jawab sosial setiap anggota kelompok.

Perbincangan mutakhir tentang modal sosial, seringkali bahkan dominan dihubungkan dengan masyarakat perkotaan. Sebagaimana dikatakan Nahapiet dan Ghoshal (dalam *Academy of Management Review*, 23/2, 1998), bahwa dalam konteks, modal sosial banyak menyoal masyarakat modern di perkotaan, dan relatif tidak sebanding dengan perbincangan pada masyarakat

tradisional yang cenderung miskin, terbelakang, terpinggirkan, dan umumnya di pedesaan. Modal sosial dalam konteks ini justru menjadi modal pokok ketika mereka tidak memiliki human capital dan physical capital.

Jhon (2011) Modal sosial yang dapat mempengaruhi pendidikan masih banyak diperdebatkan oleh para ahli sosiologi, salah satunya adalah hasil penelitian yang dikemukakan oleh Coleman bahwa modal sosial tampak terkait erat dengan prestasi pendidikan. Penelitian Bourdieu dan Coleman mempengaruhi sosiologi pendidikan, dan dari dampak modal sosial. Temuan-temuan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa modal sosial dapat menjadi penyeimbang kemalangan ekonomi dan sosial. Sampai saat ini banyak penelitian melihat pada dampak modal sosial pada pendidikan anak-anak minoritas. Modal sosial baik adanya karena dia diasosiasikan dengan tingkat prestasi yang lebih tinggi dan hal ini tampaknya berlaku bagi anak-anak yang kurang beruntung. Dalam konteks ini bukti pendidikan dan modal sosial juga tampak menunjukkan kompleksitas hubungan yang mungkin saja penting. Terkait dengan hal itu penelitian ini akan melihat dampak modal sosial dan modal budaya serta modal spiritual untuk mengkaji pendidikan sekolah dasar dan madrasah ibtida'iyah dipedesaan.

Definisi-definisi modal sosial yang bersifat managerial, yang cenderung dimanfaatkan untuk konteks perkotaan yang dikemukakan oleh Cohen dan Prusak (2001) yaitu:

“modal sosial sebagai stok dari hubungan yang aktif antar masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efektif dan efisien”.

Eva (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Dari beberapa definisi modal sosial dari berbagai ahli, dapat diidentifikasi beberapa unsur modal sosial, yakni (1) partisipasi, (2) hubungan timbal balik (*reciprocity*), (3) rasa saling percaya (*trust*), (4) Norma sosial (*social norm*), dan nilai-nilai (*values*).

Di era otonomi ini proses pembangunan pendidikan tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai agen perubahan yang dapat menggerakkan masyarakat mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks pembangunan pendidikan, modal sosial merupakan modal yang sangat abstrak dan hanya dapat dilihat dalam bentuk aksi dan reaksi antar masyarakat. Ife dan Tesoriero (2008) mengatakan:

*“pembangunan di masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan dan membantu masyarakat*

*untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada pemahaman dan aksi sosial”.*

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa modal sosial dalam pengembangan pendidikan merupakan modal yang dapat digunakan sebagai kekuatan penggerak dalam partisipasi masyarakat. modal sosial memberikan dukungan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam proses pembangunan pendidikan. Selanjutnya Hasbullah (2006) menjelaskan secara rinci unsur-unsur pokok modal sosial yaitu:

- 1) Partisipasi dalam suatu jaringan  
Kemampuan orang atau individu atau anggota-anggota komunitas untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk membangun modal sosial. Manusia mempunyai kebebasan untuk bersikap, berperilaku dan menentukan dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. Pada saat seseorang meleburkan diri dalam jaringan sosial dan menyinergiskan kekuatannya maka secara langsung maupun tidak, ia telah menambahkan kekuatan ke dalam jaringan tersebut. Sebaliknya, dengan menjadi bagian aktif dalam suatu jaringan, seseorang akan memperoleh kekuatan tambahan dari jaringan tersebut.
- 2) Hubungan Timbal Balik (*Reciprocity*)  
Modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling bertukar kebaikan di antara individu-individu

yang menjadi bagian atau anggota jaringan. Hubungan timbal balik ini juga dapat diasumsikan sebagai saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Modal sosial tidak hanya didapati pada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah maju atau mapan. Dalam kelompok-kelompok yang menyandang masalah sosial sekalipun, modal sosial merupakan salah satu modal yang membuat mereka menjadi kuat dan dapat melangsungkan hidupnya.

3) Rasa Percaya (*Trust*)

Hasbullah (2006) mengatakan bahwa “rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung”. Rasa percaya menjadi pilar kekuatan dalam modal sosial. Seseorang akan mau melakukan apa saja untuk orang lain kalau ia yakin bahwa orang tersebut akan membawanya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang ia inginkan.

Rasa percaya dapat membuat orang bertindak sebagaimana yang diarahkan oleh orang lain karena ia meyakini bahwa tindakan yang disarankan orang lain tersebut merupakan salah satu bentuk pembuktian kepercayaan yang diberikan kepadanya. Rasa percaya tidak muncul tiba-tiba. Keyakinan pada diri seseorang atau sekelompok orang muncul dari

kondisi terus menerus yang berlangsung secara alamiah ataupun buatan (dikondisikan). Rasa percaya bisa diwariskan tetapi harus dipelihara dan dikembangkan karena rasa percaya bukan merupakan suatu hal yang absolut.

4) Norma Sosial

Norma-norma sosial merupakan seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang disepakati oleh anggota-anggota suatu komunitas untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam komunitas tersebut. Norma sosial berlaku kolektif. Norma sosial dalam suatu komunitas bisa saja sama dengan norma sosial di komunitas lain tetapi tidak semua bentuk perwujudan atau tindakan norma sosial bisa digeneralisir.

Norma sosial mempunyai konsekuensi. Ketidaktaatan terhadap norma atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku menyebabkan seseorang dikenai sanksi. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma dapat berupa tindakan (hukuman) dan bisa berupa sanksi sosial yang lebih sering ditunjukkan dalam bentuk sikap, seperti penolakan atau tidak melibatkan seseorang yang melanggar norma, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas.

5) Nilai-nilai

Menurut Hasbullah (2006), "nilai adalah suatu ide yang dianggap benar dan penting oleh anggota

komunitas dan diwariskan secara turun temurun". Nilai-nilai tersebut antara lain mengenai etos kerja (kerja keras), harmoni (keselarasan), kompetisi dan prestasi. Selain sebagai ide, nilai-nilai juga menjadi motor penggerak bagi anggota-anggota komunitas. Nilai-nilai kesetiakawanan adalah ide yang menggerakkan anggota komunitas untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Pada banyak komunitas, nilai prestasi merupakan tenaga pendorong yang menguatkan anggotanya untuk bekerja lebih keras guna mencapai hasil yang membanggakan.

6) Tindakan yang proaktif

Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk terlibat dan melakukan tindakan bagi kelompoknya adalah salah satu unsur yang penting dalam modal sosial. Tindakan yang proaktif tidak terbatas pada partisipasi dalam artian kehadiran dan menjadi bagian kelompok tetapi lebih berupa kontribusi nyata dalam berbagai bentuk. Tindakan proaktif dalam konteks modal sosial dilakukan oleh anggota tidak semata-mata untuk menambah kekayaan secara materi melainkan untuk memperkaya hubungan kekerabatan, meningkatkan intensitas kekerabatan serta mewujudkan tujuan dan harapan bersama. Keterikatan yang kuat dan saling mempengaruhi antar anggota dalam suatu komunitas menjadi penggerak sekaligus memberi peluang kepada setiap anggota untuk bertindak

proaktif. Tindakan proaktif juga dapat diartikan sebagai upaya saling membagi energi di antara anggota komunitas.

Modal sosial tidak hanya dibangun oleh satu individu, tetapi pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Menurut Eva Cox (1995) Masyarakat akan selalu berhubungan dengan masyarakat lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan atas prinsip sukarela (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Jaringan hubungan sosial biasanya diwarnai oleh tipologi yang khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok, yang secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman sosial yang turun temurun (*repeated social experiences*), dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*).

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma sebagaimana halnya nilai senantiasa memiliki implikasi yang ambivalen. Adakalanya norma menciptakan kekhidmatan dalam relasi dalam masyarakat. Namun adakalanya norma melahirkan kekakuan, karena terkesan formal dalam masyarakat tertentu. Karena itu, efek negatif dari sifat ambivalen norma ini perlu diwaspadai dan dihindari sehingga tidak mengganggu keberadaan norma sebagai salah satu modal sosial yang penting.

Ada keinginan dari kelompok masyarakat untuk tidak saja ikut berpartisipasi, tetapi mencari alternatif bagi keterlibatan dalam suatu masyarakat. Ide proaktif semacam ini memiliki kandungan modal sosial yang cukup penting dalam hubungan sosial. Inisiatif untuk menjaga ruang publik dari sampah, suara bising dan ribut, menjaga keamanan bersama, peduli terhadap kelompok lemah, mengunjungi teman dan keluarga (silaturahmi), mencari informasi, memperkaya ide, baik secara individu dan kelompok, merupakan suatu modal sosial yang sangat berharga untuk terciptanya masyarakat ideal yang diharapkan.

Berdasarkan bentuk-bentuk modal sosial di atas, tergambar pula sumber-sumber modal sosial dalam masyarakat. Secara garis besar, ada dua sumber modal sosial, yakni (1) modal sosial yang bersumber dari individu (modal sosial individual), dan (2) modal sosial yang bersumber dari kelompok (modal sosial kelompok). Modal sosial individual memang bersumber dari seseorang (tokoh, pemimpin, atau orang yang dituakan dalam kelompok masyarakat). Dikatakan individual, karena dalam kurun tertentu modal sosial itu menjadi khazanah individualnya. Yang dimanfaatkan sebagai modal sosial adalah manfaat positif dari khazanah itu untuk kepentingan bersama dalam kelompok masyarakat. Sebagai contoh: khazanah intelektual seseorang dapat menjadikannya dihormati dan dikagumi. Kekaguman itu

menjadikan masyarakat dalam kelompok itu tergerak untuk belajar berbagai ilmu dari individu bersangkutan.

Modal sosial kelompok, bisa saja muncul dari individu lalu dikembangkan menjadi milik bersama, atau muncul sebagai kesadaran bersama berdasarkan nilai yang diyakini bersama. Sebagai contoh: kebiasaan memberi sumbangan pada suatu kegiatan sosial, bisa saja merupakan kebiasaan individu. Tetapi karena dianggap memiliki manfaat sosial, individu lain tergerak untuk melakukan hal yang sama, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan seluruh masyarakat dalam kelompok sosial itu. Bahkan, pola itu dikembangkan sebagai suatu keharusan yang mengikat bagi semua anggota kelompok dalam masyarakat itu.

## **B. Modal Budaya**

Definisi Budaya Menurut Kuntowijoyo (2006) budaya merupakan bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial, organisasi kenegaraan, dan seluruh perilaku sosial. Sedangkan sejarah dan ekologi sebuah masyarakat mempunyai peranan besar dalam pembentukan budaya. Suatu sistem budaya tidak akan pernah berhenti, budaya selalu mengalami perubahan dan perkembangan, baik karena dorongan-dorongan dari dalam maupun dari luar. Interaksi komponen budaya dapat melahirkan bentuk-

bentuk simbol baru. Demikian juga bentuk interaksi budaya dengan pengaruh-pengaruh luar sering dapat mengubah sistem budaya, baik komponennya maupun keseluruhannya.

Sergiovani (1994) mendefinisikan hubungan budaya sebagai tujuan bersama, nilai-nilai, tradisi, dan sejarah yang mempromosikan keharmonisan dan memberikan rasa kemasyarakatan. Ketika mereka ada bukti, akan menjadi terhubung dengan alasan komitmen daripada kepatuhan. Sebaliknya, hubungan yang rasional, termasuk peran harapan, aturan, dan fungsi yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia. Alih-alih komitmen, kepatuhan dipromosikan sebagai cara untuk menghubungkan orang-orang untuk pekerjaan mereka.

Hubungan rasional dan budaya merupakan motivasi bersaing yang menarik. Di satu sisi keinginan dan kebutuhan masyarakat mensosialisasikan kepada mereka nilai individualisme. Hubungan rasional tersebut merujuk pada dua bahasa, bahasa pertama individualisme dan bahasa kedua masyarakat. Setiap bahasa merupakan pola pemikiran dan perilaku kita digunakan untuk menemukan rasa dan makna dalam hidup bermasyarakat. Bahasa pertama individualisme mengkomunikasikan keinginannya untuk menjadi mandiri, memang individu terpisah dan otonom yang mendambakan kebebasan untuk menentukan diri sendiri dan nasib sendiri untuk mengejar takdir dengan cara sendiri, dan tidak melanggar hak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bahasa kedua

masyarakat menanggapi kemampuan bawaan kita untuk dihubungkan satu sama lain dan untuk saling bekerja sama dalam mengejar kebutuhan yang muncul dari konsepsi yang merupakan sifat umum manusia secara alami.

Kuntowijoyo (2006) menjelaskan bahwa reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala perubahan budaya berpengaruh dalam berbagai bidang. Sebagai reaksi terhadap budaya massa, kita melihat privatisme dalam kesenian garda terdepan, dan spritualisme dalam cita-cita tentang kesempurnaan. Tulisan Kuntowijoyo ini menelusuri bentuk-bentuk *inkoherensi* antara masyarakat dan budaya, atau *stucture and culture*, baik dalam bentuk anomi maupun kontradiksi budaya yang sangat dipengaruhi oleh peranan intelektual, kerangka sosial, kerangka sosial estetika, kerangka sosial kesalehan, dan kerangka sosial spiritualitas. Disparitas budaya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Jarak antara desa dan kota, antar kelas sosial, dan antar daerah merupakan masalah bagi penyebaran kebudayaan secara nasional. Makna kebudayaan dari masing-masing daerah itu sangat berbeda, dan proliferasi kebudayaan mengalami hambatan karena kesenjangan-kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

Kebudayaan menekankan pada pendidikan, demokrasi, dan revolusi jangka panjang melalui institusi-institusi yang ada. Williams dalam Barker (2000) memaparkan tentang kebudayaan sebagai berikut:

Kebudayaan terdiri dari dua aspek: makna dan tujuan yang telah diketahui, dimana anggotanya terlatih untuk itu; pengamatan dan makna baru yang ditawarkan dan diuji. Semua itu merupakan biasa masyarakat manusia dan fikiran manusia, dan melalui mereka kita melihat sifat kebudayaan: dia selalu bersifat tradisional dan kreatif; keduanya makna paling umum dan makna individual yang paling halus. Kita memakai kata kebudayaan berdasarkan logika makna umum; sebagai seni dan pembelajaran, yakni kebudayaan sebagai proses penemuan dan usaha kreatif yang khusus. Beberapa penulis memakai kata ini atau yang lain; saya meyakini keduanya dan arti penting kombinasinya. Pertanyaan yang saya ajukan tentang kebudayaan kita adalah pertanyaan tentang tujuan umum dan tujuan biasa kita, namun juga tujuan tentang makna mendalam dan personal. Kebudayaan itu adalah hal-hal yang biasa yang ditemukan dalam keseharian disemua masyarakat dan setiap pikiran. (Williams, 1984)

Konsep kebudayaan yang dikemukakan Williams di atas adalah konsep-konsep antropologis karena berpusat pada makna kegiatan sehari-hari yaitu nilai (gagasan abstrak), norma (prinsip atau aturan terbatas) dan benda-benda material (simbolis). Makna dibangun bukan secara kolektif, sehingga gagasan kebudayaan mengacu pada makna yang dimiliki bersama. Akan tetapi Pemahaman atas kebudayaan sebagai “keseluruhan hidup” mengandung konsekuensi pragmatis.

Dewantara (1994) memaparkan bahwa kebudayaan itu sifatnya bermacam-macam, akan tetapi karena semua adalah buah adab, maka semua kebudayaan atau kultur itu selalu bersifat: tertib, indah, luhur, memberi rasa damai, senang, bahagia, dan sebagainya. Sifat-sifat itu terdapat dan terlihat di dalam perikehidupan manusia-manusia yang sudah beradab; misalnya di dalam perusahaan tanah, pemerintah negeri, adat istiadatnya, cara membuat rumah dan pakaian, caranya kawin, mendidik anak-anak, dalam segala kepandaian dan perbuatan (kerajinan) dalam kesenian (musik, tari, drama, ukir-ukiran, menggambar, membuat patung, dan sebagainya), dalam bahasa dan kesusastraanya, dan dalam cara membuat makanan. Maka dari itulah maka jelaslah sifat kultur itu selalu menjadi tanda dan ukuran tentang tinggi rendahnya keadaban dari masing-masing bangsa.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kebudayaan (budaya) di atas, terdapat beberapa unsur yang sama, antara lain: nilai, keyakinan, norma, disampaikan/dipelajari, perilaku, miliki bersama, dan masyarakat. Sesuatu akan bernilai bila diberi nilai oleh orang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Jika nilai menjadi dasar tindakan kolektif dalam masyarakat, nilai itulah sebagai salah satu modal sosial. Keyakinan biasanya berkaitan dengan harapan-harapan. Jika keyakinan dengan berbagai harapan menjadi milik kolektif, maka keyakinan itulah sebagai salah satu modal sosial. Nilai-nilai yang

diyakini agar memiliki nilai produktif, biasanya dijadikan norma. Norma akan mengatur keseluruhan kolektif dalam kelompok masyarakat. Jika itu terjadi, itulah salah satu modal sosial. Nilai yang diyakini, yang menjelma menjadi norma-norma kolektif tidak akan pernah dipahami tanpa pewarisan (dipelajari). Terjadi proses dalam mengembangkannya menjadi milik kolektif. Melalui proses belajar, keseluruhannya akan membentuk pola perilaku kolektif dalam konteks yang disebut masyarakat. Akhirnya, jika keseluruhan itu terjadi dalam proses integrasi sosial antara struktur-struktur dalam sistem sosial (agen-struktur), itulah sesungguhnya merupakan modal budaya bagi masyarakat dalam sistem sosial tertentu.

Jika masyarakat dalam sistem sosial, maka terbangunnya budaya yang berbentuk pola perilaku, nilai, keyakinan, norma-norma, dan mungkin institusi-institusi pendukung dalam sistem sosial kemasyarakatan tidak lepas dari kehadiran berbagai modal sosial dan modal budaya dalam sistem sosial. Modal sosial dan modal budaya dimaksud berkaitan dengan bagaimana keduanya dengan berbagai bentuk dan variabelnya dilahirkan, dikelola, dimanfaatkan, dipelihara, dan dimaknai sebagai kekayaan yang dapat diproduksi untuk melahirkan sumber daya lain yang bermanfaat bagi eksistensi dan dinamika sistem sosial.



**A. Peran Orang Tua Dalam Praksis Pendidikan**

Dalam proses kehidupan sehari-hari, sebelum menjalani pendidikan sekolah dasar yang merupakan awal dari mulainya sebuah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian manusia adalah orang tua. Orang tua merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan sebelum berhubungan dunia luar (sekolah). Sejak anak itu berada dalam kandungan anak telah mendapatkan pendidikan ibunya. Selain mempersiapkan anak untuk memasuki dunia pendidikan yang lebih luas, orang tua juga ikut berperan dalam pembangunan pendidikan dan aktif dalam peningkatan mutu sekolah.

Dalam proses pembangunan pendidikan, tidak semua masyarakat aktif berpartisipasi karena memiliki karakter serta pemahaman yang berbeda tentang partisipasi dan pendidikan. Dwiningrum (2011: 66) menjelaskan beberapa karakteristik orang tua, misalnya pengusaha, petani, nelayan, pedagang, pegawai dan lain-lain akan mewarnai kondisi dan kualitas pendidikan. Perbedaan karakteristik orang tua membuat harapannya terhadap sekolah terutama lulusannya akan berbeda pula. Oleh karena itu sekolah harus menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik. Karena orang

tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan kemajuan sekolah.

Peran orang tua dalam aktivitas pendidikan di sekolah sangat sentral dalam pembangunan pendidikan baik terlibat secara langsung ataupun tidak. Dalam mendidik anaknya orang tua juga harus aktif terlibat mendidik anaknya di rumah, karena waktu anak di sekolah lebih banyak di rumah dibandingkan di sekolah. Oleh karena itu, Dwiningrum merinci peran orang tua dalam membentuk lingkungan yang kondusif di rumah antara lain:

- a. Menciptakan budaya belajar di rumah
- b. Memprioritaskan tugas yang terkait secara langsung dengan pembelajaran di sekolah.
- c. Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler.
- d. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar.
- e. Menciptakan situasi yang demokratis di rumah agar tukar pendapat dan pikiran sebagai sarana belajar dan membelajarkan
- f. Memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah, dalam mengembangkan potensi anaknya.

- g. Menyediakan sarana belajar yang memadai, sesuai dengan kemampuan orang tua dalam kebutuhan sekolah.

Pembangunan pendidikan juga tidak dapat terlepas dari upaya yang melibatkan lingkungan yang terdiri dari pendidik, orang tua, pemerintah, masyarakat dan para pengusaha (*stakeholders*) untuk bekerjasama dalam menyiapkan peserta didik untuk mencapai kebutuhan mereka di masa yang akan datang Goldberg dan Cole dalam (Nurkholis, 2014). Hal ini karena lembaga pendidikan merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat hubungan yang erat antara sekolah dengan orang tua yang diwakili oleh komite sekolah. Peningkatan mutu pendidikan dalam pembangunan pendidikan bukan semata-mata kebutuhan sekolah tetapi kebutuhan bagi semua pihak.

Dalam beberapa kajian dijelaskan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan memberikan dampak yang positif dalam peningkatan mutu pendidikan. Menurut Govinda dan Diwan (2003), partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya orang tua, merupakan proses keterlibatan masyarakat aktif baik secara individu maupun kolektif, langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan.

Peran orang tua dalam pembangunan pendidikan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sebagai *aset* dan *defisit*, sebagaimana analisis yang dilakukan oleh Seymour (1995).

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa, orang tua dalam dimensi "assets" meliputi:

- a. *Parent have Knowledge of their child not available to any one else, (i.e., knowledge about learning style, interest, motivation, problems, and talents)*
- b. *Parent have, to indulge understatement, a serious interest in formal education experience of their child.*
- c. *Parent are teacher (i.e., educator), and it is inevitable that they come to conclusion about that is good or bad teaching. If those conclusion drive from the family context (a type of class room), those conclusion are generalized to the school class room.*
- d. *In their role citizens, parents are accountable for what school are in the sense that they (and other) provide the monies making school possible.*
- e. *By virtue of special interest, hobbies, vocation, and community role, any group of parents has members who possess knowledge and skill that can be used in the education of student and can be a source of stimulation to teachers.*

Peran orang tua-masyarakat sebagai "deficits" baik secara individu dan kelompok dalam hal participation. Seperti yang di jabarkan oleh Seymour (1995) sebagai berikut:

- a. *Parent have little basis for understanding the culture of a school and school system: the axioms and assumptions undergirding behavioral and programmatic regularities; the nature and rationale for decision making in regard to scores of problems and responsibilities; how*

*organizational-educational goals and practices are experienced and interpreted by adults in the culture, varying as they do with status, power, and experience; and how within that culture, and between it and the "outside," are attitudes or stances the origins and substance of which are rooted in a present and past.*

- b. Parents' knowledge of and attitudes toward schooling in general and school personnel in particular derive primarily from their experiences as students.*
- c. When parents and others call for involvement of some degree or kind in the decision making process, their emphasis is on issues of power – they want "in" – and not on substantive educational issues.*

Pendidikan dalam keluarga tidak cukup untuk menyiapkan anak untuk menghadapi masa depannya, oleh karena itu orangtua menyerahkan pendidikan anaknya pada lembaga pendidikan formal yang disebut dengan sekolah. Tetapi tidak cukup dengan hanya menyerahkan saja, dibutuhkan partisipasi orang tua dalam kelanjutan proses pendidikan anak-anaknya. Walaupun sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa partisipasi orang tua dalam proses pendidikan anak merupakan masalah yang relatif kompleks. Menurut Dwiningrum (2011) interaksi yang terjalin antara orang tua dan sekolah meliputi dua kategori, yaitu: (1) *parental involvement* yang mengarah pada keterlibatan orang tua pada semua jenis aktivitas yang ditujukan untuk mendukung program-program sekolah; (2) *parental participation* adalah orang tua

berupaya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada hal-hal yang sangat penting di sekolah. Sedangkan tingkat keterlibatan orang tua dalam peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh orang tua saja, tetapi juga ditentukan oleh sistem pendidikan yang berlaku.

## **B. Partisipasi Orang Tua dalam Komite Sekolah**

Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan, salah satu upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah orangtua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based participation*). Inti dari penerapan konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stakeholder* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui komite sekolah.

### **1. Pengertian Komite Sekolah**

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama komite sekolah. Dalam hal ini komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan, baik pada pendidikan sekolah dasar maupun sekolah menengah. Menurut Khaerudin dkk. (2007) "komite madrasah (sekolah) merupakan suatu badan atau lembaga *non-profit* dan non-politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah dengan masyarakat (*stakeholder*) pendidikan, sebagai representatif dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan".

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah memiliki kemandirian masing-

masing tetapi tetap sebagai mitra yang saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Karena Menurut Jalal dkk. (2001) MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah.

Komite sekolah adalah representasi orang tua di sekolah merupakan wadah yang di harapkan bisa menyatukan seluruh komponen sekolah demi tercapainya tujuan pembangunan pendidikan sesuai dengan konsep MBS yang di jelaskan oleh Jalal di atas. Oleh karena itu pemimpin komite sekolah dipilih oleh mereka yang benar-benar memiliki kemampuan kepemimpinan dan kemampuan managerial untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

## **2. Tujuan Komite Sekolah**

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar terdapat suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi pada penggunaan (*client*) berbagi kewenangan (*power*

*sharing and advocacy*) dan kemitraan (*partnership*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan dalam pembangunan pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah menurut Khaerudin dkk. (2007) sebagai berikut:

- (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan,
- (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan,
- (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pengalaman dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

### **3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah**

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Propennas 200/2004, DEPDIKNAS (2007: 19), dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan dan peran serta masyarakat dibentuk dewan pendidikan dan komite sekolah pada tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan

semangat desentralisasi pendidikan pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah. Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (KEPMENDIKNAS) nomor 044/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Menurut KEPMENDIKNAS tersebut terdapat empat peran yang harus diemban oleh dewan pendidikan dan komite sekolah adalah sebagai (1) *advisory agency*, (2) *supporting agency*, (3) *controlling agency*, dan (4) *mediator agency*. Selanjutnya Khaerudin dkk. (2007) menjelaskan secara rinci peran yang dapat dijalankan oleh komite sekolah adalah sebagai berikut:

- (1) *Advisory agency*; komite sekolah berperan memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pada satuan pendidikan,
- (2) *Supporting agency*; komite sekolah berperan sebagai pendukung baik dalam bentuk finansial, pemikiran maupun tenaga dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan,
- (3) *Controlling agency*; Komite sekolah berperan sebagai sebagai pengontrol agar penyelenggaraan pendidikan lebih transparan,
- (4) *Executif*; Komite sekolah berperan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat dalam satuan pendidikan.

Pendapat di atas didukung oleh Alif dan Soenarto (2008) peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut: (1) Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, (2) Komite sekolah sebagai pendukung, (3) Komite sekolah sebagai pengontrol, (4) Komite sekolah sebagai mediator. Lebih lanjut Alif dan Soenarto (2008) menjelaskan pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan juga relatif sama antara komite tertelitti. Dukungan nampak sangar menonjol dalam penyusunan dan menetapkan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS) terutama dalam penggalangan dana dari orang tua siswa. Nampak adanya kecendrungan bahwa komite dibentuk dan difasilitasi oleh kepala sekolah sehingga wajar bila peran paling menonjol adalah sebagai badan pendukung pengelola sekolah.

Untuk menjalankan peranya menurut Alif dan Sunarto (2008) komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah kaitannya dengan penyelenggaraan yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:  
(a) Kebijakan dan program pendidikan; (b) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS);  
(c) Kriteria kerja satuan pendidikan; (d) Kriteria tenaga kependidikan; (e) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan,
- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan pada satuan pendidikan.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma *community based school* megandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Dengan demikian, prinsip kemandirian dalam *community based school* merupakan kemandirian bernuansa kebersamaan.

Suryadi dan Budimansyah (2004) merinci peran komite sekolah dalam pendidikan adalah:

- 1) *Menyusun rencana dan program*; sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai pelaksana kebijakan pendidikan nasional, sekolah bertugas untuk menjabarkan kebijakan tersebut menjadi program-program operasional penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Dalam penyusunan penjabaran program pendidikan komite sekolah dapat membantu sekolah untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai kebutuhan serta potensi sumber daya yang tersedia pada masyarakat untuk diterjemahkan ke dalam program pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh sekolah.
- 2) *Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)*; sekolah berperan menyusun RAPBS untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyusunan RAPBS tersebut harus diketahui oleh warga sekolah (kepala sekolah, gur, pegawai, dan siswa). Penyusunan RAPBS juga harus diketahui oleh komite sekolah, masyarakat, orang tua dan *stakeholders* sebagai pertanggung jawaban pemakaian keuangan sekolah. Komite sekolah perlu mengontrol RAPBS dan harus disahkan dan ditandatangani bersama dengan sekolah.

- 3) *Pelaksanaan program pendidikan*; desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Maka dalam kondisi ini dewan pendidikan dan komite sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang proses pelaksanaan pendidikan. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai *partner* kerja kepala sekolah dalam mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam rangka pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas dalam proses pelaksanaan pendidikan.
- 4) *Akuntabilitas pendidikan*; dalam era otonomi pendidikan dan partisipasi, akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi harus lebih banyak pada masyarakat sebagai *satakeholders* pendidikan. Komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat dan orang tua meminta pertanggung jawaban hasil-hasil dari penyelenggaraan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah sebagai pelaksana pendidikan. Komite sekolah memberikan penilaian kepada sekolah dan menyampaikannya kepada masyarakat dan orang tua sebagai kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Sesuai dengan peran dan fungsinya komite sekolah melakukan akuntabilitas sebagai berikut: (a) Komite

sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah, (b) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.



## **BAB VIII**

# **TUAN GURU SEBAGAI TOKOH MASYARAKAT**

### **A. Istilah Tuan Guru**

Tuan Guru merupakan istilah lokal yang digunakan oleh masyarakat Lombok, dan belum begitu populer di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Tuan Guru bagi masyarakat Lombok dipergunakan bagi mereka yang pandai agama dan fasih membaca al-Qur'an, pandai membaca kitab kuning, mempunyai pengetahuan luas tentang ilmu-ilmu keislaman, seperti *fiqh*, *tauhid*, *tafsir*, *hadits*, *tasawuf*, *tarikh*, *nahwu-sarf*, dan ilmu-ilmu *falak*, *mantiq*, *hikmah*, serta menjadi panutan masyarakat setempat. Istilah Tuan Guru sama halnya dengan sebutan *kyai* di daerah lain seperti Jawa, kemudian Bugis menggunakan istilah *anregurutta*, sedangkan istilah *kyai* sudah dipakai secara umum di seluruh Indonesia (Yafie, 1997).

Tuan Guru diartikan berbeda dengan tokoh masyarakat lainnya, seperti tokoh adat, politik atau pemerintahan, maupun tokoh-tokoh lain, karena Tuan Guru memiliki karakteristik tersendiri dan tanggung jawab yang berbeda. Tuan Guru memiliki fungsi dan tanggung jawab yang kompleks terhadap masyarakat, terkait dengan

hal tersebut, Tuan Guru lebih dikenal sebagai tokoh atau pemuka agama, karena setiap perilakunya dilandaskan pada ajaran agama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, kemudian membantu masyarakat untuk mengatasi setiap persoalan hidupnya Badrun dan Ngongu (1994). Dengan demikian, eksistensi dan peran Tuan Guru dalam masyarakat disesuaikan dengan perubahan sosial, budaya, dan diakui oleh masyarakat.

Istilah Tuan Guru dijelaskan oleh Horikoshi (1987), dalam tulisanya Hirokisi mengemukakan tentang Tuan Guru atau kyai sebagai berikut:

Kyai merupakan pemimpin kharismatik dalam bidang agama. Ia fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran-pikiran pengikut-pengikutnya. Sifatnya khas seorang kyai adalah terus terang, berani, dan "blak-blakan" dalam bersikap dan bahkan sebagai seorang ahli ia jauh lebih unggul ... dalam menerapkan prinsip-prinsip *ijtihad* (mengenali ajaran-ajaran Islam secara logika).

Penjelasan Horikoshi di atas menerangkan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian dalam bidang keagamaan, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam konteks inilah kyai disebut sebagai orang *alim* atau *ulama*. Beberapa pandangan tentang Tuan Guru atau kyai di atas, intinya adalah orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dalam bidang agama, dan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, disebabkan adanya perbedaan pendekatan yang

dipergunakan, maka dengan demikian makna Tuan Guru berkaitan erat dengan orang yang memiliki pengetahuan tinggi dalam bidang agama, dan kemudian mampu menafsirkan bahasa agama tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam mengatur perilaku hidup, baik bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun bagi masyarakat.

## **B. Status Tuan Guru**

Status Tuan Guru diperoleh karena keahlian pada bidang agama, memiliki integritas moral, kemampuan untuk mengajar, dan berkhotbah (Horikoshi, 1987). Sedangkan Maraghiy dalam (Rofangi (1992) menafsirkan al-Qur'an surat An-Nisa: 58, yaitu:

Ulama selalu memberikan petunjuk kepada orang awam berupa pegangan-pegangan bathin (*iktikad*) dan amal perbuatan yang bermanfaat bagi orang awam itu, baik di dunia maupun di akhirat. Petunjuk ulama itu dapat berupa pendidikan yang baik, usaha yang halal, pengajaran, dan fatwa-fatwa yang menguatkan iman, serta menyelamatkan dari kejahatan, dan dosa-dosa, serta mendorong mereka untuk mencintai kebaikan, dan perbuatan yang baik.

Beberapa penjelasan tersebut menunjukkan pada status Tuan Guru yang memiliki keahlian dalam bidang agama, kemudian keahlian tersebut ditransformasikan kepada orang lain dan memperoleh prioritas pada masyarakat, sehingga keilmuan dimiliki secara tidak langsung mengantarkan Tuan Guru menempati suatu

strata dalam masyarakat Islam Indonesia. Interaksi Tuan Guru dengan masyarakat; baik secara individu maupun kelompok dan kelembagaan, Tuan Guru di percaya memiliki *barakah*, sehingga mempunyai kekuatan supranatural, magis, atau lainnya. *Barakah* yang dimiliki Tuan Guru sebab mereka adalah pewaris Nabi. Konsep dasar *barakah* ini sebagai anugrah yang dihubungkan dengan kemakmuran materi (kesejahteraan), sehat jasmani, gagah, kecukupan, keberuntungan, dan kekuatan magis. *Barakah* dibuktikan dengan adanya “kehadiran individu, karakter yang kuat, moral yang hidupan. Karena *barakah* dapat dipindahkan dari pemiliknya ke orang lain, popularitas, dan otoritas seorang Tuan Guru atau kyai secara parsial diambil dari kelebihan-kelebihannya sebagai sumber *barakah*.

Dengan demikian, kemampuan khusus yang dimiliki Tuan Guru sebagai sumber *barakah* dalam masyarakat akan dapat menentukan statusnya dalam masyarakat, maupun kehidupan bersama, karena status Tuan Guru merupakan bentuk dari penentuan dari perannya dalam masyarakat, baik hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya, maka status Tuan Guru dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian keagamaan dimilikinya menempati suatu strata yang lebih tinggi dibandingkan strata lainnya pada masyarakat.

### C. Peran Tuan Guru dalam Masyarakat

Sebagaimana diketahui, Tuan Guru bila dikaitkan dengan fungsinya merupakan penghormatan yang diberikan oleh umat, dimana penghormatan tersebut merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Terkait dengan dengan fungsinya, Horikoshi (1987) menjelaskan fungsi Tuan Guru dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Tuan Guru sebagai Pengajar di Masyarakat

Fungsi menonjol Tuan Guru dalam masyarakat, yaitu sebagai pengajar dan pendidik diwujudkan melalui lembaga pendidikan yang dinamakan pondok pesantren. Tuan Guru melalui pondok pesantren umumnya mengembangkan keilmuannya dengan mengajarkan kitab kuning (*al-kutub al-shafra*) atau juga dikenal dengan kitab klasik (*al-kutub al-qadimah*) atau lebih populer disebut dengan kitab gundul. Tuan Guru dalam kehidupan masyarakat pondok pesantren harus dihormati, seperti termaktub dalam kitab "*Ta'lim al muta'allim fi thariq al ta'allum*", bahwa ilmu adalah sesuatu yang kamu ambil dari *lisan rijal* (pengajar atau guru), karena mereka telah menghafal bagian yang paling baik dari mereka dengar dan menyampaikan bagian yang paling baik dari yang pernah mereka hafal. Hal ini juga diungkapkan oleh Zuhri (2001) sebagai berikut:

.....kewajiban seorang guru terletak adalah mendidik murid-muridnya. Artinya mencakup

pengertian tiga perkara. *Mendidik jasmani* murid-murid, agar mereka memiliki tubuh yang sehat, ringan kaki, cekatan, dan riang gembira. *Mendidik otak* murid-murid, agar mereka memiliki kecerdasan berfikir dan mempunyai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkat usianya. Dan *pendidikan rohani* murid-murid, agar mereka memiliki perangai atau akhlak yang mulia, benar kata-katanya, jujur perbuatannya, mengabdikan kepada Allah Swt, dan berbakti kepada orang tuanya dan bangsanya.

Lebih lanjut, kalau dikaji lebih mendalam tujuan pendidikan sekalipun dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang panjang, namun dapat diringkaskan menjadi: *membentuk manusia*; Ini mengandung makna yang luas sekali. Manusia tidaklah sekadar orang. Ada ucapan seorang ahli pikir yang mengatakan: *sebegini banyak orang di dunia, tetapi sedikit saja yang bernama manusia*. Ucapan ini biasa kita perkecil terbatas pada sekeliling kita sehari-hari bahwa sebegini banyak *orang-orang* sekeliling kita, tetapi tidak semuanya pantas disebut manusia (Zuhri, 2001).

Secara metodologis, Tuan Guru sebagai pengajar dan pendidik dalam mengembangkan teknik pengajarannya dilakukan dengan dua jalan yang dinamakan dengan metode *sorogan* dan *bandongan*. Menurut Djajadiningrat (1936), kutipan telah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan

(EYD) dalam pengembangan metode ini dilakukan dengan cara berikut ini:

Santri baru harus duduk melingkungi guru. Guru itu membacakan dan menerangkan pelajaran secara laku seorang profesor yang mengajar. Dalam mengajar itu, ataupun sesudahnya, murid-murid diberi kesempatan buat bertanya.

Pada metode yang dikembangkan ini, merupakan teknik pengajaran yang dilakukan secara individual, sedangkan metode *bandongan*, lebih lanjut Djajadiningrat (1936), menyampaikan, yaitu:

Mereka itu datang kepada guru seorang-seorang dengan kajinya-kajinya itu dibacakan oleh guru, diterangkan makna dan tafsirnya yang perlu, kemudian harus dibaca pula oleh murid serta harus diulangnya pula menerangkan secara guru menerangkan tadi. Aturan mengajar serupa itu disebut “bandongan”.

Metode *bandongan* ini merupakan teknik pengajaran yang digunakan oleh Tuan Guru secara kolektif atau kelompok diikuti oleh seluruh santrinya, Tuan Guru membaca, menterjemahkan, dan menerangkan kitab yang dikaji, dan sistem *halaqah* merupakan sistem pengajaran yang dikembangkan oleh Tuan Guru tanpa ada penjenjangan. Teknik ini dikembangkan oleh Tuan Guru, karena fungsinya sebagai pengajar tidak dapat dilepaskan dari pondok pesantren, maka di sinilah

ditemukan keunikan dan karakteristik tersendiri sistem pendidikan yang diterapkan oleh tuan guru, bahkan selain metode *sorogan* dan *bandongan*, yang dikembangkan sistem *halaqah*, dan hafalan.

Adapun alasannya didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu, *pertama*, secara manajerial pengembangan dan pembahasan teknik pengajaran ini dimaksudkan untuk mencapai proses pembelajaran secara efektif dan efisien; *kedua*, secara filosofis dan psikologis pengembangan teknik pengajaran ini menjadi suatu tuntutan dengan mempertimbangkan heterogenitas masyarakat. Oleh karena itu, fungsi yang diemban tuan guru, baik secara struktural maupun formal didasarkan atas pertimbangan internal yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga fungsinya cukup besar dalam perkembangan masyarakat, pengembangan pendidikan agama, mampu menciptakan suatu suasana kekeluargaan, dan menyebarkan berbagai ilmu keagamaan pada masyarakat.

2) Tuan Guru sebagai Ahli Hukum Islam

Dalam mengamalkan keahlian yang dimiliki oleh Tuan Guru, yaitu terkait dengan ilmu-ilmu agama yang dimiliki; masyarakat sering menjadikan Tuan Gurusebagai pemuka agama sekaligus pemuka masyarakat untuk meminta nasehat atau saran. Tuan Guru memiliki arti penting bagi masyarakat, karena Tuan Guru selalu dianggap mampu berbicara benar

dan mampu memberi nasihat yang baik pada masyarakatnya, sehingga Tuan Guru sering menjadi pemimpin informal masyarakat dan pembentuk opini, suatu kenyataan yang disebut dan dipakai oleh beberapa agen pembangunan (*agent development*).

Peran Tuan Guru dalam perilaku hidupnya sangat mempengaruhi pola berfikir masyarakat, sehingga Tuan Guru memiliki otoritas dalam masyarakat dengan memperkuat posisinya secara kreatif dan aktif dalam membentuk dan mengubah struktur sosial serta institusi yang ada dengan menggerakkan masyarakat desa. Pada konteks inilah, Tuan Guru sebagai *moral force* bagi pembangunan dalam arti menjadi aktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.

Pengalaman partisipan dalam peristiwa yang mempengaruhi kualitas seseorang dan orang lain yang terlibat dalam sebuah perubahan dari pasif ke aktif, dari menjadi penerima (barang-barang dan pelayan) menjadi orang yang mengembangkan kapasitas untuk pengungkapan sendiri pada suatu kepercayaan membuat pilihan dan pengambilan keputusan. Terkait dengan itu, Tuan Guru akan dapat memberikan respon positif berupa perubahan dalam masyarakat, sebagaimana ungkapan yang berbunyi: "*Almukhafadhatu ala qodimis sholih, wal*

*akhdu dil jadidil aslakh*”, artinya “Memelihara barang (keyakinan) lama yang baik dan mengambil barang atau sesuatu yang baru yang lebih baik lagi”. Dalam hal ini, Tuan Guru tidak akan menolak pembaruan dengan membangun masyarakat yang semuanya itu akan lebih baik, dan menunjukkan pada adanya daya dorong perubahan dari dalam inti pemikiran agama, diiringi interaksi panjang dengan modernisasi.

Dengan demikian, fungsi Tuan Guru berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan diri pada masyarakat sebagai bagian dari makhluk sosial dalam melakukan perubahan pada setiap perilaku dan perbuatan masyarakat yang dilandaskan pada nilai-nilai agama dengan prinsip religius-moralis.

Tuan Guru telah memberikan warna bagi pengembangan dan perubahan masyarakat (*social change*), artinya Tuan Guru tidak hanya diterima secara kultur, akan tetapi telah ikut serta menentukan arah kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Secara kelembagan peran Tuan Guru yang cukup mendasar lebih bersifat fungsional dan potensial terkait dengan pembangunan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari keahlian, kemampuan agama dimilikinya, selebihnya dapat diketahui potensi tuan guru, di antaranya yaitu potensi pendidikan, dakwah, dan sosial

kemasyarakatan, sehingga dari potensi-potensi yang dimiliki Tuan Guru akan dapat diketahui arah dan sasarannya dalam pembangunan masyarakat, khususnya pembangunan masyarakat desa.

- 3) Peran Tuan Guru dalam pengembangan Pendidikan  
Tuan Guru sebagai pusat orientasi nilai dan moral ikut bertanggung jawab dalam proses pencerdasan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, sedangkan secara khusus Tuan Guru bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masyarakat pada suatu daerah dimana ia berada. Tanggung jawab demikian mengacu pada pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan perubahan dan kondisi masyarakat. Dari titik pandang ini, Tuan Guru secara kelembagaan maupun inspiratif, memilih model yang diterapkan dalam mendukung secara penuh tujuan dan hakikat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin yang sejati, memiliki kulit moral dan intelektual.

Dengan demikian, potensi pendidikan yang dimiliki oleh Tuan Guru pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan-baik dengan Allah Swt, sesama manusia maupun alam semesta, yang inheren dengan anatomi akhlak, minimal kerangka konseptual, dan secara khusus potensi pendidikan yang dimiliki Tuan Guru adalah proses penanaman ajaran agama

Islam kepada masyarakat, penghayatan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbuat maupun berperilaku untuk mempertahankan kehidupannya sendiri, sehingga terjadi komunikasi dan interaksi yang terus menerus (*continue*) antara Tuan Guru selaku panutan dan masyarakat desa.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat telah membawa dampak seperti yang dikemukakan di atas membawa dampak pada hilangnya identitas, jati diri, dan kepribadian masyarakat, kemudian membawa akibat pada kemerosotan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena warga masyarakat cenderung mengedepankan gaya hidup (*life style*) individualis, mengedepankan kelompok, dan jauh dari nilai-nilai kebersamaan, seperti layaknya manusia sebagai makhluk sosial (*social animal*), sehingga mentalitas masyarakat cenderung konsumernis dan hedonis yang perlu diorientasikan pada masa depan secara lebih seksama dan teliti (Koentjaraningrat, 2000).

Tuan Guru dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat setidaknya harus mampu memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat yang dilandaskan pada kemampuan moral keagamaan, kemampuan moral kultural, menempatkan diri di tengah-tengah pergaulan bersama dengan mengupayakan penanaman nilai-nilai agama,

kemudian dijadikan landasan setiap aspek kehidupan.

Pada intinya Tuan Guru memiliki kedudukan yang kuat dan pengaruh besar untuk memelopori perubahan mendasar pada masyarakat yang sedang membangun. Tuan Guru juga mendorong masyarakat untuk menentukan skala prioritas kebutuhannya melalui kebijakan, keputusan, atau gagasan bagi masyarakat. Selain itu, dapat mendorong ditempuhnya cara dan proses pembangunan tanpa memerlukan biaya banyak melalui upaya pembangunan masyarakat dengan prinsip hemat, efektif, efisien, dan swadaya berdasarkan kemampuan masyarakat. Kemampuan Tuan Guru untuk memotivasi tumbuhnya swadaya masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, bertumpu pada kemampuan sendiri dengan melestarikan dan mendinamisir nilai-nilai agama dan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianut oleh masyarakat.

Dengan demikian, untuk mewujudkan potensi Tuan Guru dapat dilakukan melalui perangkat-perangkat lembaga dakwah dengan memadukan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan yang ada pada masyarakat, maka dari sinilah dimulai proses pelaksanaan pembangunan masyarakat beserta segenap potensi yang ada, meski dalam lingkup mikro, tetapi cukup mendasar akan tetapi sangat menentukan.



## BAB IX

# PRAKSIS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Tujuan pendidikan nasional adalah memberi peluang secara luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, karena pemerintah bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan. Sumarno dalam Jalal dan Dedy (2001) mengatakan bahwa Sosok masyarakat masa depan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan sendiri untuk menetapkan masa depannya, memilih alternatif kebijakan yang akan ditempuh, mengelola jalannya kehidupan, dan mengadakan kontrol sosial sendiri. Semua itu tumbuh tidak secara *top-down*, melainkan secara *bottom-up* hal itu dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan pembenahan dilakukan sebagai kebijakan dasar.

Selama ini telah terjadi kesenjangan antara masyarakat dengan sekolah sebagai pengelola pendidikan formal. Terdapat anggapan bahwa sekolah hanyalah sekedar tempat penitipan anak karena orang tua tidak memiliki waktu untuk menjaga dan mendidik, atau mungkin tidak bisa dan tidak tau cara mendidik anak. Pada era otonomi dewasa ini keluarga dan masyarakat bukan lagi pihak yang pasif hanya menerima keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Masyarakat harus proaktif, menentukan, dan membuat program pendidikan bersama sekolah dan pemerintah” (Nurkholis, 2006). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan terutama di pedesaan sangat bermanfaat bagi peningkatan sumber daya manusia, karena pendidikan merupakan jalan utama menuju gerbang kesejahteraan suatu bangsa. Rhoda dalam Nurkholis (2006) mengemukakan bahwa keikutsertaan keluarga (orang tua) dan masyarakat dalam pendidikan memiliki banyak keuntungan, diantaranya yaitu *Pertama* pencapaian akademik dan perkembangan kognitif siswa berkembang secara signifikan, *kedua* orang tua siswa dapat mengetahui perkembangan anaknya dalam proses pendidikan di sekolah, *ketiga* orang tua akan menjadi guru yang baik di rumah dan bisa menerapkan formula-formula positif untuk mendidik anaknya, *keempat* akhirnya orang tua memiliki sikap dan pandangan positif terhadap sekolah.

Pendidikan adalah bentuk kegiatan yang mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak-anak bangsa, akan tetapi tidak hanya dilakukan di sekolah saja, orang tua dan masyarakat bertanggung jawab dalam pendidikan. Peran orang tua dalam pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai sehingga generasi muda siap secara fisik dan mental memasuki kehidupan masyarakat yang memiliki nilai-nilai kolektif (Maliki, 2008). Pendapat di atas memberikan arti bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tugas sekolah, akan tetapi pendidikan kepada

anak dilakukan oleh orang tua dan masyarakat. sehingga proses pendidikan itu tidak terputus dan tidak hanya terbatas di sekolah formal.

Pendidikan dilakukan melalui usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Para ahli pendidikan meyakini bahwa daya saing suatu bangsa sangat bergantung pada penyelenggaraan pendidikannya, yaitu pendidikan yang dapat mewujudkan sumberdaya manusia bermutu. Sehingga kunci pembangunan sumberdaya manusia adalah melalui penyelenggaran pendidikan bermutu.

Proses untuk mencapai pendidikan bermutu difahami sebagai proses pembudayaan, menurut Nurkholis (2014)

.....untuk mencapai sekolah bermutu dapat ditinjau dari tiga level, yaitu: sekolah bermutu yang berpangkal pada manajemen dan *leadership*, mutu pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, dan budaya mutu yang dikembangkan dikalangan civitas akademica sekolah.....

Dalam perkembangan pendidikan di pedesaan; sekolah tentunya tidak bisa berjalan sendiri, sekolah bersinergi dan didukung dari masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan yang lebih luas. Sekolah dan masyarakat merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya saling membutuhkan. Sekolah ada karena masyarakat. Keterlibatan masyarakat

dalam pendidikan akan mempengaruhi pendidikan itu sendiri. Maju dan tidaknya pendidikan tergantung dari bagaimana dan sejauh mana masyarakat memandang pendidikan. Partisipasi masyarakat akan membuat pendidikan menjadi sangat penting dalam membangun suatu daerah. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, tidak hanya dalam hal mendidik anak. Karena orang tua dan sekolah merupakan dua elemen yang berperan secara bersama-sama untuk membangun pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah sebagai lembaga yang mengelola pendidikan dan mempersiapkan anggota masyarakat yang terdiri atas bermacam-macam golongan, jabatan, status sosial dan dan siap melakukan berbagai pekerjaan. Dalam perkembangan pendidikan sekolah sangat memerlukan adanya hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat diharapkan mampu membuat perubahan dalam pembangunan pendidikan. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah demi kemajuan pendidikan. Masyarakat juga menginginkan agar sekolah bisa memberi pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat terutama untuk meningkatkan perkembangan anak-anaknya. Maka, perlu adanya pengelolaan pendidikan yang baik dan hubungan antara masyarakat dan sekolah semakin baik agar tercipta pendidikan yang baik dan berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Jerowaru menunjukkan bahwa; pembangunan pendidikan di pedesaan tentunya tidak selalu berjalan dengan baik, sebagai contoh di beberapa *dasan* (dusun) perkembangan pendidikan tidak sama dengan yang ada di pusat pedesaan. Data yang diperoleh, secara umum yang selalu menjadi penghambat dalam pembangunan pendidikan terutama di dusun-dusun adalah sebagai berikut:

- (1) Kurang tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal.
- (2) Ketercapaian penyampaian suatu materi kepada siswa kurang efektif dalam proses pembelajaran kepada siswa disebabkan guru memegang lebih dari satu bidang studi mata pelajaran yang diampunya. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah rasio guru tidak memadai sehingga menyebabkan satu orang guru bisa menyampaikan dua sampai tiga mata pelajaran yang berbeda sekaligus dalam seminggu dengan bobot jam mengajar lebih dari standar seharusnya.
- (3) Banyaknya jumlah siswa dalam satu ruangan melebihi dari daya tampung kelas,
- (4) Tingkat penghargaan yang diterima oleh guru dalam bentuk kesejahteraan terkadang tidak sesuai dengan pengabdiaannya sehingga bisa menyebabkan menurunnya semangat kerja yang berdampak pada penyampaian materi kepada siswa menjadi

sekadarnya saja, sehingga pada akhirnya konsistensi terhadap waktu belajar menjadi menurun,

- (5) Keharmonisan hubungan sosial antara guru dan siswa, guru dan staf, guru dan atasan sampai kepada guru dan orang tua, hal ini disebabkan oleh *missunderstading* atau kurang kesepahaman terhadap suatu masalah.

Permasalahan pendidikan yang terjadi di Desa Jerowaru ini terjadi pada sekolah-sekolah yang dusun-dusun yang jauh dari pusat desa. Permasalahan tersebut merupakan faktor eksternal penghambat pembangunan pendidikan. Sedangkan faktor internal yang juga berpotensi menjadi penghambat pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru adalah mulai terkikisnya rasa memiliki, tanggung jawab terhadap tugas, dan beban moral baik itu bagi tenaga pendidik, anak didik, pemerintah dan masyarakat. Tidak ada rasa memiliki terhadap sekolah berarti tidak mau tahu atau cuek saja dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah sehingga terkesan sekolah bukan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi siswa menuju pembangunan pendidikan dimasa yang akan datang. Orang tua siswa umumnya tidak terlalu banyak tahu tentang aktifitas anaknya selama proses belajar mengajar disekolah, mereka hanya berasumsi bahwa disekolah anaknya sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Desa Jerowaru sebagai pelaksana kegiatan dikategorikan sebagai desa tertinggal yang penulis sebut

sebagai pedesaan. Makna masyarakat pedesaan hingga saat ini belum ada kesepakatan umum tentang keberadaan masyarakat pedesaan dalam bentuk pengertian yang baku. Menurut Setiadi dan Usman (2011) bahwa pedesaan memiliki arti tersendiri dalam kajian struktur sosial atau kehidupan.

Dalam keadaan yang sebenarnya pedesaan dianggap sebagai standar dan pemeliharaan sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti gotong royong, tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, kesenian, kepribadian dalam berpakaian, adat isitiadat, nilai-nilai, dan norma. Pedesaan acap kali dideskripsikan sebagai tempat kehidupan bermasyarakat dimana anggota masyarakatnya bergaul dengan dengan rukun, tenang selaras dan akur.

Ciri-ciri masyarakat pedesaan ditandai dengan adanya ikatan perasaan yang kuat antara sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat hakekatnya, bahwa seseorang merasa bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimana dia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. selanjutnya Setiadi dan Usman (2011) merinci ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain:

1. Di dalam masyarakat pedesaan diantara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya.
2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan.
3. Sebagian warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.
4. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama dan adat istiadat.

Ciri-ciri masyarakat di atas memberikan berbagai definisi dan gambaran tentang masyarakat pedesaan. Wasistiono dan Tahir (2006) menjelaskan khusus tentang desa; definisi desa sama dengan pengertian tentang masyarakat pedesaan, sampai saat ini masih perlu di kaji karena batasannya masih mejadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Karena desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Kata “desa” berasal dari bahasa india yaitu “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Corak kehidupan di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan suatu “*gemeinschaft*” yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini dapat dimengerti karena penduduk desa merupakan “*face to face group*” dimana mereka betul-betul

saling mengenal seolah-olah mengenal dirinya sendiri. Pada dasarnya desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal. Secara sosiologis masyarakat desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya.

Kehidupan masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang masih menganut pola kehidupan tradisional walaupun tidak selamanya benar. Sebab pada awalnya pola masyarakat pertanian pedesaan secara tradisional digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan dewasa ini di beberapa pedesaan sudah banyak yang menganut pola bisnis, dimana pola bercocok tanam sudah mengarah pada agrobisnis. Dari sisi kebudayaan menurut Setiadi dan Usman (2011) masyarakat pedesaan yang tradisional tersebut merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial di sekitarnya tanpa menerima pengaruh luar. Pernyataan Elly dan Usman ada benarnya karena masyarakat pedesaan hidup di daerah yang secara geografis terlatak jauh dari keramaian kota. Dengan demikian masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat dengan sifat-sifat yang hampir seragam.

Pengertian masyarakat pedesaan menurut para ahli sosiologi masih belum berada pada titik temu. Artinya belum ada pengertian masyarakat pedesaan yang baku. Berbagai pendapat tentang masyarakat pedesaan tersebut membutuhkan kajian untuk menafsirkan makna

masyarakat pedesaan secara baku. sebagai pembanding dalam penelitian ini dikutip pengertian masyarakat dari beberapa ahli.

Menurut Setiadi dkk. (2011), masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal pada daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan - aturan menuju tujuan yang sama. Sekelompok manusia yang memiliki karakteristik dengan berelasi atau berhubungan diantara individu pada *culture* atau institusi tertentu disebut juga sebagai masyarakat.

Dalam konteks lain Gidden (1984) mengemukakan terma masyarakat memiliki dua pengertian pokok yaitu: pengertian pertama berupa konotasi umum "*social association*" (asosiasi sosial) atau interaksi; pengertian lainnya berupa "masyarakat" sebagai sebuah kesatuan, yang memiliki batas-batas yang membedakannya dengan masyarakat-masyarakat lain yang mengelilinginya. Ambiguitas terma ini dalam kaitannya dengan dua pengertian di atas sesungguhnya tidak separah kelihatannya. Hal ini karena totalitas masyarakat sama sekali tidak berarti selalu memiliki batas-batas yang benar-benar jelas, meskipun totalitas masyarakat tersebut lazimnya berkaitan dengan bentuk-bentuk kelokalan yang tegas.

Masyarakat menurut konsepsi baru yang dikemukakan oleh Veeger (1985) bahwa “individu dan masyarakat tidak mungkin dipisah-pisahkan antara yang satu dengan lain”. maksud dari Veeger adalah kebebasan individu tidak mungkin dipikirkan tanpa adanya ikatan dan keterikatan dengan orang lain. independensi sebagai individu tidak mungkin ada tanpa dependensi dari masyarakat. Antara kedua kutub tersebut terdapat suatu relasi timbal balik, sebagaimana tiap-tiap pribadi menghidupi masyarakatnya, begitu juga tiap-tiap masyarakat menghidupi pribadinya tanpa individu tidak akan ada masyarakat, dan tanpa masyarakat tidak akan ada individu. Penjelasan yang dikemukakan oleh Veeger menunjukkan adanya hubungan imbal balik antara individu dengan masyarakat, karena tidak akan ada masyarakat kalau tidak ada individu sebaliknya tidak akan ada aktivitas sosial dalam masyarakat kalau individu tidak terlibat didalamnya.

Pengertian yang diungkapkan oleh Veeger juga menunjukkan bahwa individu hidup untuk bermasyarakat karena keterlibatan individu akan menimbulkan aktivitas sosial. Konsepsi masyarakat yang dihasilkan oleh pandangan ini bercorak “*kolektivitis*” dan “*organistis*”. *Kolektivitis* adalah ciri masyarakat yang cenderung untuk meremehkan, bahkan akan menghapus keunikan dan kepentingan individu sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab, demi kepentingan dan kemauan kolektif masyarakat, bangsa, atau negara. Masyarakat

mengenakan suatu pola pikir dan bertindak yang seragam pada anggotanya. “*Holistis* adalah kecendrungan untuk menekankan secara berlebihan kesatuan kehidupan umat manusia dengan tindakan mengakui perbedaanya”, (Veeger, 1985). Pandangan tentang masyarakat *kolektivitis* dan *holistis* mempunyai akar pada realisme yang merupakan aliran filsafat yang mengajarkan bahwa konsep-konsep umum seperti manusia, binatang, pohon, keadilan, keindahan dan sebagainya mewakili suatu realitas yang nyata diluar orang yang memimirkan mereka. Konsep masyarakat juga mempunyai realitas dalam dirinya dan diluar pikiran manusia itu sendiri.

Pandangan Veeger di atas menunjukkan bahwa antara individu dan masyarakat akan membentuk aktifitas sosial untuk mendapatkan kehidupannya, dan terbentuk sesuai dengan perkembangan sosialnya. Toennies dalam Veeger (1985) menjelaskan bahwa “masyarakat bukan organisme yang dihasilkan oleh proses-proses biologis, juga bukan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian individual yang masing-masing berdiri sendiri, sedang mereka didorong oleh naluri-naluri spontan yang bersifat menentukan bagi manusia”. artinya terbentuknya masyarakat merupakan usaha manusia untuk mengadakan dan memelihara relasi-relasi timbal balik yang mantap, karena kemauan manusia yang mendasari masyarakat. Relasi tersebut berpengaruh pada corak dan ciri interaksi orang dalam kelompok atau masyarakat tertentu.

Relasi dan interaksi yang membentuk corak dan ciri yang terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hubungan antara manusia yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama. Sergiovanni (1994) menjelaskan bahwa “relasi dari orang-orang untuk satu tujuan dan hubungan antar orang-orang tidak didasarkan pada kontrak tetapi komitmen. Masyarakat sosial terorganisir disekitar hubungan dan merasa saling ketergantungan diantara mereka”. Masyarakat diartikan sebagai pusat hubungan dan keterikatan antara nilai, dan keyakinan yang menyediakan kondisi yang diperlukan untuk menciptakan rasa kebersamaan dalam satu ikatan.



## **BAB X**

# **PENOMENA PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PRAKSIS PENDIDIKAN**

### **A. Gambaran Partisipasi Masyarakat Pedesaan**

Konsep Desentralisasi pendidikan dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan di masing-masing daerah, dalam pembangunan pendidikan dibutuhkan kredibilitas sumberdaya manusia yang tinggi dan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Pembangunan daerah melalui pembangunan pendidikan harus melibatkan masyarakat dan di berikan tanggung jawab sepenuhnya agar pembangunan pendidikan berjalan dengan baik. Buku ini menggambarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru diantaranya adalah (1) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat; dan (2) tingkat partisipasi masyarakat yang memberikan dampak positif terhadap praksis perkembangan pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari aktivitas masyarakat, orang tua dan komite sekolah yang aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan dapat merasakan dampak dari pembangunan pendidikan tersebut. Sedangkan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh peran tokoh masyarakat desa, tokoh agama, dan tokoh adat. Seperti disampaikan

oleh Kepala Desa Jerowaru, bahwa masyarakat dilibatkan dalam praksisi pembangunan pendidikan melalui rapat-rapat perencanaan dan persiapan, pelaksanaan dan bahkan sampai evaluasi, dan di hadiri oleh tokoh-tokoh desa. Selain itu masyarakat dilibatkan dalam pendanaan dengan cara mengirimkan surat donatur kepada masyarakat Jerowaru yang memiliki pendapatan tetap, misalnya PNS, TNI, POLRI, Dokter, Bidan, Perawat”.

Indikator perkembangan pendidikan di pedesaan adalah pesatnya pembangunan sarana pendidikan, dan meningkatnya kualifikasi tingkat pendidikan. Indikator keberhasilan pembangunan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu indikator kualitas dan kuantitas, kedua indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Indikator keberhasilan pendidikan dilihat dari sisi kualitasnya dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a) Tuan Guru sebagai tokoh masyarakat terus mendorong masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan.
  - b) masyarakat aktif berpartisipasi yang menandakan bahwa masyarakat peduli dengan pendidikan,
  - c) kepedulian masyarakat dalam pembangunan pendidikan tergambar dengan perhatian masyarakat terhadap kondisi pendidikan anak-nya. Orang tua menyekolahkan anak - anaknya pada jenjang tertentu sebagai gambaran bahwa masyarakat sudah menyadari manfaat pendidikan.

- 2) Indikator keberhasilan dapat dilihat dengan kuantitas keberhasilan pembangunan sarana pendidikan. Perubahan jumlah sarana pendidikan (gedung sekolah) baik sekolah negeri maupun madrasah (swasta).

Masyarakat sangat menginginkan anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan walaupun hanya lulus sampai jenjang pendidikan sekolah menengah; bahkan kalau mampu mereka akan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat Desa Jerowaru, beliau berharap agar anaknya tidak seperti mereka yang tidak bisa sekolah, karena orang tua mereka tidak mau menyekolahkan mereka dengan alasan pendidikan tidak penting, sekolah membutuhkan biaya besar, dan sekolah tidak ada gunanya terutama bagi anak-anak yang perempuan. Orang tua mereka dahulu mengatakan anak perempuan tidak perlu sekolah karena hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja, karena menjadi ibu rumah tangga tidak perlu memiliki ilmu pengetahuan.

Saat ini masyarakat sudah mulai memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Mereka mendorong anak-anaknya agar terus sekolah sehingga nantinya menjadi anak yang berguna dan tidak menganggur. Alasan itu disampaikan karena anak yang tidak sekolah sangat sulit dalam mencari pekerjaan sehingga mereka menjadi TKI ke luar negeri, itulah sebabnya mereka terus mendorong anak-anaknya agar giat

menuntut ilmu agar memiliki skill dan memiliki ilmu pengetahuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat mendorong anak-anaknya rajin sekolah dengan harapan nantinya mampu bersaing pada persaingan perkembangan zaman pada tingkat global.

Pemahaman masyarakat tentang manfaat pendidikan akan mempengaruhi partisipasi mereka dalam praksis pendidikan tersebut dan sebaliknya kurangnya pemahaman masyarakat akan menimbulkan kurangnya partisipasi mereka juga. Penelitian tentang partisipasi ini menunjukkan bahwa; partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut kepala SDN 3 Jerowaru; partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pendidikan terhadap mereka, masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah sebagian besar orang yang sudah tua yang masih memiliki pola pikir bahwa sekolah tidak terlalu penting dalam menjalani kehidupan mereka.

Sebagian masyarakat pedesaan menganggap pengelolaan pendidikan sudah ditangani oleh pemerintah, mereka menganggap bahwa sudah ada pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pendidikan, apapun yang terkait tentang pengelolaan pendidikan adalah tanggung jawab kepala sekolah, guru, dan pemerintah. Masyarakat tidak perlu ikut campur dan tidak perlu turun tangan, cukup dengan biaya BOS dan

biaya-biaya lain dari pemerintah maka sekolah akan maju paparnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan membutuhkan komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Kepala SDN 1 Jerowaru *“kita selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk terus mendorong masyarakat agar terus terlibat dalam proses pelaksanaan pendidikan”*. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan menginformasikan ke masyarakat dan orang tua agar membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Dalam praksis pembangunan pendidikan masyarakat akan aktif berperan sesuai dengan kebutuhan sekolah jika mereka diminta dan diberikan tanggung jawab oleh sekolah.

Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan pendidikan merupakan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan praksis pendidikan untuk menjalankan program pendidikan secara langsung dengan tidak mengorbankan aktivitas masyarakat itu sendiri, partisipasi yang dilakukan membuat masyarakat turut menjadi bagian dari proses pembangunan pendidikan tersebut dan masyarakat ikut bertanggung jawab dalam keseluruhan proses pelaksanaan program pendidikan di sekolah, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pendidikan merupakan bagian yang penting bagi masa depan generasi muda dan bermanfaat bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat menyadari pentingnya partisipasi dalam

penyelenggaraan pendidikan, pembangunan pendidikan membutuhkan kerja sama yang baik anatar masyarakat dengan sekolah. Karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah saja, tetapi pendidikan juga menjadi tanggung jawab masyarakat, orang tua, dan *stakeholders*.

Desentralisasi dalam bidang pendidikan menuntut keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pengelolaannya. masyarakat adalah bagian terpenting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang pendidikan bahwa pengelolaan pendidikan tidak terlepas dari peranserta masyarakat. Peran masyarakat sangat vital dan sangat sentral dalam pengelolaan pendidikan. itulah sebabnya partisipasi masyarakat harus terus didorong agar mencapai tujuan pendidikan.

Untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat diperlukan pemahaman yang baik, dan masyarakat harus bisa menikmati manfaat dari pendidikan itu sendiri. Jika masyarakat menikmati langsung manfaat dari partisipasi dan masyarakat diberikan keuntungan dari proses pelaksanaan pendidikan tersebut maka masyarakat akan terpacu untuk terus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan. manfaat partisipasi yang dimaksud adalah output pendidikan di sekolah dasar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang lebih maju.

Mengacu pada pendapat Dwiningrum yang menjelaskan bahwa partisipasi merupakan proses interaksi

sosial yang perlu dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat. Dwiningrum menjelaskan; pembangunan pendidikan adalah kenyataan obyektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subyektif dari masyarakat atau orang tua siswa. Lebih lanjut Dwiningrum menjelaskan bahwa partisipasi sebagai proses interaksi sosial ditentukan oleh proses obyektivitas dalam dunia intersubjektif yang dapat dibedakan oleh kondisi sosiokultural sekolah. Bagi sekolah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah kenyataan obyektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subyektif orang tua siswa.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektivitas dari pihak sekolah sebagai pengelola pendidikan dan orang tua atau masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan. Artinya, partisipasi sebagai bagian terpenting untuk mencapai keberhasilan peningkatan mutu dalam pembangunan pendidikan tidak cukup difahami oleh sekolah saja, karena tujuan untuk mencapai mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubjektif (siswa, orang tua, dan guru) menunjukkan kesenjangan pemahaman tentang mutu pendidikan. Pembangunan pendidikan akan berhasil jika ada pemahaman yang sama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat.

## **B. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Praksis Pendidikan di SD**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan tidak hanya dilihat dari hasilnya secara material, akan tetapi partisipasi masyarakat dilihat dari proses partisipasi yang dilakukan, artinya bagaimana masyarakat dalam keseluruhan proses partisipasi menggambarkan pengakuan terhadap kapasitasnya. Menurut Soetomo (2010) “keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kesadaran”, artinya dalam usaha pembangunan pendidikan, masyarakat tidak diperlakukan sebagai objek saja, tetapi dilibatkan sebagai atau pelaku dalam prosesnya.

Pada dasarnya Soetomo menempatkan masyarakat sebagai subjek dibandingkan sebagai objek partisipasi. Sebagai subjek pendidikan, masyarakat harus menjiwai dan ikut mewarnai tahapan-tahapan proses pembangunan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan dimulai dengan pelibatan dalam perencanaan (perumusan program), pelaksanaan program, evaluasi program, dan masyarakat harus dapat menikmati hasil program pembangunan pendidikan yang dirancang bersama. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pedesaan dapat dilihat dari hasil penelitian di Desa Jerowaru. Partisipasi Masyarakat pedesaan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1 : Bentuk Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Praksis Pendidikan di Sekolah Dasar**

Aspek	Peran Masyarakat	Proses	Deskripsi	Permasalahan
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan program pendidikan</li> <li>- Pengambilan keputusan</li> <li>- Memberikan ide yang dapat dijadikan kesepakatan bersama dalam pembangunan pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat rencana program sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilibatkan dalam proses perencanaan program, pengambilan keputusan, dan diberikan kesempatan untuk memberikan ide dan pendapatnya melalui rapat yang diselenggarakan disekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua masyarakat mengikuti rapat</li> <li>- Lebih banyak berlaku pada madrasah.</li> </ul>
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi non materi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi dalam bentuk tenaga</li> <li>- Memotivasi anak untuk belajar</li> <li>- Membimbing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat ikut gotong royong dalam proses pembangunan gedung sekolah</li> <li>- Masyarakat memperhatikan kondisi belajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah kurang memperhatikan kondisi belajar anaknya</li> </ul>

Aspek	Peran Masyarakat	Proses	Deskripsi	Permasalahan
		anak-anak belajar dirumah	anak-anak kemudian mengontrol proses belajar disekolah maupun dirumah, dan membimbingnya belajar di rumah.	- tidak peduli dengan kondisi pembangunan gedung
	- Partisipasi material	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan bahan-bahan bangunan</li> <li>- Bantuan bahan makanan</li> <li>- Melengkapi sarana pendidikan</li> <li>- Menjadi tenaga sukarela di madrasah.</li> <li>- Pembiayaan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikut gotong royong dalam pembangunan sekolah</li> <li>- Warga masyarakat yang perempuan menyumbangkan makanan pada saat pelaksanaan pembangunan</li> <li>- Masyarakat ikut berpartisipasi melengkapi sarana pendidikan masyarakat yang sudah</li> </ul>	- Sebagai-an masyarakat belum aktif dalam berpartisipasi karena belum memahami makna partisipasi dalam pendidikan

Aspek	Peran Masyarakat	Proses	Deskripsi	Permasalahan
			sarjana menjadi tenaga educatif di sekolah.	
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pertimbangan</li> <li>- Mengontrol pelaksanaan</li> <li>- Monitoring hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan</li> <li>- Memberikan masukan</li> <li>- Mengontrol keberhasilan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat melakukan peranya dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati bersama dalam pengambilan keputusan</li> <li>- Masyarakat melakukan kontrol terhadap keberhasilan pendidikan dengan melihat <i>output</i> pendidikan dari hasil UN</li> </ul>	

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang digambarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan perogram pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam melalui perencanaan program pendidikan yang dirancang bersama masyarakat, orang tua siswa, komite sekolah, unsur sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan) dan pemerintah desa setempat. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau pengambilan keputusan dengan mengemukakan pendapat, ide atau saran dalam pembuatan suatu kebijakan pendidikan. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan pembangunan dibidang pendidikan dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

- a) Masyarakat ikut menghadiri rapat perencanaan pembangunan pendidikan jika diundang oleh pihak sekolah. Masyarakat berpartisipasi mulai dari proses perencanaan program kegiatan pengembangan pendidikan. Pihak sekolah mengundang masyarakat dalam rapat-rapat perencanaan program pendidikan, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya terkait dengan kemajuan pendidikan kedepan.

Bentuk kontribusi ini dilakukan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh sekolah sebagai pelaksana kegiatan pendidikan pada

tingkat satuan pendidikan, kemudian masyarakat ikut berperan aktif berpartisipasi menyumbangkan pikiran atau ide untuk pembangunan sarana pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini sejalan dengan kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan dimaksud. Seperti yang disampaikan oleh responden yang berasal dari unsur masyarakat. Beliau menjelaskan kadang kepala sekolah mengundang orang tua siswa untuk rapat-rapat persiapan pelaksanaan program pendidikan. Misalnya masyarakat memberikan pendapat dalam rangka penambahan gedung sekolah. Kemudian masyarakat juga undang rapat kenaikan kelas sebagai ajang silaturahmi, dan bahkan masyarakat ikut rapat dan dapat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk pembelian lahan dalam rangka perluasan lokasi pembangunan sekolah.

Sebagai contoh; partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Jerowaru lebih banyak terjadi pada sekolah-sekolah swasta. Masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi jika diajak untuk membangun sarana pendidikan berbasis agama, seperti merancang program untuk pembangunan

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Atau Madrasah Ibtida'iyah (MI), hal ini disebabkan karena MTs. dan MI merupakan pengelolaan pendidikan yang merupakan swadaya masyarakat sepenuhnya. Perencanaan pembangunan diawali dengan musyawarah antara tokoh agama, tokoh masyarakat dengan warga masyarakat umum lainnya. Musyawarah dilakukan untuk memutuskan apakah di dusun itu akan bangun pendidikan atau tidak. Jika masyarakat menyetujui maka pembangunan pendidikan akan dilaksanakan. Biasanya masyarakat akan sepakat dan ikut memutuskan jika keputusan itu diambil pada forum rapat yang dipimpin oleh Tuan Guru sebagai salah satu tokoh agama.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pembangunan pendidikan di sekolah-sekolah swasta tidak sama dengan pengambilan keputusan di sekolah-sekolah negeri. Pelaksanaan musyawarah yang diadakan oleh sekolah negeri tidak sepenuhnya bisa dihadiri oleh masyarakat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masyarakat menganggap bahwa kehadiran mereka tidak begitu penting dalam perumusan kegiatan atau pengambilan keputusan untuk mempersiapkan program

pembangunan pendidikan, masyarakat menganggap dalam rangka pengambilan keputusan cukup bisa diwakili oleh beberapa orang atau cukup dengan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

- b) Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pendidikan dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, komite sekolah, dan orang tua murid. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat pedesaan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berpartisipasi yaitu masyarakat ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran terutama dalam merancang persiapan pembangunan sarana pendidikan, misalnya penambahan gedung belajar, penambahan asrama, dan pembelian lahan. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat aktif memberikan ide dan fikiranya demi kemajuan pendidikan di Desa Jerowaru. Masyarakat Jerowaru memiliki peran yang sangat tinggi dalam perencanaan pendidikan khususnya pada sekolah-sekolah swasta karena pengelolaan pendidikan swasta merupakan swadaya murni masyarakat.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan secara umum tidak sepenuhnya langsung terlibat terutama di sekolah-sekolah negeri. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masyarakat menganggap bahwa kehadiran mereka tidak begitu penting dalam perumusan kegiatan atau pengambilan keputusan untuk mempersiapkan program pendidikan, masyarakat menganggap bahwa dalam rangka pengambilan keputusan cukup di diwakili oleh beberapa saja, dan juga sudah ada komite sekolah yang menjadi perwakilan orang tua.

Menurut sebagian masyarakat yang tidak mau terlibat dalam rapat-rapat pengambilan keputusan, orang tua sudah diwakili oleh komite sekolah, mereka menganggap bahwa keberadaan komite sekolah sudah cukup mewakili mereka. Padahal dalam struktur kepengurusan komite sekolah hanya sebagian keterwakilan masyarakat. Dibandingkan dengan rasio jumlah orang tua, pengurus komite sekolah hanya terdiri dari pengurus inti ketua komite sekolah yang terdiri dari ketua umum, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris umum, sekretaris I, sekretaris II, dan bendahara, ditambah dengan beberapa anggota. Dalam pengambilan keputusan keterwakilan

masyarakat dan orang tua dalam komite sekolah masih sangat kecil.

Keberadaan komite sekolah yang menjadi perwakilan masyarakat dan orang tua, masyarakat menganggap pengambilan keputusan juga cukup dilakukan oleh Tuan Guru sebagai tokoh agama saja, sebagian masyarakat hanya menerima keputusan yang merupakan rancangan program dan selanjutnya akan ditindak lanjuti dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan oleh sekolah. Dalam pengambilan keputusan, secara umum masyarakat tidak langsung terlibat. Tetapi di beberapa sekolah masyarakat memiliki ide untuk mendukung keputusan yang akan diambil oleh sekolah.

Keputusan dan kesepakatan bersama orang tua murid yang akan dilaksanakan sebagai keputusan bersama. Dan keputusan tersebut diambil oleh kepala sekolah sebagai sebuah kebijakan. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ini akan membuat masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan dan akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di atas dijelaskan oleh Fullan; Fullan

menyatakan bentuk partisipasi masyarakat dan orang tua yaitu *instruksi orang tua* di sekolah artinya adalah orang tua akan memberikan bantuan ke sekolah dalam bentuk saran ide dan pikiran, kemudian di rumah orang tua sebagai tutor bagi anak-anaknya. Berikutnya adalah *hubungan sekolah-rumah*; misalnya proyek untuk pembangunan pendidikan melalui partisipasi masyarakat, pengelola satuan pendidikan harus Berikutnya adalah *hubungan sekolah-rumah*; misalnya proyek untuk pembangunan pendidikan melalui partisipasi masyarakat, pengelola satuan pendidikan harus memperhatikan program atau kegiatan yang banyak melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar, agar mereka merasa diperhatikan sehingga perencanaan pendidikan bisa berjalan maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan program menjadikan masyarakat sebagai produsen bukan hanya sekedar sebagai konsumen semata, karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan atau perumusan program. Hal itu akan mengakibatkan masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut, sehingga akan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk terus berpartisipasi pada

program-program berikutnya, dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program akan terbentuk karena kesadaran dan determinasinya, bukan karena mobilitas oleh pihak eksternal.

## 2) Pelaksanaan Program Pendidikan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dapat berupa tenaga, uang (pembiayaan), dan barang. Berikut akan diuraikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di Pedesaan:

### (a) Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan yaitu kontribusi masyarakat dalam proses pelaksanaan pendidikan seperti pembangunan dan renovasi gedung sekolah, pembangunan sarana belajar mengajar, renovasi halaman sekolah dan melengkapi fasilitas sekolah. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dapat berupa tenaga, uang, dan barang. Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dalam bentuk tenaga yang dimaksud merupakan pelibatan warga masyarakat secara langsung dalam berbagai program kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dalam pelaksanaan pendidikan

dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi langsung bagi warga masyarakat, karena mereka tidak bisa menyumbang dalam bentuk materi atau uang. Misalnya dalam pembangunan sarana sekolah, seperti penambahan ruang kelas, pembangunan gedung perpustakaan dan bahkan pembangunan gedung baru masyarakat ikut gotong royong memberikan kontribusi dengan tenaga. Mereka yang ikut gotong royong merupakan masyarakat yang laki-laki. Sementara ikut berkontribusi dalam menyumbangkan dalam bentuk bantuan makanan.

Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dengan memberikan tenaga merupakan pelibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai program kegiatan pembangunan pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pendidikan sangat tergantung pada keterlibatan langsung masyarakat secara aktif atas dasar rasa sadar, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat itu sendiri.

Temuan peneliti tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di Desa Jerowaru dapat tegambar dari hasil *interview* (wawancara) dengan informan yang berasal dari Desa Jerowaru. Jika masyarakat diminta untuk berpartisipasi, maka masyarakat

akan lebih memilih untuk berpartisipasi dengan memberikan sumbangan tenaga. Menurut salah seorang komite sekolah, wujud partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan misalnya, komite sekolah diberikan kewenangan oleh sekolah untuk mengontrol pelaksanaan program pendidikan yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat dan pihak sekolah. Misalnya dalam pembangunan sarana sekolah, ketika berlangsung proses pembangunan sarana tersebut komite sekolah sering datang kesekolah untuk memotitoring langsung proses pengerjaan program tersebut agar sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati bersama.

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat Desa Jerowaru dapat berupa keikhlasan masyarakat yang sudah sarjana untuk mengabdikan diri sebagai guru "job" (guru lepas) yang kadang diberikan honor tetapi kadang juga tidak, mereka secara seukarela mengabdikan diri di madrasah dan sekolah untuk membantu pelaksanaan pendidikan. Guru yang mengajar sebagai guru honor termasuk partisipasi dan berkontribusi dalam bentuk tenaga, karena sebagian besar mereka adalah guru honor yang digaji sangat sedikit antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan sekolah.

(b) Partisipasi masyarakat dalam bentuk finansial

Partisipasi masyarakat pedesaan dalam pelaksanaan pendidikan dapat berupa sumbangan uang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. Kontribusi masyarakat berupa sumbangan uang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, sedangkan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah memberikan kontribusi berupa bantuan tenaga.

Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan pendidikan cenderung terjadi pada pelaksanaan pendidikan sekolah-sekolah swasta seperti madrasah Ibtida'iyah (MI) dan sekolah dasar islam (SDI). Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan lebih dominan pada sekolah-sekolah swasta. Misalnya masyarakat ikut aktif membayar uang syahriah (SPP) setiap bulan, kemudian saat pendaftaran masuk sekolah orang tua membayar uang pembangunan sesuai dengan aturan masing-masing madrasah.

Partisipasi dalam pembiayaan pendidikan akan berjalan dengan baik jika masyarakat merasakan manfaat pengelolaan pendidikan dan akan mempengaruhi partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan, dalam membiayai sekolah anak-anaknya, dan akan membantu pelaksanaan pendidikan sepenuhnya. Partisipasi

dalam pembiayaan akan dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Penilaian orang tua terhadap sekolah memiliki dimensi obyektif dan subyektif. Penilaian yang obyektif merupakan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang didasarkan pada kondisi formal diakui keberadaannya dan diakui kualitasnya oleh masyarakat dan akan ikut berpartisipasi aktif. Secara subyektif bersumber pada pengalaman personal dan informasi tentang sekolah yang dihasilkan dari proses interaksi sosial dan keluarga. Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah akan menjadi dasar bagi orang tua dan masyarakat untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka.

- (c) Partisipasi masyarakat dalam bentuk material  
Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan tidak hanya sebatas uang dan tenaga, disamping menyumbangkan uang untuk pembangunan sekolah, dan membayar syahriah (SPP) dengan uang, masyarakat juga menyumbang dalam bentuk materi berupa hasil-hasil pertanian mereka. Pada saat musim panen masyarakat menyumbang hasil pertanian berupa beras, ubi, dan jagung.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkatan ekonomi menengah ke atas berupa bantuan material seperti pasir, batu, batu bata,

semen, dan kapur jika sekolah sedang membangun. Masyarakat yang menyumbang material biasanya tidak ikut aktif membantu proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Masyarakat yang berkontribusi berupa material bangunan adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap seperti dokter, pengusaha tembakau, dan TNI/POLRI yang tidak bisa aktif dalam pembangunan tersebut, kemudian bagi masyarakat menengah kebawah dapat berkontribusi dalam bentuk tenaga.

Masyarakat yang tidak mampu berkontribusi berupa material bangunan mereka akan menyumbangkan nasi bungkus dan snack pada saat pembangunan gedung dan fasilitas sekolah dilaksanakan. Mereka aktif secara bergiliran yang diatur oleh masing-masing ketua RT atau kepala dusun. Partisipasi berupa sumbangan makanan saat pembangunan sekolah atau sarana sekolah biasanya dilakukan oleh masyarakat yang perempuan yang berasal dari kalangan menengah kebawah, mereka sangat antusias memberikan bantuan makanan kepada para pekerja yang sedang membangun sarana pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk material dan makanan ditemukan saat ada pembangunan madrasah atau sekolah-sekolah swasta, sedangkan dalam pembangunan

sekolah-sekolah negeri tidak ditemukan partisipasi masyarakat dalam bentuk material. Masyarakat menganggap bahwa sekolah swasta merupakan swadaya penuh masyarakat, sehingga sekolah-sekolah swasta menjadi tanggung jawab penuh masyarakat setempat. Sedangkan sekolah-sekolah negeri menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu memberikan bantuan berupa material dan sumbangan uang, dana pembangunannya dianggap cukup dana dari pemerintah daerah, inilah yang membedakan partisipasi masyarakat yang ada di sekolah swasta dengan sekolah-sekolah negeri.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah dana yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah maupun madrasah menunjukkan tingkatan partisipasi orang tua dalam pendidikan; sebagai mana dijelaskan oleh Dwiningrum (2011) bahwa “semakin besar dana yang dikeluarkan oleh orang tua berarti semakin besar partisipasi orang tua dalam mendorong peningkatan mutu sekolah”. Kontribusi berupa pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di pedesaan.

Partisipasi masyarakat merupakan wujud keikutsertaan masyarakat dalam memberikan manfaat kepada pendidikan dan manfaat pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat harus mendapat manfaat yang positif dari hasil pembangunan pendidikan.

3) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pendidikan

Evaluasi program pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian program dan manfaat program bagi pencapaian tujuan pendidikan. Sehubungan dengan itu masyarakat baik orang tua atau pengguna lulusan tersebut hendaknya memberikan masukan dalam evaluasi tersebut. Evaluasi dalam program pendidikan memberikan manfaat baik bagi semua unsur diantaranya yaitu masyarakat, orang tua, pihak sekolah, siswa/peserta didik, guru, pemerintah pengelola pendidikan, maupun manajemen pendidikan. Dengan adanya evaluasi akan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pendidikan yang telah dicapai selama proses pengembangan pendidikan dilaksanakan. Jika dari hasil evaluasi ditemukan hasil yang memuaskan maka akan memberikan dampak yang baik dalam pembangunan pendidikan berikutnya. Sebaliknya jika dicapai hasil yang memuaskan maka akan

berusaha untuk diperbaiki bersama. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk menetapkan upaya-upaya meningkatkan mutu pendidikan yang sedang dilaksanakan.

Evaluasi juga berfungsi untuk menetapkan kedudukan suatu program dalam pendidikan berdasarkan ukuran/kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini dan dapat dilaksanakan terus, atau sebaliknya program itu harus diperbaiki/disempurnakan. Pelaksanaan Evaluasi akan berpengaruh terhadap tujuan itu tercapai atau tidak. Dengan demikian kegiatan evaluasi sangat penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program pendidikan yang sudah direncanakan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan sangat besar manfaatnya bagi kemajuan pendidikan, namun dalam implementasinya keikutsertaan masyarakat Desa Jerowaru dalam evaluasi pendidikan tidak terlaksanakan dengan baik. Dari data yang diperoleh, masyarakat yang berperan sebagai pengguna, perencana, dan pengevaluasi pendidikan masih bersifat pasif, artinya masyarakat tidak memiliki inisiatif sendiri dalam berpartisipasi. Sementara fungsi masyarakat sebagai evaluator tidak berjalan dengan baik.

Masyarakat masih membutuhkan dorongan untuk berpartisipasi, hal ini disebabkan karena

masyarakat masih belum faham apa yang harus mereka lakukan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Dalam proses evaluasi pendidikan hanya melibatkan tokoh masyarakat dan sebagian komite sekolah. Masyarakat tidak banyak terlibat dalam melakukan evaluasi masyarakat tidak tahu apa yang mesti mereka usulkan, apa yang harus mereka lakukan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pendidikan dan sistem peningkatan mutu pendidikan mengakibatkan evaluasi masyarakat dalam pendidikan menjadi rendah. Faktor lain yang menyebabkan peran masyarakat dalam evaluasi pendidikan menjadi rendah adalah Rencana Program Pendidikan yang tidak jelas, menurut Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Jerowaru; sebagian besar Kepala sekolah tidak membuat rencana program pengembangan pendidikan. mereka hanya melaksanakan program pendidikan sesuai dengan aturan pendidikan yang diperintahkan oleh pemerintah daerah. Tidak ada rencana pendidikan yang dibuat sendiri oleh sekolah. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program evaluasi pendidikan tidak berjalan dengan baik.

### **C. Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sudah menjadi bagian terpenting dalam pembangunan pendidikan di Desa

Jerowaru. Menurut beberapa penulis, partisipasi masyarakat memiliki tingkatan-tingkatan dalam proses pembangunan pendidikan. Dijelaskan pada bab V dalam buku ini hasil penelitian Arstein (1969) menulis dalam sebuah Jurnal yang berjudul “*A Leader of Citizen Participation*”. Arstein membagi tingkat partisipasi pendidikan menjadi delapan tingkatan tangga yaitu *Manipulation, Terphy, Informating, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power*, dan *Citizen Control*. Tingkat partisipasi tersebut menggambarkan hirarki yang bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah pedesaan.

Deskripsi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan mengacu pada pendapat Arstein dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2 : Tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam prasis pendidikan**

Tingkat partisipasi	Keterlibatan masyarakat	Tujuan
<i>Manipulation</i> (manipulasi)	Masyarakat dilibatkan secara semu, sekedar formalitas semu.	Hanya sekedar pemanfaatan dukungan masyarakat sebagai legalitas suatu tujuan tertentu
<i>Teraphy</i> (terapi)	Masyarakat dianggap tidak berdaya oleh pemegang	Masyarakat dilibatkan hanya sekedar untuk mengobati rasa

Tingkat partisipasi	Keterlibatan masyarakat	Tujuan
	kebijakan. Pelibatan masyarakat hanya sekedar kepura-puraan hanya untuk mengobati kekecewaan masyarakat saja.	kecewa masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam proses pendidikan
<i>Informating</i> (menginformasikan)	Masyarakat diinformasikan tentang hak dan kewajibanya akan tetapi tetapi tidak diberikan kesempatan untuk merespons karena tidak memiliki power untuk melakukan negosiasi	Untuk menginformasikan hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan.
<i>Consultation</i> (konsultasi)	Meminta pendapat langsung dari masyarakat tentang pendidikan, tetapi tidak ada jaminan pendapat mereka akan diperhatikan dan diimplementasikan.	Masyarakat hanya sebagai bukti bahwa pemegang kebijakan telah memberdayakan masyarakat dalam pendidikan.
<i>Placation</i>	Masyarakat diberikan peluang untuk memberikan masukan tetapi bukan sebagai penentu kebijakan	Memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau pertimbangan

Tingkat partisipasi	Keterlibatan masyarakat	Tujuan
		dalam perencanaan pendidikan.
<i>Partnership</i> (kerjasama)	Pihak pemerintah, sekolah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam pelaksanaan pendidikan. Ada hubungan kerjasama yang dibangun untuk kepentingan pendidikan	Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, karena peran masyarakat dianggap sangat penting.
<i>Delegated power</i> (pelimpahan wewenang)	Dominasi kewenangan diberikan kepada masyarakat terhadap rencana program-program tertentu dalam pembangunan pendidikan	Masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam menjamin akuntabilitas program pendidikan.
<i>Citizen control</i> (control warga)	masyarakat sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kegiatan, kebijakan, dan aspek-aspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada <i>stakeholders</i>	Masyarakat memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan membangun pendidikan di daerah mereka.

Tingkat partisipasi	Keterlibatan masyarakat	Tujuan
	yang bisa membantu proses pelaksanaan program-program pendidikan.	

Mengacu pada tingkat pendidikan yang dipaparkan di atas, partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan pendidikan sekolah dasar berada pada tingkat *consultation* (konsultasi). Pihak sekolah atau pelaksana pendidikan meminta pendapat dari masyarakat secara langsung dengan cara mengundang masyarakat untuk rapat dan degar pendapat terkait dengan program pendidikan. Hal ini adalah suatu langkah yang logis menuju partisipasi yang penuh. Akan tetapi pada tingkat ini, tidak ada jaminan pendapat masyarakat bisa diperhatikan atau dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini adalah mengundang masyarakat dan orang tua untuk rapat menentukan suatu rencana program pendidikan. Pada tingkat ini sesungguhnya masyarakat dianggap sebagai abstraksi statistik semata, karena partisipasi hanya diukur dari frekuensi kehadiran dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh sekolah. Dengan demikian pemegang kebijakan telah merasa memiliki bukti bahwa mereka telah mengikuti rangkaian partisipasi masyarakat. Akan tetapi pendapat dan saran masyarakat jarang dilaksanakan oleh sekolah sebagai pelaksana pendidikan.

Pada tingkatan yang lebih tinggi masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal seperti memberikan pertimbangan dan memberikan ide, saran, dan kritik, namun pengaruh tersebut tidak dijamin akan diperhatikan oleh pengelola sekolah. Masyarakat memang memperoleh kesempatan untuk memberikan masukan atau mengusulkan beberapa rencana program pendidikan tetapi pemegang pengelola dan pelaksana pendidikan yang berwenang untuk menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan lembaga pendidikan. tingkat partisipasi yang dijelaskan di atas terjadi pada sekolah dasar negeri yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan pada tingkat *partnership* dan *delegated power* biasa terjadi pada sekolah-sekolah swasta yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Pada tingkat *partnership*, wewenang masyarakat disalurkan melalui negosiasi rencana program pendidikan antara sekolah dengan masyarakat. Antara masyarakat dan pelaksana pendidikan sama-sama sepakat untuk memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan atau proses pembangunan pendidikan. Aturan ditentukan melalui mekanisme *take and give*, sehingga segala hal yang terkait dengan proses pendidikan tidak mengalami perubahan sepihak tidak diputuskan sepihak oleh pengelola pendidikan itu sendiri.

*Partnership* dapat berjalan efektif apabila dalam masyarakat ada kekuatan yang terorganisir, memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang memahami maksud dan tujuan suatu organisasi

dilaksanakan. Dengan demikian masyarakat benar-benar memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga akan mampu mempengaruhi suatu proses yang akan dilaksanakan. Kaitanya dengan proses pembangunan pendidikan, peran masyarakat dianggap sangat penting dan sangat sentral, pengelola pendidikan sebagai pemegang kebijaka selalu berkomunikasi dan berdiskusi dalam rangka pengembangan program-program pendidikan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat pedesaan pada tingkat *partnership* membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan pendidikan demi tercapainya pendidikan yang bermutu. Negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan kepada masyarakat terhadap rencana atau program pendidikan. Pada tahap *delegated power*, masyarakat lebih banyak berperan dan bahkan memiliki kekuasaan dalam menentukan atau memutuskan suatu program-program pendidikan yang akan dilaksanakan. Selain itu masyarakat juga memegang peran penting dalam menjamin akuntabilitas program pendidikan tersebut.

Pada dasarnya masyarakat memiliki kekuatan untuk merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi proses pembangunan pendidikan. Dominasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di suatu desa/daerah biasanya terjadi pada pengelolaan sekolah-sekolah swasta yang bernaung di bawah kontrol tokoh masyarakat atau ketua-ketua pondok pesantren dan Tuan Guru. Masyarakat

diberikan kewenangan untuk ikut berpartisipasi dalam banyak program pengembangan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan. Karena madrasah pada dasarnya muncul dari ide dan permintaan masyarakat, itulah sebabnya masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan di madrasah yang direncanakan bersama.

Praktik partisipasi yang melibatkan langsung warga masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan sehingga akan terjalin sinergi antara orang tua, pemerintahan, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kepercayaan sebagai modal penting dalam pembangunan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat berperan melalui pengambilan keputusan, pengontrolan serta koordinasi untuk mempertahankan hak-hak sosialnya dalam proses peningkatan mutu pendidikan demi tercapainya pembangunan pendidikan yang baik.

#### **D. Partisipasi Komite Sekolah Dalam Praksis Pendidikan**

Telah disampaikan pada bab sebelumnya; Paradigma manajemen berbasis sekolah (MBS) memberikan alur dalam peningkatan mutu dan relevansi terwujudnya demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan

pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah *stakeholder* pendidikan yang memiliki kepentingan dari keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pengguna *output* pendidikan tersebut, sehingga sekolah-sekolah harus bertanggungjawab dan terhadap masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Dalam tatanan implementasi, entitas “masyarakat” sangat kompleks dan tak terbatas (*borderless*) sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, konsep masyarakat lebih disederhanakan agar mudah bagi sekolah sebagai pengelola pendidikan melakukan hubungan dengan masyarakat. Penyederhanaan konsep masyarakat dilakukan melalui “perwakilan” fungsi *stakeholder*, dengan jalan membentuk komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah merupakan representasi keragaman masyarakat yang ada dan mewakili masyarakat. Interaksi antara masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah. Dengan demikian, komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Mengacu pada pendapat Kasali dalam Wibisono (2007) dalam pengembangan pendidikan dukungan *stakeholders* harus dicari sehingga aktivitas

pendidikan akan berjalan dengan baik. Semakin kuat dukungan *stakeholders* makasemakin besar sekolah kekuatan sekolah dalam mengelolala. Kasali membagi *stakeholders* menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal.

*Stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan dalam sekolah. Misalnya guru, dan karyawan. Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang aktivitasnya berada di luar lingkungan sekolah, seperti komite sekolah, masyarakat, pemerintah, pers,tokoh, agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perusahaan atau donatur yang mendukung pengembangan pembangunan pendidikan.

Penataan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan telah dilembagakan oleh pemerintah dengan diterbitkanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Keberadaan komite sekolah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 8 menjelaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 9 menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 30 tahun 2003 pasal 8 dan 9 di atas menjelaskan bahwa dalam membangun pendidikan, masyarakat memiliki hak dan

kewajiban terlibat secara langsung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Sebagai representasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, akan diwakili oleh adanya komite sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga *non-profit* dan non-politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah dengan masyarakat (*stakeholder*) pendidikan, sebagai representatif dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

### **1. Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Pendidikan**

Komite sekolah merupakan perwakilan orang tua siswa di sekolah sebagai wadah yang di harapkan mampu menyatukan seluruh komponen sekolah demi tercapainya tujuan pembangunan pendidikan sesuai dengan konsep *community based school*. Komite sekolah berperan untuk menjembatani antara kepentingan sekolah dengan masyarakat, baik kepentingan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan maupun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan pendidikan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) nomor 20 tahun 2003, menjelaskan bahwa masyarakat diwakili oleh dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah yang berperan dalam:

- (1) Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah;
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis;
- (3) Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah).

Dalam konteks otonomi daerah, sekolah diharap lebih mandiri dalam meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian sekolah sangat perlu memberdayakan masyarakat melalui komite sekolah dengan bekerja sama memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada sehingga semua sumber daya berkembang secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Pemberdayaan komite sekolah yang merupakan

representasi orang tua dan masyarakat merupakan alternatif pengelolaan pendidikan dengan harapan akan mampu mendorong terwujudnya pembangunan pendidikan yang optimal.

Peran komite sekolah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (KEPMENDIKNAS) Nomor 044/U/2002, tanggal 2 april 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam keputusan tersebut dijelaskan peran komite sekolah dalam pembangunan pendidikan, yaitu: komite sekolah berperan sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan), dan *mediator agency* (mediator). Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, dan sebagai mediator pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Komite sekolah berfungsi sebagai pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, melakukan kerja sama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi masyarakat, memberikan masukan, mendorong orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan, baik pada sekolah dasar maupun madrasah yang secara langsung dikelola oleh masyarakat. Menurut Khaerudin dkk. (2007) "komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga *non-profit* dan *non-politis* yang dibentuk berdasarkan musyawarah dengan masyarakat (*stakeholder*) pendidikan, sebagai representatif dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan".

Komite sekolah adalah perwakilan orang tuadan masyarakat di sekolah merupakan wadah yang di harapkan bisa menyatukan seluruh komponen sekolah demi tercapainya tujuan pembangunan pendidikan sesuai dengan konsep MBS. Komite sekolah berperan untuk menjembatani antara kepentingan sekolah dengan masyarakat, baik kepentingan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan maupun yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendorong anaknya untuk aktif belajar di rumah maupun disekolah.

Komite sekolah terbentuk secara formal berdasarkan kesepakatan anatara pihak sekolah dengan masyarakat. karena komite sekolah

merupakan perwakilan dari orang tua murid. Kegiatan dan program komite sekolah terintegrasi dengan program yang dirancang oleh sekolah bersama masyarakat atau komite sekolah sebagai representasi masyarakat di sekolah.

Keberadaan komite sekolah menjadikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 8 yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 9 menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 30 tahun 2003 pasal 8 dan 9 di atas menjelaskan bahwa dalam membangun pendidikan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban terlibat secara langsung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Sebagai perwakilan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, akan diwakili oleh komite sekolah. Komite sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang komite sekolah. Keputusan tersebut menjelaskan peran

komite sekolah dalam pembangunan pendidikan. Komite sekolah berperan sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan), dan mediator.

Sinergi antara pengelola satuan pendidikan (dinas pendidikan terkait dan sekolah) dengan komite sekolah menimbulkan adanya tanggung jawab bersama antara sekolah sebagai mitra kerja dalam pembangunan pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Peran dan fungsi di atas dijabarkan secara rinci pada tabel di bawah ini dengan mengutip pendapat Hasbullah (2010) peran dan fungsi komite sekolah secara lebih rinci dapat gambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3 : Indikator Peran Komite Sekolah**

<b>Peran komite sekolah</b>	<b>Fungsi manajemen</b>	<b>Indikator kinerja</b>
<i>Advisory agency</i>	Perencanaan	a. Identifikasi sumber daya dalam masyarakat b. Memberikan masukan RAPBS c. Memberikan pertimbangan RAPBS
	Pelaksanaan	a. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah

<b>Peran komite sekolah</b>	<b>Fungsi manajemen</b>	<b>Indikator kinerja</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru - guru</li> <li>c. Memberikan masukan tentang sarana dan prasana di sekolah</li> </ul>
	Pembiayaan	Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dipergunakan oleh sekolah
<i>Supporting agency</i>	Sumber daya	Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah
	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantau kondisi sarana dan prasarana di sekolah</li> <li>b. Koordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah</li> </ul>
	Anggaran	Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah
<i>Controlling agency</i>	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan.</li> <li>b. Penilaian terhadap kualitas kebijakan di sekolah</li> <li>c. Pengawasan terhadap kualitas program pendidikan di sekolah</li> </ul>
	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan terhadap organisasi sekolah</li> <li>b. Pengawasan terhadap alokasi anggaran</li> </ul>

Peran komite sekolah	Fungsi manajemen	Indikator kinerja
		<p>pelaksanaan program pendidikan</p> <p>c. Pengawasan terhadap partisipasi sekolah</p>
	Output	<p>a. Penilaian terhadap hasil UN</p> <p>b. Penilaian terhadap partisipasi sekolah</p> <p>c. Penilaian terhadap angka mengulang.</p>
<i>Mediator agency</i>	Perencanaan	<p>a. Menjadi penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat dan orang tua</p> <p>b. Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat</p> <p>c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan di sekolah.</p>
	Pelaksanaan	<p>a. Sosialisasi kebijakan dan program pendidikan sekolah terhadap masyarakat</p> <p>b. Memfasilitasi masukan terhadap kebijakan program sekolah</p> <p>c. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah</p>

Peran komite sekolah	Fungsi manajemen	Indikator kinerja
	Sumber daya	2. Identifikasi sumber daya di sekolah. 3. Identifikasi sumber daya di masyarakat 4. Koordinasi bantuan dari masyarakat.

Otonomi pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan orang tua yang diwakili oleh komite sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam proses pelaksanaan pendidikan. Untuk menjalankan perannya maka komite sekolah memiliki beberapa fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan terdapat dalam pasal 196, maka komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik,

dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

**2. Bentuk Peran Komite Sekolah di Desa Jerowaru**

Pengelolaan pendidikan membutuhkan sinergi antara komite sekolah dengan sekolah, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Berdasarkan peran dan fungsi komite sekolah yang dijelaskan di atas, maka bentuk peran dan fungsi komite sekolah dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tanggal 2 april 2002 tentang komite sekolah dapat di gambarkandalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4 : Bentuk Peran Komite Sekolah dalam pendidikan**

No.	Peran Komite Sekolah	Peluang	Realitas Peran
1	<i>Advisory Agency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pertimbangan dalam RAPBS melalui rapat pembahsan RAPBS</li> <li>- Memberikan</li> </ul>	Peran komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan belum maksimal,

No.	Peran Komite Sekolah	Peluang	Realitas Peran
		<p>masuk terhadap proses pengelolaan pendidikan dan pembelajaran</p> <p>- Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah</p>	<p>alasan adalah sekolah lebih memahami program pendidikan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan pendidikan sehingga komite sekolah tidak perlu memberikan pertimbangan . Alasan berikutnya, komite sekolah tidak memiliki kemampuan sebagai pemberi pertimbangan . Program pendidikan dirancang sepenuhnya oleh pihak sekolah sesuai dengan</p>

No.	Peran Komite Sekolah	Peluang	Realitas Peran
			kebutuhan sekolah.
2	<i>Supporting Agency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sumber daya</li> <li>- Koordinasi dukungan sarana dan prasana</li> <li>- Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah</li> </ul>	Komite sekolah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pendidikan. Komite sekolah mendukung semua program pendidikan yang sudah dirancang oleh sekolah. Tetapi kadang komite sekolah tidak memahami peranya sebagai pendukung program.
3	<i>Controlling Agency</i>	- Kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan dengan mengawasi proses perencanaan	Sebagai agen pengontrol pendidikan, komite sekolah tidak langsung

No.	Peran Komite Sekolah	Peluang	Realitas Peran
		<p>pendidikan dan pengambilan keputusan di sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan terhadap kualitas perencanaan dan kualitas program sekolah.</li> <li>- Pengontrolan terhadap pelaksanaan program sekolah, termasuk partisipasi masyarakat terhadap program sekolah.</li> <li>- Kontrol <i>output</i> pendidikan diantaranya adalah penilaian hasil UN</li> </ul>	<p>mengontrol pelaksanaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sekolah tanpa melakukan kontrol.</p>
4	<i>Mediator agency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat</li> <li>- Identifikasi aspirasi masyarakat</li> <li>- Sosialisasi kebijakan dan</li> </ul>	<p>komite sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat dan orang</p>

No.	Peran Komite Sekolah	Peluang	Realitas Peran
		program sekolah kepada masyarakat - Memfasilitasi masukan terhadap program pendidikan. - Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan disekolah maupun pemerintah. - Mobilisasi bantuan masyarakat untuk sekolah.	tua. Disamping itu komite sekolah juga dapat sebagai penghubung antara sekolah dengan tokoh masyarakat dan pemerintah Desa Jerowaru dan Kecamatan Jerowaru. Namun pada kenyataannya peran tersebut tidak berjalan secara optimal.

Peran komite sekolah dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru yang dipaparkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa beberapa fungsi dan peran komite sekolah masih lemah. Peran komite sekolah sebagai pengawas terlihat paling lemah karena komite sekolah belum memahami peran dan fungsinya dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran komite sekolah masih lemah dan tidak ada sosialisasi pemerintah tentang peran dan fungsi

komite sekolah sehingga menimbulkan ketidakfahaman pada masyarakat terutama komite sekolah. Gambaran peran komite sekolah dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a) Peran komite sekolah sebagai *advisory* (pemberi pertimbangan)

Peran komite sekolah sebagai *advisory agency* memberikan kesempatan kepada komite sekolah untuk memberikan berbagai pertimbangan dalam pembangunan pendidikan. temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran masyarakat sebagai pemberi pertimbangan dalam pembangunan pendidikan masih belum maksimal. Komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat sebagian besar hanya mengikuti program pendidikan yang diajukan oleh kepala sekolah, komite sekolah jarang memberikan pertimbangan, bahkan komite sekolah hanya menyetujui apa yang diusulkan oleh pihak sekolah, seperti yang disampaikan oleh seorang komite sekolah SDN 3 Jerowaru bahwa komite sekolah hanya menyetujui atau tidak menyetujui rencana program pendidikan yang dirancang oleh pihak sekolah, komite sekolah belum berperan memberikan pertimbangan rancangan program tersebut, dan hanya sebatas menyetujui saja. Beliau menjelaskan, untuk merancang kegiatan-kegiatan sekolah cukup dilakukan oleh pihak sekolah.

Alasan komite sekolah memberikan kebebasan kepada pihak sekolah merancang program pendidikan karena pihak sekolah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh sekolah dan bagaimana sekolah melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagai komite sekolah mereka beralasan tidak memiliki kesempatan untuk ikut merancang program kegiatan pendidikan, cukup pihak sekolah yang merencangnya, komite sekolah hanya akan menyetujui atau tidak rancangan program tersebut. Padanangan komite sekolah tersebut menggambarkan bahwa komite sekolah belum memahami peranya dalam perencanaan program pendidikan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 8 dan 9 yaitu komite sekolah terlibat secara langsung mulai dari perencanaan sampai pengawasan pelaksanaan program pendidikan.

Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru masih belum maksimal disebabkan karena komite sekolah belum memahami peranya sebagai perwakilan masyarakat. Secara umum komite sekolah di Desa Jerowaru hanya sebagai perwakilan masyarakat yang bersifat formalitas, mereka tidak memahami secara mendalam apa yang harus mereka lakukan untuk sekolah dan

bagaimana mereka aktif dalam memberikan pertimbangan. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kemampuan komite sekolah dalam memberikan pertimbangan program pendidikan adalah tingkat pendidikan yang rendah dan kesempatan komite sekolah untuk aktif di sekolah belum maksimal. Komite sekolah datang ke sekolah jika kepala sekolah mengundang dalam rapat-rapat tertentu dan tidak rutin dilaksanakan. Itulah yang menyebabkan peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan rancangan program pendidikan belum maksimal.

Komite sekolah dalam fungsi perencanaan pendidikan memiliki peran mengidentifikasi sumberdaya pendidikan serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan program pendidikan. dalam pelaksanaan program pendidikan, komite sekolah berperan sebagai badan penasehat berperan penting dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan program pembangunan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan termasuk proses belajar mengajar. Dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), saran pendidikan, dan alokasi anggaran pendidikan, komite sekolah dapat memberikan pertimbangan sebagai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan.

Dapat ditegaskan bahwa tugas dan fungsi utama komite sekolah adalah memberikan masukan, *advisory* (pertimbangan), dan merekomendasikan kepada pihak sekolah apa yang menjadi kebutuhan sekolah untuk perbaikan pendidikan dalam rangka pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru. Penjelasan kepala SDN 1 dan SDN 3 Jerowaru tergambar bahwa tugas dan fungsi utama yang harus dilakukan oleh komite sekolah adalah memberikan bantuan kepada sekolah, berupa pemikiran dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dalam proses perkembangan pembangunan pendidikan.

Komite sekolah yang merupakan representasi dari masyarakat berkedudukan sebagai mitra sekolah dalam proses pelaksanaan pendidikan. Tugas utama komite sekolah adalah membangun kerja sama dengan sekolah dengan memberikan masukan, pertimbangan, dan memberikan ide-ide untuk kemajuan sekolah.

- b) Peran komite sekolah sebagai *supporting agency* (pendukung kegiatan)

Komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa berperan sebagai *supporting agency* (pendukung kegiatan), dalam perannya sebagai pendukung kegiatan, komite sekolah akan mendapat gambaran yang utuh mengenai

persoalan pendidikan yang dihadapi di Desa Jerowaru. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Jerowaru; pengelolaan pendidikan di Desa Jerowaru terkendala dengan masalah distribusi guru yang tidak merata dan tidak proporsional sehingga pada beberapa sekolah terjadi kekurangan guru, kemudian kepala sekolah belum memiliki rancangan program pendidikan.

Komite sekolah dalam peranya sebagai *supporting* agency dapat berkoordinasi dengan dewan pendidikan sehingga permasalahan kekurangan tenaga pendidik yang dihadapi oleh beberapa sekolah yang ada di Desa Jerowaru bisa didiskusikan agar tidak mengganggu kelancaran proses pembangunan pendidikan melalui pemerataan tenaga pendidik. Komite sekolah kemudian dapat menindak lanjuti dan memberdayakan masyarakat yang memiliki kompetensi untuk di berdayakan menjadi guru sukarela. Kemudian sarana pendidikan merupakan bagian terpenting dalam proses pengelolaan pendidikan sehingga sarana pendidikan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh komite sekolah. Komite sekolah memfasilitasi kebutuhan sarana pendidikan dan memberdayakan masyarakat untuk membantu sekolah dalam melengkapai sarana pendidikan tersebut.

Dalam implementasinya peran komite sekolah sebagai *supporting agency* (pendukung kegiatan pendidikan) di Desa Jerowaru dapat digambarkan sebagai berikut; masyarakat Desa Jerowaru ikut berpartisipasi dalam perencanaan pendidikan, yaitu masyarakat ikut serta dalam perencanaan pendidikan dengan mengikuti rapat-rapat dalam merencanakan program pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan masyarakat biasanya diwakili oleh komite sekolah. Komite sekolah sebagai refresentasi wali murid biasanya mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka membahas rencana pengembangan pendidikan yang diprogramkan oleh pihak sekolah.

Komite SDN 2 Jerowaru menambahkan bahwa dari segi pembangunan di SDN 2 Jerowaru, masyarakat hanya bisa membantu dengan tenaga melalui gotong royong secara sukarela, hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi masyakat masih rendah, sehingga tidak mampu berpartisipasi dalam bentuk uang. Dari penjelasan ketua Komite sekolah SDN 2 Jerowaru tersebut dapat digambarkan bahwa, komite memberikan kontribusi positif dalam *supporting* (mendukung pelaksanaan pendidikan), mereka berpartisipasi dan aktif dalam pelaksanaan pendidikan melalui rapat-

rapat komite yang dilaksanakan di sekolah, kemudian komite sekolah ikut mengawasi pelaksanaan pendidikan dan memberikan masukan jika sekolah membutuhkan.

- c) Peran komite sekolah sebagai *controlling agency* (pengontrol kegiatan)

Peran komite sekolah sebagai *controlling agency* merupakan bagian yang terpenting dalam pengelolaan pendidikan. Komite sekolah menjadi agen pengontrol kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Sebagai agen pengontrol pendidikan komite sekolah memiliki fungsi yang dapat dilakukan antara lain yaitu:

- a. komite sekolah dapat melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- b. komite sekolah dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program kegiatan sekolah, apakah telah sesuai dengan rencana dan kesepakatan bersama, komite sekolah dapat mengontrol alokasi dana dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- c. komite sekolah dapat melakukan pemantauan terhadap penilaian hasil akhir

ujian sekolah dan ujian nasional dan akan menjadi masukan bagi dewan pendidikan untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai *controlling agency* di Desa Jerowaru tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Hasil wawancara peneliti dengan ketua komite sekolah menunjukkan bahwa komite sekolah tidak pernah mengontrol proses pelaksanaan program pendidikan. Komite sekolah hanya berperan memberikan masukan dan menyetujui apa rencana program yang sudah dirancang draftnya oleh sekolah. Dalam proses implementasi komite sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola satuan pendidikan untuk melaksanakan program pendidikan yang sudah disepakati bersama.

Komite sekolah tidak langsung mengontrol atau memantau pelaksanaan program kegiatan pendidikan, komite sekolah tidak memberikan kontrol terhadap hasil akhir atau hasil ujian baik ujian sekolah maupun ujian nasional. Sehingga komite sekolah tidak mengetahui secara baik apa yang menjadi inti permasalahan pendidikan yang dilaksanakan di Desa Jerowaru. Hasil wawancara dengan kepala SDN 3 Jerowaru menunjukkan bahwa komunikasi dengan komite

sekolah tetap berjalan dengan baik, namun komite sekolah tidak mengerti dengan tugas dan kewajibannya disekolah. Itulah sebabnya pihak sekolah memberikan pemahaman tentang apa sebenarnya peran komite sekolah dan apa fungsi komite sekolah. Menurut Kepala SDN 3 Jerowaru, komite sekolah tidak memiliki inisiatif sendiri, tetapi jika pihak sekolah mempunyai program dan di sampaikan kepada komite sekolah maka akan disambaut dengan baik dan dapat dilaksanakan.

Kaitanya dengan peran komite sebagai kontrol kegiatan, Kepala SDN 3 Jerowaru menjelaskan bahwa komite sekolah jarang melakukan kontrol terhadap program kegiatan yang dilakukan, komite sekolah bersifat pasif dan hanya menerima hasil dari program kegiatan yang dilaksanakan. Komite sekolah tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, apa peran dan fungsinya dan bagaimana mereka akan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan.

- d) Peran komite sekolah sebagai *mediator agency* (mediator)

Dalam kaitannya dengan fungsi manajemen pendidikan, koordinasi, kerlibatan, serta partisipasi merupakan kegiatan yang penting dalam pendidikan. Pada level tingkat satuan

pendidikan, Komite Sekolah dapat berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan dinas pendidikan atau UPTD DIKPORA. Berbagai persoalan yang sering dialami masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dapat diatasi dengan adanya komite sekolah. Keberadaan komite sekolah sangat penting dalam mengurangi berbagai persoalan pendidikan terutama kaitanya dengan hubungan antara masyarakat, orang tua dan pemerintah.

Peran komite sekolah sebagai mediator yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap program pendidikan yang ditetapkan. Peran komite sekolah sebagai mediator antara lain yaitu dengan mengkomunikasikan berbagai permasalahan dan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan. Masukan komite sekolah tentu akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan berikutnya. Kemudian hasil penyempurnaan kebijakan dan program pendidikan yang sudah dilaksanakan harus disosialisasikan kepada masyarakat dan orang

tua siswa sehingga terjadi timbal balik bagi keberhasilan pelaksanaan program pendidikan yang sudah direncanakan.

Peran komite sekolah sebagai mediator berfungsi sebagai penghubung sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan dinas pendidikan, sekolah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, masyarakat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta sekolah dengan *stakeholders*. Peran komite sekolah sebagai mediator dalam pelaksanaan program pendidikan yaitu upaya untuk memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat dan orang tua terhadap program pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah dan masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengkomunikasikan keluhan masyarakat terhadap kondisi dan kebijakan sekolah. Sehingga masukan tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh sekolah untuk menentukan kebijakan-kebijakan program pendidikan berikutnya.

### **3. Tingkat Partisipasi Komite Sekolah di desa Jerowaru**

Tingkat Partisipasi komite sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di Desa Jerowaru berada pada tingkat *consultation* (konsultasi). Komite sekolah berperan sebagai tempat konsultasi beberapa

rancangan program kegiatan pendidikan yang di rancang oleh pengelola sekolah. Komite sekolah tidak banyak memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pendidikan disebabkan komite sekolah belum memahami fungsi dan peranya secara utuh.

Pada tingkat *consultation* komite sekolah hanya sebagai tempat meminta pendapat dan persetujuan jika program pendidikan sudah dirancang oleh pengelola sekolah. *Consultation* dilakukan dengan meminta komite sekolah untuk menyetujui atau tidak rancangan program yang sudah disusun oleh pengelolal pendidikan itu sendiri, hal tersebut dilakukan melalui rapat (musyawarah) sekolah-komite. Pada dasarnya langkah yang dilakukan ada nilai positifnya karena sudah menuju tingkat partisipasi yang penuh oleh komite sekolah, hanya saja masih belum memahami secara penuh, parena dan fungsi dari komite tersebut.

Seperti halnya tingkat partisipasi pada warga masyarakat Desa Jerowaru; pada tingkat *consultation* tidak menjamin pendapat komite sekolah bisa diperhatikan atau dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan. Pada tingkat *consultation* sesungguhnya komite sekolah dianggap sebagai abstraksi statistik, karena partisipasi hanya diukur dari frekuensi kehadiran dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh sekolah.

Dalam pelaksanaan pendidikan beberapa komite sudah memberikan kontribusi dalam beberapa hal seperti memberikan pertimbangan dan memberikan ide, saran, dan kritik, namun pengaruh tersebut tidak dijamin akan diperhatikan oleh pengelola sekolah. Walaupun komite sekolah memperoleh kesempatan untuk memberikan pertimbangan pada beberapa rencana program pendidikan, namun pengelola dan pemegang kebijakan pendidikan tidak terlalu memperhatikan masukan dan kritik dari komite sekolah, segala keputusan pengelolaan pelaksanaan pendidikan diputuskan oleh pemegang kebijakan dalam hal ini adalah Kepala sekolah pada tingkat satuan pendidikan, dan UPTD DIKPORA pada tingkat Kecamatan. tingkat partisipasi yang dijelaskan di atas terjadi pada sekolah dasar negeri yang dikelola oleh pemerintah.

#### **4. Permasalahan Komite Sekolah dalam Praksis Pendidikan**

Peran Komite sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002, tanggal 2 april 2002 adalah sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan), dan *mediator agency* (mediator). Untuk mencapai tujuan pendidikan maka keempat peran komite sekolah di atas harus dilaksanakan dan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Peran komite sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di Desa Jerowaru kurang maksimal. Persoalan di lapangan yang terjadi adalah komite sekolah sebatas formalitas, karena komite sekolah belum mengetahui peran dan fungsinya dalam pendidikan. Hal ini merupakan suatu permasalahan dalam pengelolaan pendidikan. Permasalahan-permasalahan komite sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat dan orang tua pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru di gambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5 : Permasalahan Komite sekolah dalam Pembangunan Pendidikan**

<b>Peran Komite sekolah</b>	<b>Kondisi di lapangan</b>	<b>Permasalahan</b>
<i>Advisory agency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite sekolah belum sepenuhnya memberikan pertimbangan terhadap perencanaan program pendidikan.</li> <li>- Komite memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang program kegiatan tanpa ikut mempertimbangkan ya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite sekolah menganggap perencanaan program pendidikan cukup dipertimbangkan oleh pihak sekolah</li> <li>- Tidak memiliki waktu yang cukup untuk terlibat langsung</li> </ul>

Peran Komite sekolah	Kondisi di lapangan	Permasalahan
		dalam memberikan pertimbangan
<i>Supporting agency</i>	- Komite sekolah memberikan dukungan terhadap program pendidikan	SDM yang belum kuat untuk mendukung program pembangunan pendidikan yang direncanakan oleh sekolah
<i>Controlling agency</i>	- Komite sekolah tidak sepenuhnya memberikan kontrol terhadap proses pelaksanaan program pendidikan	Komite sekolah belum memahami peran dan tugasnya sebagai pengontrol (pengendali mutu pendidikan)
<i>Mediator agency</i>	- Komite sekolah tidak efektif sebagai mediator pelaksanaan pendidikan	Komite sekolah belum memahami peran sebagai mediator

Data di atas menggambarkan bahwa peran komite sekolah belum menunjukkan efektivitas yang maksimal. Komite sekolah belum menunjukkan *performance* sesuai dengan peran dan fungsinya dengan baik. Komite sekolah mengalami kesulitan

dalam melaksanakan peranya, karena belum memiliki kecakapan yang mendukung peranya sebagai wakil masyarakat dan orang tua di sekolah. Hal ini disebabkan karena rata-rata tingkat pendidikan masyarakat hanya tamat sekolah dasar. Selain itu minimnya proses seleksi perekrutan pengurus komite sekolah yang dilakukan oleh sekolah menjadi salah satu faktor timbulnya permasalahan yang dialami oleh komite sekolah.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan atau program pendidikan, mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, mengontrol program dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah, dan sebagai mediator antara sekolah dengan pemerintah, sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan masyarakat dengan tokoh agama dan masyarakat. disamping itu, komite sekolah berfungsi untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pembangunan pendidikan, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi masyarakat, memberikan masukan kepada sekolah, mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan pendidikan, dan melakukan evaluasi.

Dalam pelaksanaan pendidikan di Desa Jerowaru keberadaan komite sekolah cenderung sebagai badan legalitas dan formalitas sebagai prasyarat mencukupi struktur sekolah. Disamping itu komite sekolah tidak mengetahui peran dan fungsinya dengan baik, seperti yang disampaikan oleh kepala SDN 3 Jerowaru, Kepala SDN 1 Jerowaru, dan Kepala SDN 11 Jerowaru; keberadaan komite sekolah hanya bersifat formalitas, karena komite sekolah kurang memahami peranya dan fungsinya disekolah. Peran komite sekolah di Desa Jerowaru hanya sebatas memberikan persetujuan jika kepala sekolah mengundang rapat, komite sekolah jarang memberikan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh sekolah, komite sekolah juga tidak melakukan monitoring pelaksanaan program, semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk mengelola. Tidak ada upaya untuk ikut memberikan kontrol terhadap program kegiatan tersebut. Dalam peranya sebagai pendukung kegiatan komite sekolah yang ada di Desa Jerowaru dapat dikatakan sudah cukup bagus, karena komite sekolah selalu mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, akan tetapi komite sekolah sebatas mendukung kegiatan tersebut.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan misalnya orang tua siswa, masyarakat, dan guru kurang mengetahui fungsi dan peran komite sekolah. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jerowaru dapat digambarkan bahwa masyarakat dan komite sekolah kurang mengetahui dan memahami peran dan fungsinya. Tidak sedikit dari masyarakat beranggapan bahwa komite sekolah hanya sebagai perwakilan orang tua jika orang tua tidak dapat hadir dalam rapat-rapat disekolah. Hal ini menunjukkan sosialisasi dan pemberian pemahaman terhadap masyarakat pentingnya peran dan fungsi komite sekolah belum terlaksana dengan baik.

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti terkait dengan masalah yang dihadapi oleh komite sekolah dalam proses pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru ditemukan terdapat tiga masalah pokok masalah yang menjadi penyebab peran komite sekolah tidak berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut dikemukakan sebagai berikut yaitu (1) proses pembentukan dan atau pemilihan pengurus komite sekolah yang belum sepenuhnya sesuai dengan Panduan Umum komite sekolah. Dalam pemilihan pengurus komite sekolah kebanyakan menggunakan sistem tunjuk, artinya kepala sekolah menunjuk langsung kepengurusan komite sekolah, pembantuan kepengurusan tidak

melalui mekanisme musyawarah; (2) pemahaman masyarakat tentang kedudukan, peran, dan fungsi komite sekolah masih rendah, masyarakat tidak memahami empat peran dan fungsi komite sekolah yang merupakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Komite Sekolah masih dipandang sebagai penjelmaan dari BP3, dengan peran dan fungsi yang sama saja; (3) kapasitas dan kemampuan komite sekolah yang masih belum memadai. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan komite sekolah Desa Jerowaru, sebagian besar ketua dan pengurus komite sekolah merupakan hanya lulusan Sekolah Dasar. Ketiga masalah tersebut sebenarnya merupakan masalah yang saling kait-mengait, saling berpengaruh, dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

#### **E. Peran Tuan Guru di Desa Jerowaru**

Istilah Tuan Guru digunakan oleh masyarakat Lombok saja sehingga belum populer dikalangan masyarakat Indonesia secara umum karena istilah Tuan Guru merupakan istilah lokal yang sering digunakan oleh masyarakat sasak. Tuan Guru bagi masyarakat Lombok diberikan sebagai julukan dipergunakan bagi seseorang yang pandai dalam bidang agama Islam dan fasih membaca serta menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits, pandai membaca kitab kuning, mempunyai pengetahuan luas tentang ilmu-ilmu ke-Islaman, seperti *fiqh*, *tauhid*, *tafsir*,

*hadits, tasawuf, tarikh, nahwu-sarf, dan ilmu-ilmu falak, mantiq, hikmah,* serta menjadi panutan masyarakat setempat. Istilah Tuan Guru sama halnya dengan sebutan *kyai* di daerah lain seperti Jawa, kemudian Bugis menggunakan istilah *anregurutta*.

Tuan Guru diartikan berbeda dengan tokoh masyarakat lainnya, seperti tokoh adat, politik atau pemerintahan, maupun tokoh-tokoh lain, karena Tuan Guru memiliki karakteristik tersendiri dan tanggung jawab yang berbeda. Tuan Guru memiliki fungsi dan tanggung jawab yang kompleks terhadap masyarakat, Tuan Guru lebih dikenal sebagai tokoh atau pemuka agama, karena setiap perilakunya dilandaskan pada ajaran agama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, kemudian membantu masyarakat untuk mengatasi setiap persoalan hidupnya Badrun dan Ngongu (1994). Peran Tuan Guru dalam masyarakat disesuaikan dengan perubahan sosial, budaya, dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan status Tuan Guru diperoleh karena memiliki keahlian pada bidang agama Islam, memiliki integritas moral, kemampuan untuk mengajar masyarakat umum, dan berkhotbah.

Kemampuan khusus yang dimiliki Tuan Guru sebagai sumber *barakah* dalam masyarakat dapat menentukan statusnya dalam masyarakat, maupun kehidupan bersama, karena status Tuan Guru merupakan bentuk dari penentuan dari perannya dalam masyarakat, baik hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya, maka status Tuan Guru dengan pengetahuan, kemampuan, dan

keahlian keagamaan dimilikinya menempati suatu strata yang lebih tinggi dibandingkan strata lainnya pada masyarakat

Keberadaan Tuan Guru sebagai tokoh di tengah-tengah masyarakat Desa Jerowaru memiliki pengaruh yang cukup besar, peran Tuan Guru sangat penting dalam pengembangan sosial masyarakat secara efektif, sehingga pemerintah Desa Jerowaru menaruh harapan besar kepada Tuan Guru sebagai aktor untuk menjadi pendorong dan penggerak pembangunan pendidikan melalui fungsi sosialnya.

Tugas Tuan Guru tidak hanya terpaku pada ilmu keagamaan yang dimiliki untuk ditransmisikan atau ditransferkan semata, tetapi peran Tuan Guru dalam sosial kemasyarakatan pada masyarakat Desa Jerowaru sebagai salah satu tokoh penting bagi pembangunan pendidikan melalui partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan posisi dan kedudukan tersebut, Tuan Guru menjadi alternatif dalam pengembangan pembangunan pendidikan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri, dan sekaligus pusat pengembangan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada nilai.

Gelar Tuan Guru merupakan gelar kepada seseorang oleh masyarakat lombok secara umum yang diberikan oleh masyarakat dengan beberapa kriteria diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, seseorang akan diberi gelar Tuan Guru oleh masyarakat jika sudah memiliki tingkatan ilmu agama yang cukup tinggi, sudah melakukan ibadah haji,

dan kharismatik. Gelar Tuang Guru yang seperti ini merupakan gelar ketokohan yang yang diberikann oleh masyarakat setempat dan aan diakui oleh masyarakat lain disekitarnya. *Kedua*, sesorang akan dipanggil Tuan Guru berdasarkan keturunanya, seseorang akan dipanggil Tuan Guru karena dia adalah salah satu keturunan Tuang Guru yang ditokohkan di daerah tersebut, akan tetapi gelar Tuan Guru tidak otomatis melekat pada anak yang di tokohkan, akan tetapi tetep memiliki kriteria-kriteria yang nantinya akan membuat dia diangkat menjadi Tuan Guru. *Ketiga* seseorang diangkat menjadi Tuan Guru jika dia sering membuka pengajian "*majlis ta'lim*", pengajian-pengajian umum yang dilakukan untuk masyarakat. Tuan Guru mampu menjadi panutan bagi masyarakatnya yang menjadi pengikutnya, dia mampu membangun sebuah susasana sosial yang *regligius* dan mampu membangun suatu hubungan sosial yang harmonis.

Gelar Tuan Guru tidak diterima melalui proses formal, atau gelar Tuan Guru tidak didapat melalui proses pendidikan formal, gelar Tuan Guru akan melekat pada seseorang jika dia sudah dianggap tokoh oleh masyarakat terutama ketika dia mampu menjadi panutan bagi masyarakatnya. Pengangkatan seorang Tuan Guru khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan dari mana asalnya belum banyak terungkap, karena hampir setiap Tuan Guru, dan elemen-elemen penting masyarakat memberikan penjelasan yang selalu berbeda.

Beberapa pandangan masyarakat tentang Tuan Guru di atas dapat dimaknai sebagai berikut: *pertama*, Tuan Guru sebagai guru, dalam arti pimpinan, pengasuh, dan figur lembaga pendidikan agama (pondok pesantren); *kedua*, Tuan Guru diartikan sebagai pemuka, bila ditokohkan oleh masyarakat, karena memiliki pengetahuan keagamaan, terdidik dan menjadi alumni lembaga pendidikan, seperti masjid, langgar, dan pondok pesantren secara sistematis, dan *ketiga*, Tuan Guru diartikan sebagai mubaligh atau guru mengaji dengan lingkup masyarakatnya.

Pandangan tentang Tuan Guru tersebut, dapat dijelaskan bahwa Tuan Guru sebagai pimpinan, dalam hal ini sebagai pemimpin pada pondok pesantren, dimana yang bersangkutan mutlak mengendalikan semua program yang telah dicanangkan dalam menentukan gerak langkah yang hendak dijalankan sesuai dengan keahliannya. Tuan Guru bersama masyarakat menciptakan dan mendukung berlakunya norma yang seharusnya berlaku bagi masyarakat. Selain itu, Tuan Guru selalu mengusahakan penyesuaian kehidupan masyarakatnya dengan perkembangan tuntutan perubahan zaman, demikian kuatnya peran dan wewenang yang dimiliki oleh Tuan Guru di Desa Jerowaru, sehingga kiprah Tuan Guru cenderung ikut memberikan corak tersendiri bagi pola hidup masyarakatnya.

Tuan Guru di Desa Jerowaru mengelola sebuah Pondok Pensantren yang dibangun bersama-sama dengan masyarakat setempat, pembangunan Pondok Pesantren

tersebut dibangun berdasarkan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah tuntutan kemajuan zaman yang mengharuskan penanaman ilmu agama bagi generasi muda harus segera dilakukan karena tantangan kedepan akan merusak iman generasi muda. Berikutnya pembangunan Pondok Pesantren berbasis agama selalu mengikuti perkembangan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Proses pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren mengacu pada perkembangan kurikulum yang diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga sistem pembelajaran yang berlaku di Pondok Pesantren mengacu pada sistem pendidikan nasional dan mengikuti sistem evaluasi dengan mengikuti UN yang diselenggarakan oleh pemerintah.

### **1. Tuan Guru Sebagai Tokoh masyarakat**

Tokoh-tokoh masyarakat di Desa Jerowaru (Tuan Guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) mempunyai pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena tokoh masyarakat memiliki keunggulan, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, dan secara langsung dari keturunan. Seseorang akan ditokohkan jika memiliki keunggulan lebih dari masyarakat yang lain.

Secara umum tokoh masyarakat Desa Jerowaru merupakan tokoh masyarakat informal. Tokoh masyarakat informal menurut salah satu tokoh masyarakat adalah salah seorang masyarakat yang diangkat dan ditunjuk atas persetujuan dari masyarakatnya. Tokoh masyarakat informal yang

dimaksud adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai integritas tinggi, memiliki kemampuan agama yang lebih dari masyarakat yang lain, dan memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat, serta lebih terbuka dalam memberikan kebijakan dan kewenangan. Tokoh masyarakat biasanya memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, secara kultural mereka memiliki kekuatan yang bisa menggerakkan masyarakat untuk salah satu tujuan, misalnya menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru. Sebagai contoh jika ada permasalahan antara masyarakat dengan pengelola pendidikan yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah dan masyarakat, maka disinilah peran Tuan Guru sebagai tokoh untuk menyelesaikan masalah pendidikan tersebut.

Dalam perkembangan pembangunan pendidikan Tuan Guru sebagai tokoh dalam kehidupan sehari-hari menduduki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat, artinya selain menjadi figur, juga menjadi pusat solidaritas (*center of solidarity*). Di samping sebagai pendidik dan pembimbing masyarakat, Tuan Guru sebagai tokoh masyarakat memiliki hubungan sangat erat dengan masyarakat Desa Jerowaru.

Gelar Tuan Guru merupakan suatu penghormatan yang diberikan oleh masyarakat dan

perhormatan tersebut dipertanggung jawabkan, bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Tuan Guru sesuai dengan tulisan Horikoshi (1987) bahwa fungsi tuan guru adalah Tuan Guru sebagai pengajar dalam masyarakat, dia adalah orang yang ahli dalam hukum islam, dan berpotensi dalam mengembangkan pendidikan. Peran dan fungsi Tuan Guru di Desa Jerowaru dapat deskripsikan sebagai berikut:

- 1) Tuan Guru sebagai pengajar di masyarakat  
Fungsi Tuan Guru yang paling menonjol di Pulau Lombok adalah sebagai pendidik yang diwujudkan melalui lembaga pendidikan yang dinamakan pondok pesantren atau yayasan. Umumnya hampir semua Tuan Guru yang ada di pulau Lombok membangun pondok pesantren sebagai tempat mengajar masyarakat. Pondok pesantren yang dibangun oleh Tuan Guru umumnya sebagai tempat belajar ilmu-ilmu agama melalui pengajian yang dilaksanakan secara rutin oleh Tuan Guru.

Melalui pondok pesantren umumnya mengembangkan keilmuannya dengan mengajarkan kitab kuning (*al-kutub al-shafra*) atau juga dikenal dengan kitab klasik (*al-kutub al-qadimah*) atau lebih populer disebut dengan kitab gundul. Tuan Guru dalam kehidupan masyarakat pondok pesantren harus dihormati,

seperti termaktub dalam kitab "*Ta'lim al muta'allim fi thariq al ta'allum*", bahwa ilmu adalah sesuatu yang kamu ambil dari *lisan rijal* (pengajar atau guru), karena mereka telah menghafal bagian yang paling baik dari mereka dengar dan menyampaikan bagian yang paling baik dari yang pernah mereka hafal.

Tuan Guru sebagai tokoh masyarakat merupakan figur panutan masyarakat. Bagi masyarakat Desa Jerowaru pendapat dan nasehat Tuan Guru akan menjadi acuan dan pegangan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga aktifitas Tuan Guru menjadi tolak ukur bagi kehidupan masyarakat Desa Jerowaru. Keberadaan Tuan Guru sebagai tokoh masyarakat di tengah-tengah masyarakat Desa Jerowaru memiliki pengaruh yang cukup besar, Tuan Guru dianggap telah mampu memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat secara efektif, sehingga pemerintah Desa Jerowaru menaruh harapan besar kepada Tuan Guru sebagai aktor untuk menjadi pendorong dan penggerak pembangunan pendidikan melalui fungsi sosialnya. Tugas Tuan Guru tidak hanya terpaku pada ilmu keagamaan yang dimiliki untuk ditransmisikan atau ditransferkan semata, tetapi diarahkan untuk memperluas fungsi sosial kemasyarakatannya pada

masyarakat Desa Jerowaru sebagai salah satu pusat penting bagi pembangunan pendidikan melalui partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan posisi dan kedudukan tersebut, Tuan Guru menjadi alternatif dalam pengembangan pembangunan pendidikan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri, dan sekaligus pusat pengembangan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada nilai.

## 2) Peran Tuan Guru dalam Pengembangan Pendidikan

Tuan Guru sebagai pusat orientasi nilai dan moral ikut bertanggung jawab dalam proses pencerdasan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, sedangkan secara khusus Tuan Guru bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masyarakat pada suatu daerah dimana ia berada. Tanggung jawab demikian mengacu pada pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan perubahan dan kondisi masyarakat. Dari titik pandang ini, Tuan Guru secara kelembagaan maupun inspiratif, memilih model yang diterapkan dalam mendukung secara penuh tujuan dan hakikat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin yang sejati, memiliki kualitas moral dan intelektual.

Pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Secara implisit Tuan Guru memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam proses pembangunan pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat. Peran Tuan Guru adalah menggagas pembangunan dibidang pendidikan, kemudian dikembangkan melalui lembaga pendidikan Pondok Pesantren sebagai implementasinya, sehingga konsep gagasan bidang pendidikan sangat diperlukan, dan diwujudkan dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Peran Tuan Guru dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru sangat sentral, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuan Guru tidak terlibat langsung dalam proses pendidikan tersebut, tetapi Tuan Guru aktif dalam membina dan memberikan pemahaman kepada masyarakat manfaat pendidikan bagi kehidupan dimasa yang akan datang. Peran Tuan Guru dalam pembangunan pendidikan adalah sebagai motivator bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh kepala SDN 3 Jerowaru bahwa Tuan Guru tidak langsung aktif

disekolah tetapi Tuan Guru berperan aktif dalam membina masyarakat dengan memberikan dorongan moral dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terus berpartisipasi dalam membangun pendidikan di Desa Jerowaru.

## **2. Tuan Guru Sebagai Tokoh dalam Pendidikan**

Keterlibatan Tuan Guru sebagai tokoh dalam pendidikan di Desa Jerowaru mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pendidikan, pengaruh Tuan Guru sebagai tokoh perubahan pendidikan sangat kental dengan kondisi sosial masyarakat yang menganggap Tuan Guru adalah seorang tokoh masyarakat yang harus dihargai dan di dengar, sehingga apapun yang disampaikan oleh Tuan Guru akan sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat setempat. Keterlibatan Tuan Guru sebagai tokoh dalam pembangunan secara non formal, sebagian besar tokoh masyarakat Desa Jerowaru tidak terlibat dalam proses pendidikan secara formal, misalnya tokoh masyarakat tidak masuk dalam susunan kepengurusan komite sekolah, tidak terlibat dalam struktur kepanitiaan pembangunan. Tokoh masyarakat biasanya dilibatkan dalam kegiatan kenaikan kelas yang mengundang semua wali murid dan komite sekolah, disinilah tokoh masyarakat berperan dalam meningkatkan partisipasi.

Tokoh Masyarakat akan terlibat secara langsung dalam acara-acara formal yang diadakan oleh sekolah, misalnya ketika sekolah mengadakan pengajian dalam rangka peringatan hari besar Islam, atau pertemuan-pertemuan dengan wali murid, biasanya sekolah mengundang Tuan Guru untuk memberikan ceramah atau pengajian dalam rangka mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pendidikan, masyarakat diberikan dorongan moral oleh Tuan Guru agar lebih aktif memperhatikan kondisi pendidikan agar pendidikan di Desa Jerowaru semakin berkualitas.

Menurut KASI PMD Kecamatan Jerowaru bahwa keberadaan tokoh masyarakat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pendidikan. Sebagai wujud keperdulian tokoh masyarakat Desa Jerowaru dalam pendidikan, sebagian Tuan Guru yang merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama membangun pondok pesantren sebagai tempat pendidikan formal bagi masyarakat desa Jerowaru. Bukti keperdulian Tuan Guru dalam pendidikan, *pertama* dibangunnya Yayasan Darul Yatama Walmasakin (YADAMA), yang didirikan oleh H. Sibawaihi yang berada di pusat Desa Jerowaru. YADAMA mengelola pendidikan formal yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Selain mengelola pendidikan formal YADAMA membentuk majlis ta'lim tempat pengajian

masyarakat umum yang bersifat pendidikan non formal; *kedua* Yayasan Darul Wustho yang didirikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Nuh, Darul Wustho menaungi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Wustho; *Ketiga* Tuan Guru Haji Mustawalli membangun Sekolah Dasar Islam (SDI) yang berda di dusun ujung betok. Sekolah yang dibangun berdasarkan ide tokoh masyarakat akan tetapi sekolah-sekolah tersebut tidak dikelola langsung oleh Tuan Guru sebagai Tokoh, pengelolaanya diserahkan langsung kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Program pendidikan dikembangkan oleh Tuan Guru semata-mata dilakukan hanya kearah substansi pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman dan perubahan sosial masyarakat. Pengembangan program pendidikan dilakukan oleh Tuan Guru akan berimplikasi pada masyarakat desa sendiri sebagai konsekuensi program yang dikembangkan, karena *output* dari lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh Tuan Guru diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan tantangan zaman. Selain itu juga, akan berimplikasi pada lembaga formal maupun nonformal pada masyarakat. Pengembangan dibidang pendidikan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan Tuan Guru melalui dua tahapan

yaitu tahap sosialisasi program pendidikan dan tahap pelaksanaan program pendidikan.

1) Sosialisasi Program pengembangan pendidikan

Untuk mengembangkan program pendidikan pada masyarakat, maka diperlukan sosialisasi. Sosialisasi dalam konteks pengembangan program pendidikan yang dikembangkan Tuan Guru dimaknai sebagai suatu langkah atau tahapan dalam bentuk penyebaran program yang akan diimplementasikan kepada masyarakat. Adapun sasaran dari pengembangan program pendidikan tersebut adalah para santri yang belajar di madrasah dan warga masyarakat Desa Jerowaru.

Sosialisasi program pendidikan dikembangkan oleh Tuan Guru diupayakan melalui pendekatan kelembagaan (*institutional approach*). Sehubungan dengan itu, ada tiga kelembagaan yang dijadikan sarana dalam proses mensosialisasikan pengembangan program, yaitu *pertama*, lembaga-lembaga pengajian tradisional dalam bentuk pengajian *halaqah*, baik di dalam Pondok Pesantren maupun di tengah-tengah masyarakat; *kedua*, lembaga pendidikan yang dikembangkan programnya ke arah substansi pendidikan yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman, dan *ketiga*, membentuk lembaga-lembaga baru

sebagai sebagai sarana yang akan memfasilitasi program pendidikan yang dikembangkan.

Melalui tahapan sosialisasi dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, konsep pembangunan pendidikan yang dikembangkan Tuan Guru dapat diimplementasikan. Dengan demikian implementasi konsep pengembangan ilmu melalui program pendidikan pondok pesantren secara langsung dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan segala sesuatu dengan kemampuan masyarakat.

## 2) Pelaksanaan Program Pendidikan

Konsep sosialisasi program pendidikan yang dikembangkan Tuan Guru sebagai tanggung jawab dan fungsinya dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan mengimplementasikan program pembangunan pendidikan. Implementasi program pembangunan pendidikan yang dikembangkan Tuan Guru di Desa Jerowaru untuk mencapai tujuan dan hasilnya dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi sarana, tenaga pengajar, sasaran, proses, dan jenis-jenis pengembangan program pendidikan.

Sarana pendidikan yang dikembangkan oleh Tuan Guru dapat berupa pembangunan madrasah dalam pondok pesantren dan dilengkapi dengan tenaga pengajar yang merupakan guru honorer yang di gaji dengan

kemampuan madrasah. Sarana pendukung sangat penting dikembangkan dengan tujuan untuk melancarkan fungsi pengembangan program yang dikembangkan, adapun sarana untuk mendukung pengembangan program pendidikan, antara lain berupa bangunan fisik. Pengembangan sarana pendidikan yang dikembangkan oleh Tuan Guru sebagian besar berasal dari partisipasi masyarakat, yang dibantu oleh para ustadz dan ustadzah (sebutan bagi tenaga pendidik yang mengajar di madrasah) dengan memfungsikannya secara optimal sebagai tempat untuk mengembangkan kreatifitas dan potensi masyarakat, khususnya pada santri secara intens menempuh pendidikannya.

Untuk menunjang pembangunan pendidikan yang dikembangkan oleh Tuan Guru, didukung juga oleh karyawan non akademik yang berperan membantu proses pelaksanaan program pendidikan. Karyawan merupakan unsur vital dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pendidikan terutama dalam praksis pendidikan di madrasah. Sumber daya pendukung program pendidikan pada di madrasah, statusnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tenaga tetap atau guru tetap dan tenaga tidak tetap atau guru tidak tetap, sebagaimana dijelaskan oleh salah

seorang Tuan Guru yaitu Abdul Azis Anshori bahwa status ketenagaan menjadi wewenang penuh yayasan yang mengelola pendidikan.

Penetapan didasarkan atas status tenaga atau guru tetap pada dua pertimbangan, yaitu *pertama*, pengabdian yang lama di pondok pesantren. Lama diartikan bukan hanya dari waktu, akan tetapi didasarkan atas loyalitas, dan ketekunan sebagai wujud keikhlasan mereka dalam mengabdikan diri. Pengabdian mereka pada yayasan dan madrasah biasanya berlaku bagi mereka yang dari luar keluarga tuan guru; *kedua*, selain itu didasarkan pada garis keturunan tuan guru. Hal ini didasarkan pada asumsi, karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dan hormat terhadap eksistensi Tuan Guru dan pondok pesantren.

Agar tidak menimbulkan, pemahaman dan kerancuan terhadap tenaga pengajar yang ada, maka adanya pemberian status terhadap guru, maka atas kebijakan Tuan Guru pengangkatan didasarkan pada surat keputusan (SK) dari Ketua Yayasan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, seseorang berhak diangkat atau dicabut menjadi tenaga atau guru. Pengangkatan dan pencabutan tenaga dilakukan atas usulan dari kepala madrasah di bawah yayasan yang

disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing.

Sasaran utama dari pengembangan program pendidikan yang dikembangkan oleh tuan Guru yaitu para santri yang mengikuti pendidikan formal dan masyarakat umum. Santri yang menjadi sasaran dari program pendidikan yang dikembangkan oleh Tuan Guru yang diprioritaskan adalah pendidikan anak yatim/fakir miskin dan santri yang ada di pondok pesantren. Selain itu, mayoritas santri berasal dari *dasan-dasan* yang ada di desa Jerowaru, latar belakang mereka merupakan rata-rata keluarga dari petani, buruh tani, nelayan, pedagang atau berasal dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, hal ini yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan bidang pendidikan.

Pengembangan program pendidikan yang berikutnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat Desa Jerowaru itu sendiri. Pengaruh Tuan Guru yang masih kuat pada masyarakat ikut mempengaruhi program pengembangan pendidikan di luar Desa Jerowaru, artinya peran Tuan Guru dalam mengembangkan pendidikan juga pada masyarakat di luar Desa Jerowaru untuk memperluas jaringan pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Tuan Guru.

### **3. Program Pendidikan yang dikembangkan Tuan Guru**

Tuntutan kebutuhan masyarakat pada saat ini berkaitan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Tuan Guru sebagai tokoh masyarakat mengetahui hal tersebut dengan melihat bukan sisi kuantitas atau kualitas, namun Tuan Guru melihat hal tersebut dari jenis pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat; dimulai dari pendidikan yang sederhana seperti diniyah, diskusi tentang agama dan kitab-kitab, dan pengajian.

Disamping itu Tuan Guru mengembangkan pendidikan yang lebih kompleks dengan segala variasinya, misalnya Tuan Guru membangun sarana pendidikan sebagai tempat belajar yang formal, disamping itu juga digunakan sebagai ajang pengembangan bakat siswa agar mampu bersaing ditingkat global. Kuatnya tuntutan masyarakat akan pentingnya pendidikan diatur secara kelembagaan dengan mengembangkan program pendidikannya, maka secara garis besar pendidikan yang dikembangkan di Desa Jerowaru dilihat melalui dua jenis pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal dan informal yang dikembangkan oleh Tuan Guru dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 6 : Program Pendidikan yang dikembangkan oleh Tuan Guru**

Jenis pendidikan	Program	Tujuan program
Pendidikan formal	Mendirikan Pondok Pesantren yang di dalamnya di dirikan pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari: madrasah ibtidaiyah (MI) setara SD, madrasah tsanawiyah (MTs) setara SLTP, madrasah aliyah (MA) setara SMA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun pendidikan berbasis agama tetapi tetap mengikuti kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sekolah umum.</li> <li>- Memberikan peluang sekolah kepada santri yang tidak mampu dari segi pembiayaan dan dibebaskan dari semua jenis pembiayaan.</li> </ul>
Pendidikan informal	- Diniyah Santri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pemahaman ilmu-ilmu aga Islam melalui pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Tuan Guru. Pengajian yang diberikan kepada santri dengan tidak</li> </ul>

Jenis pendidikan	Program	Tujuan program
		membedakan umur dan jenjang pendidikan. Pengajian ini bertujuan untuk memperdalam ilmu yang berkaitan dengan ajaran Agama Islam.

Program pendidikan yang dikembangkan oleh Tuan Guru menyentuh hampir semua golongan, mulai dari golongan yang ekonominya miskin sampai dengan golongan orang kaya. Program pendidikan yang dikembangkan dalam bentuk formal dan informal dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) Pendidikan Formal

Pengembangan program pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Tuan Guru melalui pendirian Pondok Pesantren yang di dalamnya terdapat madrasah terdiri dari tingkat MI, MTs, dan MA sebagai sarana pendidikan formal yang dibangun oleh Tuan Guru bersama-sama masyarakat. Pendidikan formal dalam bentuk madrasah ini berdiri atas prakarsa Tuan Guru dengan melibatkan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Tuan Guru untuk

mendirikan madrasah merupakan salah satu upaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan.

Secara historis pondok pesantren yang dikembangkan oleh Tuan Guru awalnya merupakan bentuk pengembangan dari pendidikan informal, kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan, dan tidak menutup diri terhadap perubahan zaman, maka dikembangkan menjadi pendidikan formal mulai dari tingkat MI, MTs, MA. Arah pengembangan pendidikan lebih dominan dikembangkan secara kelembagaan, yaitu program pendidikan dasar dan program pendidikan menengah.

Dalam pengembangan program pendidikan formal, baik program pendidikan dasar maupun pendidikan menengah disesuaikan dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan DEPAG dan DEPDIKNAS. Baik pada program pendidikan dasar (MI) maupun pendidikan menengah (MTs dan MA), begitu juga jurusan pada pendidikan menengah, seperti program IPA, IPS, dan Bahasa. Di samping mengembangkan program umum tersebut, program pendidikan agama tetap diprioritaskan sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh pondok pesantren dan dapat melanjutkan pendidikan

pada jenjang lebih tinggi maupun memperoleh pekerjaan dengan bekal nilai-nilai agama.

Pada tahap pengelolaan dan pelaksanaan program pendidikan, Tuan Guru menetapkan berupa keringanan kepada santri yang tergolong tidak mampu dari segi ekonomi untuk tetap memperoleh pendidikan, kemudian dibebaskan dari segala bentuk iuran santri. Bagi santri yang menjadi anak yatim dan anak miskin di MI, MTs, dan MA diberikan beasiswa dan perlengkapan sekolah.

## 2) Pendidikan Informal

Pengembangan pendidikan informal dilakukan oleh Tuan Guru tampak dari beberapa bentuk program pendidikan melalui interaksi yang bersifat interpersonal dalam kelompok-kelompok pengajian di masyarakat, maupun pembinaan yang dikembangkan melalui program ekstrakurikuler santri. Bentuk program pendidikan informal yang dikembangkan Tuan Guru yaitu program pendidikan diniyah santri. Pendidikan diniyah santri ini awalnya merupakan pengajian *halaqah* tanpa ada pembatasan usia bagi santri untuk ikut dalam program pengajian yang diselenggarakan oleh Tuan Guru, begitu juga materi pengajian diberikan tidak berdasarkan pada jenjang pendidikan formal santri. Artinya satu buah

kitab yang ajarkan oleh Tuan Guru dapat diikuti oleh semua santri dari semua jenjang pendidikan secara bersama-sama duduk dalam satu *halaqah*, di samping itu tidak terdapat ujian kitab atau evaluasi dari hari program pendidikan ini.

Program diniyah yang dikembangkan oleh Tuan Guru merupakan bentuk pengembangan dari sistem pengajian *halaqah* sebelumnya, maka esensi pengajian *halaqah* seperti materi kitab yang dijadikan kajian, metode yang digunakan, dan sasaran pengajian masih tampak dan tidak berubah sampai saat ini, namun segi teknis dan mengalami perubahan ke arah pengembangan. Dalam pelaksanaan program diniyah santri pada jenjang MTs dan MA lakukan secara terpisah, baik secara tertulis maupun jam pelaksanaan, materi ataupun kitab yang digunakan, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengetahui kemampuan seorang siswa atau santri terhadap penguasaan materi dari kitab yang telah diberikan oleh Tuan Guru atau ustadz/ustadah telah dipercayakan untuk mengajar pada diniyah tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan daftar kehadiran disusun sesuai dengan kelas mereka pada jenjang pendidikan formal. Hal ini dilakukan karena santri yang mengikuti jalur pendidikan formal diharuskan mengikuti

kegiatan pengajian pada program diniyah santri, sedangkan bagi santri yang tidak hadir dalam kegiatan diniyah diberikan sanksi berupa kebersihan lingkungan untuk menunjukkan kedisiplinan santri.

Beberapa teknis penyelenggaraan pendidikan diniyah santri tersebut, terdapat program evaluasi yang diadakan dalam bentuk ujian kitab, yang dilaksanakan pada setiap menyelesaikan satu buah kitab. Seandainya ada santri yang tidak sempat mengikuti ujian, maka diadakan ujian susulan dengan teknik ujian secara lisan yang langsung diadakan oleh pengasuhnya. Adapun teknik ujian yang dipergunakan untuk mengukur penguasaan materi siswa dengan cara duduk bersila di dalam ruang mushalla atau masjid, akan tetapi teknik ini kurang efektif dan efisien karena memberikan peluang yang besar bagi santri untuk bekerja sama dalam menjawab, karena tempat duduk antara santri yang satu dengan santri yang lain sangat berdekatan.

Hubungan antara tokoh masyarakat dan sekolah pada hakikatnya sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pendidikan terutama dalam mengembangkan kepribadian peserta didik di sekolah. Tokoh masyarakat dan sekolah tidak dapat dipisahkan satu sama

lain. Tokoh masyarakat dan sekolah merupakan dua hal yang saling melengkapi untuk menunjang kemajuan pendidikan di Desa Jerowaru.

Menurut Sagala (2010) bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah masyarakat atau warga yang menjadi bagian dari unit usaha, badan, sekolah atau instansi itu sendiri. Sedangkan publik eksternal adalah orang luar atau masyarakat umum, usaha, instansi pemerintahan yang berada di luar sekolah. Keberadaan tokoh masyarakat sangat penting bagi eksistensi pendidikan karena pada prinsipnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat tanpa satupun yang dapat dibedakan.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Jerowaru sangat berperan dalam pengembangan pendidikan, terutama dalam mengembangkan madrasah (swasta), adanya madrasah di Desa Jerowaru berasal dari keinginan masyarakat Desa Jerowaru yang di motori oleh Tuan Guru Sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Hubungan yang harmonis antara tokoh masyarakat dan tokoh agama dan madrasah atau sekolah akan membentuk *trust* dan rasa

tanggung jawab masyarakat terhadap kemajuan pendidikan. Dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru terdapat hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dengan pengelola sekolah atau madrasah, melalui hubungan yang harmonis maka akan terbentuk : (1) saling pengertian antara pengelola madrasah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja; (2) saling membantu antara *tokoh* masyarakat dan pengelola madrasah karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing; dan terjalin kerja sama antara berbagai pihak yang ada di dalam masyarakat dengan madrasah dan merasa ikut bertanggung jawab atas kesuksesan sekolah (madrasah).

Hubungan yang harmonis akan menjadikan *trust* dan norma sangat esensi agar masyarakat mendapat manfaat dari pendidikan tersebut. Dalam hubungan antara masyarakat, sekolah dan tokoh masyarakat terdapat perbedaan ideologi dari masing-masing kelompok sehingga terjadi jurang pemisah yang membutuhkan modal sosial yang menjadi jembatan dalam harmonisasi hubungan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Coleman dan Putnam dalam Portes (1998) juga mengemukakan bahwa modal sosial bukan

hanya sekumpulan instusi yang menyangga masyarakat melalui “*social trust*” dan “*social norm*”, namun sebagai perekat yang menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Melalui aneka ikatan horizontal, modal sosial berperan dan dibutuhkan untuk memberi masyarakat suatu *sense* identitas dan tujuan bersama dalam mencapai tujuan yaitu pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu sesuai dengan kebutuhan bersama. Modal sosial merangkai berbagai aset sosial, psikologis, kultural, kognitif, dan institusional yang dapat meningkatkan perilaku kooperatif yang saling menguntungkan. Bahkan tidak saja menjadi perekat, sebagaimana Portes, modal sosial dengan *social trust* dan *social norm* dalam jaringan sosial dapat dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalah (*common problem*) pendidikan secara bersama.

Fukuyama (1999) berpendapat bahwa modal sosial akan semakin kuat dalam masyarakat yang berlaku norma saling bantu membantu dan kerja sama yang kompak dalam satu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Kepercayaan berkaitan dengan budaya, terutama etika dan moral. Dari penjelasan Fukuyama “tingkat saling percaya dalam suatu

masyarakat berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan”.

Membangun pendidikan yang baik sama dengan membangun masyarakat yang baik. Karena sekolah dan madrasah sebagai tempat pendidikan dibangun sebagai tempat yang baik untuk membangun suatu masyarakat yang baik pula. Sekolah merupakan media media pengembangan kehidupan sosial yang baik bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas. Menurut Dwiningrum (2014), sekolah memiliki modal sosial dan modal budaya untuk menjadi alat peningkatan kualitas pendidikan. karena selama ini masyarakat Desa Jerowaru lebih mengenal modal fisik, uang, dan barang untuk dijadikan alat perbaikan pendidikan. sebagaimana dijelaskan oleh Dwiningrum (2014) bahwa modal sosial belum dipahami oleh pihak sekolah. Modal sosial belum dibangun secara optimal bagi perbaikan mutu di sekolah. Kondisi ini terjadi dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru. peran modal sosial belum dianggap penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, peran modal sosial belum dinilai sebagai hal yang penting dalam praktik pembangunan pendidikan di desa

Jerowaru. pihak pengelola sekolah di Desa Jerowaru belum menyadari dan belum menganggap penting modal sosial dalam pengelolaan pendidikan. hal ini dibuktikan dengan hubungan masyarakat dengan sekolah tidak dianggap penting sehingga timbul keinginan dari masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan.

Dalam pengelolaan pendidikan keinginan dari kelompok masyarakat untuk tidak saja ikut berpartisipasi, tetapi mencari alternatif bagi keterlibatan dalam pembangunan pendidikan dalam masyarakat. Ide proaktif semacam ini memiliki kandungan modal sosial yang cukup penting dalam hubungan sosial. Inisiatif untuk peduli terhadap kelompok pendidikan, mencari informasi, baik secara individu dan kelompok, merupakan satu modal sosial yang sangat berharga untuk terciptanya pembangunan pendidikan yang diharapkan.

#### **F. Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan**

Orang tua berperan mengembangkan potensi anak-anaknya sebelum menjalani pendidikan formal, sebelum masuk sekolah dasar yang merupakan awal dari mulainya sebuah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak. Tugas orang tua adalah memilih sekolah yang pas untuk anak-anak

mereka. Orang tua merupakan sebagai orang pertama tempat anak mendapatkan pendidikan sebelum berhubungan dunia luar (sekolah).

Sejak anak berada dalam kandungan anak telah mendapatkan pendidikan dari ibunya. Selain mempersiapkan anak untuk memasuki dunia pendidikan formal yang lebih luas, orang tua harus ikut menentukan arah dan tujuan hidup anak-anaknya dimasa yang akan datang. Dwiningrum (2011) menjelaskan bebarapa karakteristik orang tua, misalnya pengusaha, petani, nelayan, pedagang, pegawai dan lain-lain akan mewarnai kondisi dan kualitas pendidikan. Perbedaan karakteristik orang tua membuat harapanya terhadap sekolah terutama lulusanya akan berbeda pula. Oleh karena itu sekolah harus menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik. Karena orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan kemajuan sekolah.

Peran orang tua dalam aktivitas pendidikan di anak sangat sentral. Dalam mendidik anaknya orang tua aktif terlibat mendidik anaknya di rumah, orang tua meluangkan waktunya untuk bersama anaknya dengan prinsip *quality time* karena waktu anak di sekolah berkisar antara 6-7 jam, sehingga waktu anak-anak lebih banyak di rumah dibandingkan di sekolah. Orang tua membuat kondisi rumah lebih kondusif dan nyaman bagi anak agar anak bisa nyaman belajar dan menikmati kebersamaan bersama orang tuanya. Mengutip tulisan Dwiningrum yang merinci peran orang tua dalam membentuk lingkungan

yang kondusif di rumah dan penjelasan tentang peran orang tua dalam pendidikan anaknya yaitu :

- 1) Orang tua perlu menciptakan budaya belajar dirumah, anak-anak dibiasakan untuk belajar dirumah dengan terus memberikan bimbingan dan pengawasan agar anak-anak nyaman dalam belajar dirumah.
- 2) Peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya belajar dirumah adalah dengan memprioritaskan tugas yang terkait secara langsung dengan pembelajaran disekolah. Orang tua harus fokus membimbing anak-anaknya untuk belajar yang terkait dengan pelajarannya disekolah.
- 3) Orang tua perlu memberikan dorongan kepada anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dorong kepada anak untuk aktif mengikuti kegiatan disekolah bertujuan agar anak-anak aktif dan disiplin dalam memanfaatkan waktunya.
- 4) Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar. Sehingga anak-anak dapat mengekspresikan gagasan-gagasan yang mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut.
- 5) Orang tua perlu menciptakan situasi yang demokratis dirumah agar terjadi tukar pendapat dan

fikiran sebagai sarana belajar dan pembelajaran bagi anak. Sehingga anak tidak merasa takut dan canggung dalam mengeluarkan ide dan pendapatnya.

- 6) Orang tua harus memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah, dalam mengembangkan potensi anaknya. Artinya orang tua harus proaktif dalam mencari informasi tentang program sekolah agar orang tua bisa memberikan arahan dan bimbingan sesuai dengan program sekolah.
- 7) Orang tua harus menyediakan sarana belajar yang memadai bagi anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan orang tua dalam kebutuhan anak dalam proses pendidikan sehingga sarana belajar yang disiapkan benar-benar sesuai dengan program pendidikan yang diprogramkan oleh sekolah.

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan motivasi anak dalam pendidikan. Menurut Dwiningrum (2011: 69) bahwa partisipasi orang tua dalam pendidikan anak di sekolah memiliki masalah yang relatif kompleks. *Outcome* siswa dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, seperti sosial-ekonomi, ras, etnis, dan struktur keluarga yang kesemuanya akan berpengaruh pada keterlibatan keluarga dan orang tua dalam proses pendidikan anak.

Dari berbagai penelitian yang mengkaji tentang pendidikan bahwa adanya praktik di sekolah, seperti

komunikasi orang tua tentang berbagai kegiatan dan program, asistensi orang tua akan menolong keterlibatan orang tua dalam mendampingi belajar anaknya, dan menaikan tingkat partisipasi orang tua di sekolah. Jadi intensitas orang tua dalam proses pendidikan anak tergantung pada sekolah dan cara mengajar guru daripada karakteristik keluarga.

### **1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan**

Mengacu pada bentuk-bentuk partisipasi orang tua dalam pendidikan yang dijabarkan oleh Dwiningrum, maka dibawah ini akan dijabarkan bentuk-bentuk partisipasi orang tua dalam pendidikan di Desa Jerowaru. Terkait dengan penjelasan tentang peran orang tua dalam pendidikan di atas, peran orang tua dalam pendidikan anak di Desa Jerowaru tidak semuanya bisa dilakukan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa:

- a) Sebagian orang tua menciptakan budaya belajar dirumah, masyarakat yang menciptakan budaya belajar di rumah adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Sementara bagi masyarakat yang tingkat pendidikanya sekolah menengah kebawah mereka tidak terlalu peduli dengan kondisi belajar anak-anaknya, mereka tidak berusahamembiasakan anaknya untuk belajar di rumah.

- b) Kesempatan orang tua untuk membimbing anak-anak untuk belajar dirumah sangat sedikit. Sebagian besar masyarakat tidak mendampingi anak-anaknya belajar di rumah bahkan membiarkan anak-anak bermain tanpa memperhatikan kondisi belajar anak-anaknya.
- c) Kaitanya dengan motivasi kepada anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Masyarakat Desa Jerowaru sebagian besar tidak memberikan dorongan kepada anak untuk aktif mengikuti kegiatan disekolah hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat tidak memahami manfaat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak disekolah.
- d) Orang tua belum memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah, dalam mengembangkan potensi anaknya. Artinya orang tua kurang proaktif dalam mencari informasi tentang program sekolah agar orang tua bisa memberikan arahan dan bimbingan sesuai dengan program sekolah.
- e) Sebagian besar orang tua tidak menyediakan sarana belajar yang memadai bagi anak-anaknya di rumah, hal ini terjadi karena sebagian besar orang tua tidak memahami manfaat pendidikan bagi anak-anak mereka. Akan tetapi bagi

masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan selalu menyediakan segala kebutuhan penunjang proses pendidikan anak-anaknya.

Temuan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua cenderung yang tidak memahami manfaat pendidikan bagi anak-anaknya tidak memperhatikan kondisi anak-anak mereka saat masa-masa sekolah dan bahkan tidak memahami manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Sebagaimana komite sekolah menjelaskan bahwa pemahaman sebagian masyarakat Desa Jerowaru tentang pendidikan masih kurang sehingga menyebabkan anak-anak yang masih sekolah di SD/MI tidak mendapat perhatian penuh dari orang tuanya. Beberapa anak sekolah dengan pakaian seadanya, dengan buku seadanya, dan bahkan setelah pulang dari sekolah orang tua langsung menyuruh anak-anaknya membantu pekerjaan orang tua dan orang tuanya tidak pernah memperhatikan dan terkesan tidak peduli dengan kondisi pendidikan anak-anaknya.

Pendapat komite sekolah di atas menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Desa Jerowaru tidak peduli terhadap proses pendidikan anaknya, sebagian anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga anak-anak sekolah dalam kondisi yang tidak termotivasi. Perhatian orang tua terhadap proses pembelajaran anaknya tidak terlepas

dari lemahnya tingkat pemahaman orang tua terhadap pentingnya suatu pendidikan. Orang tua kadang tidak memahami bagaimana pentingnya suatu pendidikan terhadap perkembangan dan masa depan anaknya. Hal itu disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat.

Penjelasan komite sekolah di atas diperkuat oleh Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Jerowaru, beliau menjelaskan, sebagian orang tua tidak faham pentingnya suatu pendidikan bagi masa depan anaknya mereka bahkan melarang anaknya sekolah dan disuruh membantu pekerjaan orang tuanya di sawah dan menjaga adik-adiknya dirumah saat orang tuanya bekerja. Gambaran partisipasi orang tua yang dimaksud oleh Kepala UPTD Kecamatan Jerowaru menandakan bahwa partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran anak belum maksimal. Menurut Kepala UPTD Kecamatan Jerowaru, masyarakat belum memahami makna pendidikan bagi masa depan anak-anaknya, perhatian masyarakat dalam proses pembelajaran anak di sekolah belum maksimal karena tingkat pendidikan masyarakat Jerowaru rata-rata masih rendah.

Pendidikan dalam keluarga tidak cukup untuk menyiapkan anak untuk menghadapi masa anak-anaknya, oleh karena itu orang tua menyerahkan pendidikan anaknya di sekolah. Tetapi tidak cukup

dengan hanya menyerahkan saja, dibutuhkan partisipasi orang tua dalam kelanjutan proses pendidikan anak-anaknya. Walaupun sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa partisipasi orang tua dalam proses pendidikan anak merupakan masalah yang kompleks.

## **2. Tingkat Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan**

Dwiningrum menjelaskan interaksi yang terjalin antara orang tua dan sekolah meliputi dua kategori, yaitu: (1) *parental involvement* yang mengarah pada keterlibatan orang tua pada semua jenis aktivitas yang ditujukan untuk mendukung program-program sekolah; (2) *parental participation* adalah orang tua berupaya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada hal-hal yang sangat penting di sekolah. Sedangkan tingkat keterlibatan orang tua dalam peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh orang tua saja, tetapi juga ditentukan oleh sistem pendidikan yang berlaku.

Peran orang tua dalam pendidikan anak sangat penting dalam memberikan motivasi dengan tujuan anak-anak akan belajar lebih aktif dan termotivasi dalam meraih masa depannya. Penjelasan di atas menggambarkan pentingnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak, banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendukung anaknya dalam proses pendidikan. anak-anak akan

termotivasi dalam belajar jika dia merasa diperhatikan dan dimotivasi oleh orang tuanya.

Berdasarkan anak tangga tingkat partisipasi dapat diasumsi bahwa partisipasi orang tua diklasifikasikan kedalam *Decision making* sebagai landasan orang tua dalam melakukan partisipasi. Tingkat keterlibatan orang tua dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh orang tua itu sendiri, tetapi juga ditentukan oleh sistem yang berlaku di daerah Lombok Timur. Tingkat partisipasi orang tua dalam pendidikan di Desa Jerowaru berada pada level *Decision making*. Artinya adalah konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.

Bagi sebagian besar masyarakat Desa Jerowaru yang memahami manfaat pendidikan menginginkan anaknya untuk sekolah ke jenjang perguruan tinggi, orang tua menaruh harapan besar kepada anak-anaknya agar menjadi manusia yang sukses dan sejahtera dimasa yang akan datang. Sebagian masyarakat menginginkan anaknya menjadi orang pintar dan cerdas serta memiliki keterampilan-keterampilan khusus untuk menghadapi perkembangan zaman di masa yang akan datang, dan sebagian masyarakat lagi acuh terhadap

perkembangan belajar anaknya. Di sisi lain, hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat di Desa Jerowaru tergambar tidak semua masyarakat memiliki pemikiran bahwa pendidikan bagi anak-anak mereka sangat penting bagi masa depan mereka, sebagian masyarakat tidak memahami makna pendidikan dan sebagian dari mereka tidak peduli dengan kondisi pendidikan anak-anaknya.

Data tingkat pendidikan masyarakat di desa Jerowaru menunjukkan sebagian besar masyarakat tidak tamat SD atau paling tinggi tamat SD, hal tersebut disebabkan orang tua mereka dahulu tidak mementingkan pendidikan. Melihat kondisi tersebut peneliti dapat menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pendidikan anak-anaknya tidak intensif. Keterlibatan masyarakat dalam pembelajaran anak di sekolah yang bersifat akademik masih belum maksimal, tidak semua masyarakat mampu melakukannya, hal itu disebabkan karena keterbatasan pemahaman orang tua pentingnya perhatian orang tua dalam proses pembelajaran anaknya. Selain itu keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap pelajaran anaknya juga menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya perhatian mereka dalam proses pembelajaran.

Fenomena sosial masyarakat Desa Jerowaru yang tidak memahami manfaat pendidikan anak-

anaknyanya. Menurut komite sekolah sebagian besar masyarakat memahami manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Sebagian masyarakat memberikan perhatian dan motivasi dalam proses pendidikan anak-anaknya. Bagi orang tua yang memperhatikan masalah pendidikan anaknya, mereka sangat mendorong anaknya untuk terus belajar dan ikut serta dalam proses perkembangan tempat anaknya sekolah, hal itu dilakukan bagi masyarakat yang faham pentingnya peran orang tua bagi perkembangan anaknya, mereka ikut terlibat secara langsung dalam program pendidikan disekolah, dan mendampingi anaknya belajar dirumah secara berkelanjutan. Menurut komite sekolah banyak orang tua yang perhatian terhadap anaknya, mereka selalu memperhatikan kondisi belajar anaknya, mereka memberikan motivasi bagi anaknya yang tidak rajin sekolah, dan bahkan orang tua yang memiliki motivasi tinggi dalam pendidikan anak mereka memberikan fasilitas sekolah yang dibutuhkan oleh anak-anaknya dalam menjalani proses pendidikan.

Sebagian masyarakat Jerowaru tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang bersifat akademik, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuannya yang berperan sebagai pendamping belajar anak di rumah. Artinya; sebagian besar orang tua siswa di Desa Jerowaru secara edukatif belum

melibatkan diri dalam proses belajar anak dirumah dan belum memperhatikan kebutuhan belajar anak-anaknya. Peran orang tua dalam pendidikan anak di Desa Jerowaru relevan dengan pendapat Dwiningrum (2011) beliau menjelaskan partisipasi orang tua dalam membantu anaknya belajar di rumah ditentukan oleh latar belakang pendidikan orang tua. Bagi orang tua yang pendidikannya menengah ke atas lebih banyak membantu anaknya belajar di rumah, sedangkan orang tua yang berpendidikan rendah misalnya orang tua yang tamat sekolah dasar atau yang tidak sekolah tidak terlalu memperhatikan kondisi belajar anaknya.

Gambaran partisipasi masyarakat Desa Jerowaru di atas merupakan masalah pembangunan pendidikan yang dialami secara umum oleh berbagai daerah, pembangunan pendidikan melalui partisipasi mengalami berbagai hambatan. Proses pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi sosial kemasyarakatan, kondisi ekonomi, *trust*, tingkat pendidikan masyarakat atau orang tua, dan keluarga. Diperlukan komunikasi kepada orang tua tentang pentingnya peran mereka untuk mendorong dan membimbing anak-anak mereka agar trus giat dalam belajar. Pemerintah harus terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan

pentingnya mereka menuju masa depan anaknya yang lebih baik.

Secara umum harapan orang tua pada anaknya adalah menjadi anak yang sukses dan memiliki masa depan yang sejahtera, pada dasarnya orang tua menaruh harapan besar kepada sekolah untuk mendidik anaknya agar anaknya bisa menjadi orang yang mandiri di masa yang akan datang. Seperti yang disampaikan oleh kepala SDN 11 Jerowaru; “keinginan orang tua agar anak-anaknya menjadi anak yang berhasil sangat besar, sehingga peran orang tua dalam pendidikan anak menjadi yang utama”. Harapan dari pihak pengelola sekolah agar orang tua terus memberikan dukungan terhadap proses pendidikan yang sedang dijalani oleh anaknya. Sudah saatnya orang tua berfikir bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak”, karena orang tualah yang paling mengerti sifat-sifat baik dan buruk anak-anaknya, apa saja yang mereka sukai dan apa saja yang mereka tidak sukai.

Orang tua adalah orang yang pertama kali tahu bagaimana perubahan dan perkembangan karakter dan kepribadian anak-anaknya, hal-hal apa saja yang membuat anaknya malu dan hal-hal apa saja yang membuat anaknya takut. Orang tualah yang nantinya akan menjadikan anak-anak mereka seorang yang memiliki kepribadian baik atau buruk paparnya. Harapan di atas juga disampaikan oleh

Kepala Sekolah Dasar Islam (SDI) Yaqin I Ujung Betok. beliau berharap; “sudah seharusnya orang tua aktif memperhatikan kondisi belajar anak-anaknya karena anak-anak sedang dalam masa peralihan lebih banyak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, maka orang tua tidak dapat menyerahkan proses pendidikan anak sepenuhnya kepada guru di sekolah. orang tua harus banyak berkomunikasi dengan gurunya di sekolah begitu juga sebaliknya, hal penting dalam pendidikan adalah mendidik jiwa anak. Jiwa yang masih rapuh dan labil, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua dapat mengakibatkan pengaruh lebih buruk lagi bagi jiwa anak”, paparnya.

Menurut kepala SDI yaqin I, Orang tua dan sekolah merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lain. Terlepas dari beragamnya asumsi masyarakat, ungkapan “buah tak akan pernah jauh jatuh dari pohonnya” adalah sebuah gambaran bahwa betapa kuatnya pengaruh orang tua terhadap perkembangan anaknya. Supaya orang tua dan sekolah tidak salah dalam mendidik anak, oleh karena itu harus terjalin kerjasama yang baik di antara kedua belah pihak. Orang tua mendidik anaknya di rumah, dan di sekolah untuk mendidik anak diserahkan kepada pihak sekolah atau guru, agar berjalan dengan baik kerja sama di antara orang

tua dan sekolah maka harus ada dalam suatu rel yang sama supaya bisa seiring seirama dalam memperlakukan anak, baik di rumah ataupun di sekolah, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam memperlakukan anak.

Kenyataannya tidak mudah untuk menyetujui kesepakatan antara pihak pengelola pendidikan, masyarakat, dan orang tua, tetapi jika berlandaskan rasa cinta kepada anak tentunya apapun akan dilakukan oleh orang tua. Kalau hal ini sudah dimiliki oleh kedua belah pihak antara sekolah dan orang tua, maka akan menjadi modal besar bagi orang tua dalam mendidik anaknya.

### **3. Peran Modal Sosial dalam Masyarakat Jerowaru**

#### **a) Unsur -Unsur Modal Sosial dalam Partisipasi Masyarakat**

Salah satu tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Untuk mencapai tujuan pendidikan dimaksud diperlukan pembangunan pendidikan yang berkualitas. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk membina kepribadian bangsa sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Tujuan utama pembangunan pendidikan adalah membentuk manusia

Indonesia secara utuh dan berkarakter dalam mengembangkan beberapa aspek yaitu: aspek fisik, sosial, kreativitas, intelektual, dan spiritual secara optimal.

Di era otonomi ini proses pembangunan pendidikan tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai agen perubahan yang dapat menggerakkan masyarakat mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks pembangunan pendidikan, modal sosial merupakan modal yang sangat abstrak dan hanya dapat dilihat dalam bentuk aksi dan reaksi antar masyarakat. Ife dan Tesoriero (2008) mengatakan:

*.....“pembangunan di masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan dan membantu masyarakat untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada pemahaman dan aksi sosial”.*

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa modal sosial dalam pengembangan pendidikan merupakan modal yang dapat digunakan sebagai kekuatan penggerak dalam partisipasi masyarakat. Modal sosial dimaksud memberikan dukungan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara persama-sama dalam proses pembangunan pendidikan.

Menurut Hasbullah (2006) Modal sosial dalam partisipasi masyarakat terdiri dari

beberapa unsur pokok yaitu: 1) partisipasi dan jaringan, 2) *reciprocity*, 3) *trust*, 4) norma sosial, 5) nilai-nilai, dan 6) tindakan yang proaktif. Partisipasi masyarakat Desa Jerowaru dalam pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh unsur-unsur modal sosial yang disampaikan oleh Hasbullah tersebut.

Semua unsur - unsur modal sosial yang disampaikan oleh Hasbullah (2006) di atas merupakan unsur pokok modal sosial. Tetapi proses partisipasi dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru ditemukan beberapa unsur yang lain diantaranya adalah:

- 1) Terbangunya rasa saling percaya antar masyarakat; data dari hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jerowaru memiliki rasa saling percaya terutama dalam proses pembangunan pendidikan sekolah swasta (madrasah) yang berada pada pondok pesantren. Dalam pelaksanaan pendidikan, rasa saling percaya antara semua unsur pendidikan yang terdiri dari pengurus pondok pesantren, masyarakat, orang tua, dan komite sekolah terbangun melalui komunikasi yang baik antara semua unsur-unsur tersebut.
- 2) Jaringan sosial; terbangunya rasa saling percaya karena adanya jaringan sosial yang

mampu menghubungkan unsur-unsur terkait. Jaringan sosial yang dimaksud adalah: (a) adanya proses partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan, (b) adanya solidaritas yang terbentuk secara alami dalam proses pembangunan masyarakat, (c) adanya kerjasama antara masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan pendidikan, dan (d) terdapat nilai-nilai kebersamaan yang muncul melalui proses partisipasi.

Unsur-unsur modal sosial yang terdapat dalam partisipasi masyarakat bagian dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Jerowaru dan hal ini merupakan faktor positif yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

b) Tuan Guru dalam jaringan Modal sosial masyarakat Desa Jerowaru

Tuan guru menganggap bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Tuan Guru menempati posisi yang sangat sentral dalam jaringan modal sosial. Hal ini disebabkan karena Tuan Guru merupakan *center of solidarity* di Desa Jerowaru. Kepercayaan (*trust*) masyarakat pada Tuan Guru merupakan

modal utama dalam proses pembangunan pendidikan. Kepercayaan terhadap Tuan Guru menjadi modal sosial dalam masyarakat.

Nilai dan moralitas kepercayaan masyarakat terhadap Tuan Guru menjadi sarana yang memudahkan dan menjadi dasar untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Tuan Guru mampu menumbuhkan motivasi masyarakat, orang tua dan komite sekolah untuk mengelola pendidikan dengan jujur, dan saling percaya, sehingga masyarakat percaya bahwa pengelolaan pendidikan yang jujur dan baik akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Modal sosial yang utama dalam partisipasi masyarakat adalah kepercayaan akan adanya sanksi sosial jika masyarakat tidak mengikuti dan menjalankan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru. Adanya modal sosial yang menjadi modal utama dalam menciptakan suasana partisipasi yang lebih baik dalam pembangunan pendidikan.

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada motivasi yang dilakukan oleh Tuan Guru melalui pengajian-pengajian umum (ceramah agama) yang dilakukan pada masyarakat secara rutin. Hal ini didasarkan atas pemikiran Tuan Guru bahwa masyarakat Desa

Jerowaru adalah manusia yang dapat berfikir dan bertindak dengan baik jika diberikan tanggung jawab, bukan dengan meremehkan mereka. Jika masyarakat diberikan kepercayaan maka mereka akan ikut berperan aktif dan berpartisipasi penuh sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

*Trust* yang ada akan melahirkan kedekatan sosial antara Tuan Guru, masyarakat, komite sekolah, dan orang tua, serta masyarakat sekolah. Sehingga kedekatan siswa ini menjadi dasar utama partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Kedekatan sosial menjadikan orang tua akan memiliki rasa tanggung jawab mendidik anaknya di rumah, dan akan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan pendidikan. disamping itu kedekatan sosial didasarkan pada rasa saling percaya yang menjadi jaringan kerjasama komite sekolah, pihak sekolah, pemerintah dan orang tua.

Kepercayaan pada akhirnya menjamin komite sekolah bisa bekerja mandiri, melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik karena memiliki jaringan sosial yang didasari oleh modal sosial yang baik untuk mendukung implementasi pelaksanaan pembangunan pendidikan melalui partisipasi masyarakat yang

terbentuk melalui ikatan-ikatan sosial. Di bawah dirinci peran modal sosial dalam mendukung partisipasi masyarakat Desa Jerowaru dalam pembangunan pendidikan.

#### **4. Permasalahan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan**

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang baik pikiran maupun tenaga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, mengevaluasi dan memperoleh manfaat dari program tersebut. Esensi partisipasi adalah keterlibatan sikap dan perbuatan nyata dalam kegiatan menyusun rencana program pendidikan, melaksanakan program yang sudah disepakati bersama, memanfaatkan hasil, mengevaluasi, menanggung resiko dan bertanggung jawab atas suatu program pendidikan. Partisipasi dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh frekuensi dari partisipasi masyarakat.

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan persoalan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sekolah Dasar (SD) Dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Dalam penjelasan data penelitian dan pembahasan hasil penelitian di jelaskan di atas bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan Sekolah Dasar di Desa Jerowaru adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan. Bentuk lain yang dilakukan oleh masyarakat adalah partisipasi akademik, partisipasi dalam bentuk tenaga, uang, dan materi. Disamping itu orang tua juga berpartisipasi dalam mendorong dan memotivasi serta memfasilitasi anak-anaknya dalam proses pendidikan. bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jerowaru di atas akan membantu perkembangan pembangunan pendidikan.

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jerowaru yang dijelaskan di atas mengalami beberapa hambatan-hambatan dan masalah-masalah yang umumnya terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Makna desentralisasi dalam pelaksanaan pendidikan adalah pembangunan pendidikan seharusnya mendapat perhatian penuh dari masyarakat dan pemerintah masih belum terpenuhi. Secara umum peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia rata-rata masih kurang. Partisipasi masyarakat masih mengalami banyak permasalahan dalam pengelolanya. Jalal (2001) menjabarkan bahwa terdapat sepuluh permasalahan dalam partisipasi masyarakat yang mengakibatkan partisipasi masyarakat akan menjadi tidak maksimal. Hambatan

masyarakat dalam melakukan partisipasi dapat deskripsikan sebagai berikut:

- a) *Sistem perencanaan*, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut pemerintah yang masih menganut sistem perencanaan (*topdown*) yang dapat mematikan kreativitas di lapangan. Walaupun saat ini Indonesia sudah menganut sistem desentralisasi akan tetapi sistem perencanaan keuangan lebih didominasi oleh pemerintah pusat, sistem perencanaan program yang bersifat *topdown* akan menimbulkan beberapa masalah di antaranya adalah terjadi penyeragaman program, penyeragaman sistem dan mekanisme program, kurang memberikan ruang bagi perencanaan dari bawah. Kemudian pertanggung jawaban keuangan tidak mengacu kepada hasil, melainkan pada kelengkapan administrasi. Hal inilah yang akan membuka peluang untuk melakukan manipulasi. Kondisi ini mempengaruhi perkembangan pembangunan pendidikan, sistem perencanaan pendidikan yang masih bersifat *topdown* dapat menghambat kebebasan masyarakat untuk menentukan program kerja yang akan dikembangkan oleh sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh kepala SDN 1 Jerowaru: “yang menjadi hambatan pengembangan program

pendidikan di Desa Jerowaru adalah sistem pengelolaan keuangan yang masih terpusat dan distribusinya tidak merata". Sistem perencanaan pendidikan di Desa Jerowaru masih harus menunggu keputusan dari pemerintah agar bisa berjalan karena harus menunggu bantuan dana dari pemerintah.

- b) *Kurangnya kepercayaan pemerintah* terhadap kemampuan dan kekuatan energi masyarakat untuk mengambil peran dalam melaksanakan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemaksaan kehendak dari pemerintah sehingga akan mengakibatkan program yang direncanakan tidak sempurna atau akan terjadi pengorbahan hasil dari program. Akibatnya pemaksaan kehendak dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan akan berakibat pada ketidaksiapan masyarakat sebagai pelaksana program pendidikan sehingga program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan masih bersifat terfokus pada pemerintah. Pengelola sekolah di Desa Jerowaru tidak punya rencana yang matang karena harus menunggu program penyelenggaraan dari pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh kepala UPTD DIKPORA

Kecamatan Jerowaru, beliau menjelaskan bahwa sebagian besar Kepala sekolah tidak memiliki program kerja sehingga sekolah terkesan hanya menunggu program pengembangan pembangunan pendidikan dari pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah belum memberikan sepenuhnya pengelolaan pendidikan kepada sekolah sehingga pelibatan masyarakat tidak optimal. Peran masyarakat sekitar menjadi diabaikan.

- c) *Sikap birokrat* yang dimiliki oleh pemegang kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten, birokrat belum mampu membiasakan diri bertindak sebagai pelayan masyarakat; birokrat cenderung berperilaku sebagai penentu yang selalu ingin dihormati dan ingin berkuasa karena mereka merasa memiliki dana. Hal ini menyebabkan sikap apatis dari masyarakat dan menurunkan sikap masyarakat untuk berpartisipasi. Sikap birokrat yang tidak menghargai masyarakat dan selalu ingin jadi pemenang dalam segala, selalu ingin dihormati dan dihargai dengan mengesampingkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sikap birokratis dari pemegang kebijakan pada akhirnya akan membuat partisipasi masyarakat menjadi lemah, masyarakat tidak merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan

program karena masyarakat merasa tidak diperhatikan dan tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

- d) *Kebutuhan masyarakat*; karakteristik kebutuhan masyarakat untuk belajar sangat beraneka ragam, sedangkan sistem perencanaan yang dianut masih turun dari atas dan bersifat standar. Hal ini mengakibatkan gairah masyarakat berkurang dan menimbulkan keengganan untuk berpartisipasi. Perencanaan program yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena program yang direncanakan bersifat seragam sementara kebutuhan masyarakat beraneka ragam.

Masyarakat Desa Jerowaru memiliki kebutuhan yang tidak seragam, hal ini yang mengakibatkan partisipasi masyarakat tidak terjadi pada semua sekolah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan menjadi tidak seragam. Penjelasan tentang partisipasi masyarakat di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Jerowaru dalam pembangunan pendidikan tidak merata, kadang partisipasi masyarakatnya tinggi dan terkadang juga rendah, hal ini terjadi karena karakteristik dan kebutuhan masyarakat Jerowaru yang berbeda sehingga mempengaruhi partisipasinya dalam pembangunan pendidikan.

- e) *Sikap masyarakat*; pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-hal yang bersifat kebutuhan badaniah, sedang yang berkaitan dengan pendidikan yang memerlukan waktu dan pengorbanan sikap masyarakat masih perlu digugah. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak tidak memiliki kesempatan menerima pendidikan yang layak. Di Desa Jerowaru masyarakat lebih mementingkan dan sibuk dengan mencari nafkah untuk keluarga, sementara kebutuhan pendidikan anak tidak mendapat perhatian, bahkan anak-anak ikut mencari nafkah setiap hari sehingga proses pendidikan yang seharusnya diperoleh oleh anak-anak tidak terpenuhi. Ketika anak sudah bisa bekerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan kerja (bertani, buruh, gembala, dan nelayan) maka anak-anak mengerjakan rutinitas tersebut. Hal inilah yang dapat mengakibatkan anak tidak aktif sekolah.
- f) *Budaya menunggu*; sebagian besar masyarakat Desa Jerowaru masih memiliki sifat yang statis, merasa puas dengan apa yang ada, bersifat menunggu, menerima, kurang proaktif untuk mengambil prakarsa dan melakukan tindakan yang bermanfaat untuk masa depan pendidikan, sehingga kurang proaktif dalam merencanakan bentuk-bentuk partisipasi yang akan dilaksanakan untuk kemajuan pembangunan

pendidikan. Masyarakat tidak memiliki inisiatif sendiri untuk merencanakan dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan pendidikan. masyarakat lebih memilih mengerjakan program yang ada tanpa memberikan masukan, tanpa memikirkan apakah program tersebut merupakan kebutuhan sekolah atau tidak.

- g) *Tokoh panutan*; tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya berperan sebagai penuntun sering berperilaku sebagai birokrat. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program. Tokoh panutan masyarakat Jerowaru adalah Tuan Guru, dari data yang dihimpun oleh peneliti menggambarkan bahwa Tuan Guru sangat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan sangat berperan penting dalam mendorong pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru. Namun di sisi lain peneliti menemukan bahwa para tokoh yang ada di Desa Jerowaru tidak selamanya memiliki pemikiran yang sama tentang program-program pengembangan pendidikan, sehingga hal ini yang menjadi salah satu penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
- h) *Lembaga sosial masyarakat*; jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang

pendidikan masih sangat kurang. Hal ini mengakibatkan kelambanan dalam menggerakkan masyarakat terhadap pendidikan berbasis masyarakat berkurang.

Tuan Guru sebagai tokoh penggerak pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru mendirikan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk yayasan yang pendidikan formal dan non formal. Akan tetapi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan masih belum maksimal mendorong perkembangan pembangunan pendidikan karena jumlahnya hanya terdiri dari tiga yayasan yaitu: Pondok Pesantren Darul Yatama Walmasakin, Darul Wustho, dan Pondok Pesantren Al-Kautsar. Akan tetapi dengan keberadaan tiga yayasan ini dapat mendorong pembangunan pendidikan walaupun tidak terlalu pesat.

- i) *Anggaran*; dalam pengelolaan pendidikan di Desa Jerowaru, yang menjadi kendala utama adalah keterbatasan dukungan anggaran pendidikan, prosedur yang berbelit-belit, keterbatasan sarana dan prasarana belajar, dan tenaga kependidikan yang masih kurang dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan masyarakat menjadi berkurang. Masyarakat menginginkan program perencanaan pendidikan harus memberikan jaminan yang baik sehingga akan

menimbulkan *trust* dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

- j) *Egoisme sektoral*; masih ada keraguan dari pelaksana pendidikan dari instansi yang berbeda tentang wadah pendidikan, masing-masing instansi masih menonjolkan kekarakteristikannya dan tidak ada keinginan untuk saling berinteraksi. Hal ini mengakibatkan keengganan instansi untuk mengembangkan pendidikan secara bersama-sama. Kondisi ini akan mengakibatkan kebingungan masyarakat sehingga akan membuat partisipasi masyarakat menjadi lemah. Adanya pengelolaan pendidikan yang berbeda antara dinas pendidikan dan departemen agama menjadi salah satu penghambat pembangunan pendidikan. Dalam pengelolaannya akan terjadi persaingan antara masing-masing instansi sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

Hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru di atas dapat dirumuskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 7 : Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan**

<b>Hambatan</b>	<b>Realitas yang terjadi di lapangan</b>
Sistem perencanaan	Penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut yang masih menganut sistem perencanaan ( <i>topdown</i> ) yang dapat mematikan kreativitas masyarakat.
Kepercayaan terhadap masyarakat masih kurang	perencanaan program pendidikan masih bersifat terfokus pada pemerintah. Pengelola sekolah di Desa Jerowaru tidak punya rencana yang matang karena harus menunggu program penyelenggaraan dari pemerintah
Sikap birokrat	Sikap birokratis dari pemegang kebijakan akan membuat partisipasi masyarakat menjadi lemah, masyarakat tidak merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan program pendidikan karena masyarakat merasa tidak diperhatikan dan tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda	Masyarakat Desa Jerowaru memiliki kebutuhan yang tidak seragam, hal ini yang mengakibatkan partisipasi masyarakat tidak terjadi pada semua sekolah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan menjadi tidak sama.
Sikap masyarakat	masyarakat lebih mementingkan dan sibuk dengan mencari nafkah untuk keluarga, sementara kebutuhan pendidikan anak tidak mendapat perhatian, bahkan anak-anak ikut

Hambatan	Realitas yang terjadi di lapangan
	mencari nafkah setiap hari sehingga proses pendidikan yang seharusnya diperoleh oleh anak-anak tidak terpenuhi.
Budaya menunggu	Masyarakat tidak memiliki inisiatif sendiri untuk merencanakan dan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan.
Tokoh panutan	Tokoh masyarakat memiliki pemikiran yang berbeda tentang program-program pengembangan pendidikan.
Lembaga sosial masyarakat	jumlah lembaga sosial kemasyarakatan masih belum maksimal mendorong perkembangan pembangunan pendidikan
Anggaran	keterbatasan dukungan anggaran pendidikan, prosedur yang berbelit-belit, keterbatasan sarana dan prasana belajar, dan tenaga kependidikan yang masih kurang dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan masyarakat menjadi berkurang.
Egoisme sektoral	pengelolaan pendidikan yang berbeda antara dinas pendidikan dan departemen agama menjadi salah satu penghambat pembangunan pendidikan

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- (1) Sistem perencanaan terjadi secara *topdown* sehingga dapat mematikan kreativitas masyarakat, hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi lemah.
- (2) Kepercayaan pemerintah terhadap masyarakat masih kurang, sehingga masyarakat hanya menunggu program pendidikan dari pemerintah.
- (3) Pemegang kebijakan pendidikan terlalu birokratis sentralistik sehingga partisipasi masyarakat menjadi lemah, karena masyarakat tidak merasa diberikan tanggung jawab oleh pemerintah dan pengelola pendidikan.
- (4) Adanya kebutuhan masyarakat yang berbeda mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan menjadi tidak seragam.
- (5) Pemahaman masyarakat yang tidak seragam terhadap partisipasi menimbulkan masyarakat bersikap pasif terhadap perkembangan pendidikan. Masyarakat tidak memperhatikan kondisi pendidikan disekitarnya, mereka lebih mementingkan pekerjaan masing-masing dari pada ikut berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.
- (6) Masyarakat Desa Jerowaru belum memiliki inisiatif sendiri dalam memikirkan kemajuan pendidikan. Mereka masih biasa menunggu program yang berasal dari pemerintah, itupun

kalau mereka dilibatkan, jika tidak mereka tidak terlalu memikirkan pentingnya peran mereka dalam kemajuan pendidikan.

- (7) Adanya perbedaan pendapat para tokoh desa menjadi salah satu hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan
- (8) Pengelolaan pendidikan yang bersifat egoisme sektoral menjadi penghambat pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru. Perbedaan pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional menjadikan kebingungan pada masyarakat. Masing-masing instansi memiliki program pengembangan pendidikan yang berbeda sehingga masyarakat tidak tahu mana yang harus diikuti dan program mana yang menjadi proiriras.

Berbagai permasalahan yang menghambat partisipasi di atas tidak mengakibatkan program pembangunan pendidikan menjadi lamban. Dari hasil observasi dan wawancara di Desa Jerowaru masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan pada umumnya muncul berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, pola pikir, masyarakat (pandangan masyarakat) atau cakrawala berfikir masyarakat tentang manfaat pendidikan yang berbeda. Permasalahan lain yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

pendidikan adalah berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi serta kemampuan memahami makna dan manfaat partisipasi dalam skala makro.

Beberapa sumber yang dapat dipercaya di Desa Jerowaru menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan diantaranya adalah masyarakat Desa Jerowaru memandang pendidikan bukan suatu hal yang sangat penting, masyarakat lebih memilih kesibukan dalam mencari nafkah dari pada memikirkan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. permasalahan berikutnya adalah persebaran guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak merata. Kemudian infra struktur; letak sekolah dengan kondisi jalan yang sangat jauh dari pemukiman penduduk sebagai salah satu penghambat partisipasi masyarakat, disamping itu letak geografis yang tidak memungkinkan masyarakat untuk terus aktif dalam pelaksanaan pendidikan. Berbagai permasalahan partisipasi masyarakat yang dialami dalam proses pengelolaan pendidikan terjadi hampir pada sebagian besar sekolah yang ada di Desa Jerowaru.

Permasalahan lain yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru dapat dirinci sebagai berikut: (a) kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan, karena tingkat

pendidikan masyarakat Desa Jerowaru rata-rata masih rendah yaitu 11.74 % buta huruf (tidak pernah sekolah), 23.54 % tidak tamat SD, 12.35 % hanya tamat SD/MI, persentase tingkat pendidikan masyarakat Desa Jerowaru yang mayoritas buta huruf dan tidak tamat sekolah dasar akan berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pembangunan pendidikan. (b) Orang tua kurang peduli terhadap proses pendidikan anak-anaknya, orang tua sebatas menyekolahkan anak-anaknya saja, dia tidak memperhatikan bagaimana prestasi anaknya, bagaimana tingkah laku anaknya baik itu di sekolah maupun di rumah, dan bahkan beberapa orang tua tidak terlalu peduli apakah anaknya mau sekolah atau tidak mereka tidak, dan bahkan mereka disuruh bekerja kalo ada yg bisa dikerjakan oleh anak-anaknya. (c) pola pikir masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pendidikan, masyarakat tidak peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, masyarakat tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membantu kemajuan pendidikan, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak faham dengan manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anaknya, disamping itu mereka tidak tahu bagaimana harus berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. (d) adanya pernikahan usia dini di Desa Jerowaru, hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan mereka, (e) *broken*

*home* berdampak pada pendidikan anak-anak di Desa Jerowaru. kondisi ini akan memicu rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. (f) peran pemerintahan desa dalam mendorong partisipasi masyarakat belum maksimal.

Pendidikan sesungguhnya harus bertumpu kepada masyarakat, dan jangan terlalu bertumpu pada program yang direncanakan oleh pemerintah, kemudian pelaksanaan pendidikan harus didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan and pemerintah. Disamping itu program pendidikan yang direncanakan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pengelolaan dan pemanfaatnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga kehadiran program pendidikan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dialami oleh semua sekolah dasar di Perigi secara umum masih rendah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-hal yang bersifat kebutuhan badaniah, sedang yang berkaitan dengan pendidikan yang memerlukan waktu dan pengorbanan sikap masyarakat masih perlu digugah. Kemudian tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan masih sangat kurang, hal ini menyebabkan masyarakat tidak tau apa yang harus dikerjakan dan apa yang akan diperbuat untuk sekolah.

Perhatian pemerintah yang kurang maksimal dalam mendorong partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu permasalahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Menurut Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Jerowaru, sebagian masyarakat memiliki kemampuat dan niat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan, tetapi yang menajdi kendala adalah masyarakat tidak memahami apa yang akan mereka lakukan dan belum memiliki inisiatif sendiri untu berpartisipasi. Masyarakat membutuhkan orang atau kelompok-tertentu yang bisa memberika petunjuk dan dorongan agar partisipasi niat dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi yang sudah ada dalam diri masyarakat bisa dimanfaatkan dengan baik dalam pembangunan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru di atas peneliti mengutip pendapat Soetrisno (1995) tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat yaitu: belum difahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi, pemerintah masih bersifat otoriter

sehingga menimbulkan budaya diam, adanya peraturan yang bersifat birokratis. Dari penjelasan Soetrisno dapat dijabarkan sebagai beberapa masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan sebagai berikut:

- a. Masalah pertama berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat adalah “belum difahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi” oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan pendidikan diantaranya adalah;
  - 1) Pada tingkat perencanaan, partisipasi diartikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pendidikan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh penyelenggara satuan pendidikan dan pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif.
  - 2) Pada tatanan implementasi, pendidikan yang yang dirancang oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan pendidikan yang dirancang oleh masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas yang lebih rendah.
  - 3) Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai kerjasama pengelola pendidikan dan masyarakat yang tidak pernah

memperhatikan adanya sub-sistem, sehingga aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pendidikan.

- a. Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pendidikan sebagai sebuah ideologi baru yang harus di amankan dan dijaga dengan ketat, sehingga mendorong pemerintah bersifat otoriter. Kondisi seperti itu dapat mendorong reaksi balik berupa “budaya diam” yang pada gilirannya menumbuhkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi.
- b. Masalah ketiga adalah, banyaknya peraturan yang nantinya akan meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi

Permasalahan yang dapat menghambat partisipasi di atas perlu segera dicari solusinya agar masyarakat sadar pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan suatu program pembangunan pendidikan. Pemerintah dan Kepala Sekolah perlu meningkatkan dan mempertahankan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan suatu perencanaan program pendidikan. Karena pemberitahuan atau informasi verbal tidak selalu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, partisipasi aktif masyarakat akan berjalan dengan baik tergantung

dari sistem komunikasi yang dibangun oleh Kepala Sekolah dan pemerintah desa setempat. Masyarakat tidak akan merasa memiliki dan tidak peduli dengan berbagai kegiatan pendidikan jika mereka tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan (pengambilan keputusan) maupun dalam pelaksanaannya. Masyarakat harus diberikan tanggung jawab agar mereka merasa memiliki dan berperan aktif dalam proses pembangunan pendidikan yang ada di Desa Jerowaru.

Masyarakat umumnya memiliki beragam alasan untuk tidak terlibat secara aktif, alasan utama adalah keterbatasan waktu, belum menerima informasi dari sekolah atau pemerintah Desa Jerowaru, masyarakat belum diminta untuk ikut ambil bagian dan berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan, dan yang terakhir adalah keterbatasan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain mengutip pendapat Dwiningrum (2011) kepedulian masyarakat atau orang tua untuk tidak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan pendidikan didasarkan pada sikap pesimis dan optimis. Sikap pesimistis orang tua disebabkan karena nilai-nilai kebersamaan mulai menghilang dalam kehidupan masyarakat karena kuatnya nilai-nilai materialistik, sedangkan sikap

optimistik didasarkan pada semangat untuk mempertahankan budaya-budaya lokal yang menjadi dasar bagi pengembangan karakter anak.

#### **5. Pola Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pendidikan**

Sekolah dasar merupakan lembaga formal sebagai tempat kegiatan belajar anak (siswa) yang mendasari tiga aspek-aspek dasar pendidikan, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga aspek ini merupakan dasar atau landasan pendidikan yang paling utama. Ketiga aspek tersebut merupakan hal paling hakiki dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan sikap hidup yang positif agar kehidupan menjadi lancar dan sejahtera. Dalam menjalani kehidupan dibutuhkan dasar-dasar pengetahuan agar setiap kali berinteraksi tidak ketinggalan informasi, yang tidak kalah pentingnya adalah keterampilan (*life skill*).

Pendidikan di sekolah dasar merupakan kegiatan pembekalan diberikan kepada siswa selama enam tahun berturut-turut. Pada saat inilah siswa dikondisikan untuk dapat bersikap positif. Pengertian sekolah dasar sebagai basis pendidikan harus benar-benar dapat dipahami oleh semua masyarakat sehingga mereka dapat mengikuti pola pendidikannya. Kegiatan pendidikan dan pembelajarannya mengedepankan landasan bagi kegiatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Karena tanpa mengikuti pendidikan dasar sulit untuk memahami konsep-konsep baru pada tingkatan lebih tinggi yaitu tingkat sekolah menengah. Sistem pendidikan di sekolah dasar akan dilakukan bimbingan formal oleh para guru dan kepala sekolah, karena secara keseluruhan para guru dan kepala sekolah memberi bimbingan pada murid-murid dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan dimasa yang akan datang.

Sekolah dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumberdaya manusia (SDM). Keberadaan sekolah dasar diharapkan dapat menghasilkan yang berkualitas. Dalam konteks pembangunan bangsa dan negara peranan pendidikan sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Sekolah dasar sebagai komponen sistem pendidikan nasional, mengembangkan banyak peran dan fungsi, dalam undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 menyebutkan fungsi dan tujuan sekolah adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang ingin dicapai adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Mahas Esa, berkhlik mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengacu pada fungsi pendidikan nasional di atas maka standar yang perlu dirujuk untuk pendidikan dasar perlu dicermati dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, misalnya tentang standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar termuat dalam pasal 26 ayat (1) meletakkan dasar kecardasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup untuk mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Sekolah tidak dapat berhasil mencapai tujuan pendidikan dengan standar yang ada tanpa dukungan keterlibatan orang tua dan masyarakat. pentingnya peran serta masyarakat telah dituangkan dalam pasal 54 yang mengatur siapa saja yang dapat berperan dalam pendidikan untuk apa saja serta bentuknya. Sebelum undang-undang nomor 20 tahun 2003 ini keluar, PP tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional no 39 tahun 1992 telah ditetapkan namun kurang efektif, fokus peran serta cenderung pada orang tua siswa. Standar pendidikan nasional tidak menyinggung peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional adalah memberi peluang secara luas kepada masyarakat untuk

berperan aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, karena pemerintah bukan satu-satunya penyelenggara pendidikan. karena sosok masyarakat masa depan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan sendiri untuk menetapkan idialisme masa depannya, memilih alternatif kebijakan yang akan ditempuh, mengelola jalan kehidupannya, dan mengadakan kontrol sosial sendiri. Semua itu tumbuh tidak secara *top-down*, melainkan secara *bottom-up*.

Disamping itu Pendidikan diartikan sebagai bentuk kegiatan orang tua dalam mempengaruhi kehidupan anaknya. Orang tua menanamkan nilai-nilai yang ada di masyarakatnya sehingga generasi muda siap secara fisik dan mental memasuki kehidupan masyarakat yang memiliki nilai-nilai kolektif tertentu. Artinya adalah pendidikan bukan hanya menjadi tugas sekolah, akan tetapi pendidikan kepada anak juga perlu dilakukan oleh orang tua dan masyarakat. sehingga proses pendidikan itu tidak terputus dan tidak hanya terbatas di sekolah formal saja.

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin di atasi hanya oleh lembaga sekolah, untuk melaksanakan berbagai program pendidikan sekolah perlu didukung oleh berbagai pihak di antaranya masyarakat dan *stakeholders* agar berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pembangunan

pendidikan. Partisipasi masyarakat perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah. Partisipasi masyarakat masyarakat yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan didasarkan pada tiga faktor penting yaitu:

- (1) *Trust*, sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah baik masyarakat internal sekolah (guru, siswa, dan karyawan sekolah) maupun masyarakat eksternal (masyarakat, orang tua, instansi terkait, dan *stakeholders*). *Trust* akan membuat masyarakat berperan aktif dalam praksis pendidikan;
- (2) Tokoh masyarakat, keberadaan tokoh masyarakat sebagai pendorong partisipasi. Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tuan Guru. Aktifitas Tuan Guru dalam perkembangan pendidikan sangat mempengaruhi sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan. masyarakat Desa Jerowaru akan aktif dan termotifasi berpartisipasi jika didalam proses pendidikan tersebut terdapat peran Tuan Guru, sehingga peran Tuan Guru dalam mendorong partisipasi masyarakat sangat sentral;

- (3) Tingkat pemahaman orang tua dan masyarakat, pemahama masyarakat pentingnya pendidikan dan manfaat pendidikan bagi kehidupan anak-anak dimasa yang akan datang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan pendidikan. Hasil kajian di Desa Jerowaru menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat pentingnya partisipasi bervariasi, 50 % masyarakat memahami bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan anaknya, sehingga mereka aktif berpartisipasi dalam praksis pendidikan, 30 % masyarakat berpartisipasi jika ada yang mendorong dan jika masyarakat diminta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan program pendidikan, golongan ini mau berpartisipasi jika ada yang memberikan pemahaman dan dorongan. Terakhir 20 % masyarakat tidak peduli dengan keberadaan sekolah, masyarakat dalam golongan ini tidak memahami dan tidak mengerti manfaat partisipasi dalam pendidikan. Mereka tidak aktif berpartisipasi walaupun diberikan *support* oleh siapaun. Golongan masyarakat ini lebih memilih fokus pada pekerjaannya sehari-hari, mereka tidak mau peduli dengan kondisi sekolah yang ada disekitarnya.

Ketiga faktor di atas merupakan faktor utama terbentuknya sikap dan perilaku masyarakat untuk

berpartisipasi dalam praksis pendidikan baik yang berkaitan dengan partisipasi akademik atau non akademik. *Trust* akan terbentuk dengan baik jika ada interaksi yang baik dilakukan oleh tokoh masyarakat. dibutuhkan modal sosial yang baik dalam mendorong partisipasi masyarakat karena dengan keberadaan Tuan Guru di Desa Jerowaru, terbentuk *trust* melalui modal sosial yang akan menciptakan budaya saling memahami, saling mengerti dan saling membutuhkan.

Kegiatan Pembangunan pendidikan tidak bisa dilepas dari interaksi sosial masyarakat, karena antara masyarakat dengan sekolah ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara masyarakat dengan lembaga pendidikan. Sehingga dalam praksis pendidikan hendaknya masyarakat masuk dalam manajemen sekolah agar lebih mudah mengadakan interaksi secara intensif dengan sekolah. Dalam praksis pendidikan, masyarakat masuk struktur manajemen pendidikan dalam bentuk komite sekolah.

Keberadaan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua dan masyarakat sangat penting dan sudah diatur dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Kemudian untuk menjalankan fungsinya komite sekolah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan terdapat dalam pasal 196 yaitu meningkatkan mutu pendidikan, mandiri dan profesional, dan tergabung dalam satuan pendidikan. Untuk menjalankan fungsinya, komite sekolah memiliki peran yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (KEPMENDIKNAS) Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam keputusan tersebut dijelaskan peran komite sekolah dalam pembangunan pendidikan, yaitu: komite sekolah berperan sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan), dan *mediator agency* (mediator).

Empat peran komite sekolah harus tetap diupayakan, karena jika salah satu dari peran komite sekolah ini tidak dilaksanakan maka pembangunan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Keberadaan komite sekolah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pertimbangan terhadap rencana program kegiatan yang dirancang oleh pemerintah maupun sekolah, komite sekolah berhak memberikan masukan dan ide untuk penyempurnaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika perencanaan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat ikut mempertimbangkannya maka

otomatis masyarakat akan ikut memberikan dukungan penuh. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat baik dalam dukungan moral maupun material.

Dukungan masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat dalam implementasi program pendidikan yang sudah disepakati bersama, sehingga masyarakat akan ikut mengontrol program-program tersebut. Disamping itu jika masyarakat diberikan tanggung jawab dalam suatu program, maka masyarakat akan memberi ruang kepada sekolah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Peran komite sekolah sebagai mediator memberikan kesempatan masyarakat sebagai penghubung sekolah dengan orang tua, sekolah dengan instansi lain, masyarakat dengan pemerintah, sekolah dengan pemerintah.

Mendekatkan sekolah dengan masyarakat seharusnya terus menerus dilakukan. Kemudian diperlukan jalinan kerjasama dengan *stakeholders*, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Ruang lingkup yang dilakukan difokuskan pada upaya pencapaian peningkatan mutu pendidikan secara akademik dan nonakademik. Sekolah telah mengupayakan interaksi sosial dengan berbagai elemen masyarakat, misalnya dengan mengundang Tuang Guru, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah pada acara-acara yang dilaksanakan oleh sekolah, misalnya pada acara kenaikan kelas siswa

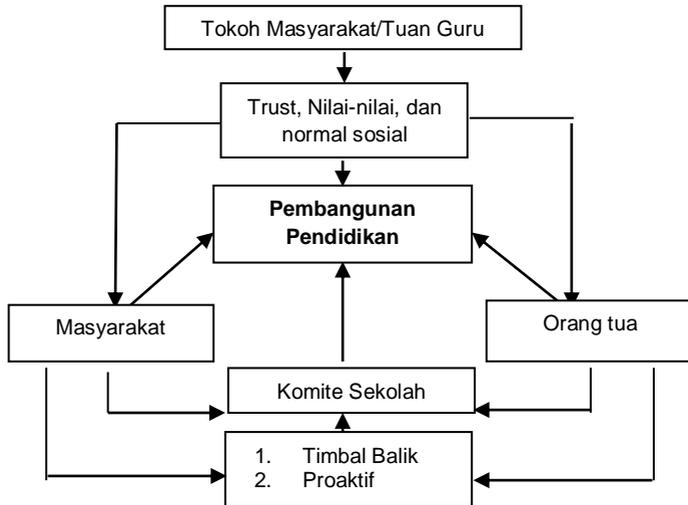
kelas 1 sampai kelas 5, acara penamatan kelas 6, peringatan hari-hari besar Islam, dan kadang sekolah mengundang Tuan Guru untuk memberikan pengajian.

Partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan dalam upaya pembangunan pendidikan, dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi mutu pendidikan, karena pada kenyataannya pelaksanaan pendidikan tidak bisa terlepas dari peran aktif masyarakat dan kerja sama berbagai pihak misalnya unsur tokoh masyarakat, pemerintah, dan *stakeholders*. Masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan program pendidikan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan.

Hasil akhir dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah tercapainya pembangunan pendidikan di pedesaan yang berkualitas baik dari segi akademik dan non akademik. Indikasi mutu akademik dapat digambarkan dengan peningkatan capaian prestasi dalam belajar dan ditentukan dengan keberhasilan dalam Ujian Nasional (UN). Sedangkan mutu non akademik merupakan capain prestasi yang diraih oleh siswa dalam bidang *soft skill*. Tercapainya mutu akademik dan non akademik ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harapan masa depan masyarakat desa Jerowaru menjadi sejahtera dan mandiri dalam menghadapi kehidupan global di

masa yang akan datang. Masyarakat desa harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan terdiri dari tiga komponen utama yaitu Tuan Guru sebagai tokoh masyarakat berperan sebagai motor penggerak pembangunan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat dan komite sekolah untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Dalam proses pembangunan pendidikan terjadi interaksi antara Tuan Guru, komite sekolah, orang tua dan masyarakat. secara sederhana interaksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Interaksi partisipasi dalam pembangunan pendidikan

Perkembangan pendidikan selalu diikuti oleh perkembangan prilaku dan karakter masyarakat dalam setiap tindakannya. Adanya modal sosial yang dalam partisipasi masyarakat adalah dasar keberhasilan dari pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru melalui partisipasi masyarakat atas dasar kepercayaan (*trust*), nilai-nilai, dan norma sosial yang menjadi sumber kekuatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. keberadaan Tuan Guru sebagai penggerak partisipasi masyarakat semakin menguatkan peran modal sosial dalam partisipasi masyarakat sehingga karena terbangunnya

partisipasi dalam jaringan sehingga masyarakat menjadi proaktif dalam berpartisipasi.

Proses Pembangunan pendidikan terjadi apabila antara Tuan Guru menjalin komunikasi dengan masyarakat dan komite sekolah secara fungsional dalam suatu kesatuan yang terpadu. Kemudian Komite sekolah dan masyarakat merupakan komponen sentral dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Desa Jerowaru. dalam proses pembangunan pendidikan antara komite sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Ketiga pemeran partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di atas selalu berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses pembangunan pendidikan pendidikan terjadi apabila ada interaksi dan komunikasi antara ketiga komponen tersebut. Artinya saling berhubungan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

**Kesimpulan**

Pembangunan pendidikan sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtida'iyah (MI) di dipedesaan secara umum dapat digambarkan bahwa perkembangan pendidikan belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang menjadi penghambat pembangunan pendidikan yaitu infra struktur dan fasilitas penunjang pendidikan yang belum memadai, hal ini mengakibatkan pelayanan pendidikan belum maksimal. Sedangkan faktor internal yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan pendidikan adalah kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan wewenang masyarakat, komite sekolah, dan orang tua terhadap perkembangan pendidikan.

Partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan pendidikan di pedesaan merupakan keterlibatan masyarakat dalam pebangunan pendidikan baik berupa material atau non material. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan dilakukan dalam a) perencanaan pendidikan, b) pelaksanaan pendidikan, dan c) evaluasi pendidikan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di atas belum dilaksanakan sepenuhnya

disebabkan karena sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan.

Komite sekolah dalam pembangunan pendidikan berperan sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan), dan *mediator agency* (mediator). Sebagai *supporting agency* komite sekolah ikut berpartisipasi dalam mendukung semua program pendidikan yang sudah dirancang oleh pihak sekolah. Tetapi komite sekolah tidak memahami perannya secara utuh. Sedangkan sebagai *controlling agency*, sebagian besar komite sekolah menyerahkan pengelolaan pendidikan kepada pihak sekolah tanpa dikontrol oleh komite sekolah. Dalam proses *controlling* komite sekolah tidak berjalan dengan baik

Tuan Guru sebagai tokoh agama menduduki posisi strategis dalam kehidupan bermasyarakat, artinya selain menjadi figur, juga menjadi pusat solidaritas (*center of solidarity*). Di samping sebagai pendidik dan pembimbing masyarakat. Tuan Guru sangat berperan dalam pengembangan pendidikan di Desa Jerowaru, terutama dalam mengembangkan pendidikan melalui madrasah (SDI, MI, Mts. Dan MA) karena adanya madrasah di desa Jerowaru berasal dari keinginan masyarakat pedesaan itu sendiri atas inisiatif masyarakat dan Tuan Guru. Hubungan Tuan Guru dengan madrasah berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan *trust* dari masyarakat, dan masyarakat merasa bertanggung jawab atas kemajuan

madrasah dan perkembangan madrasah akan menjadi baik sesuai dengan harapan bersama. Hubungan yang harmonis antara Tuan Guru sebagai tokoh masyarakat dan madrasah atau sekolah akan membentuk *trust* dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kemajuan pendidikan.

Sedangkan peran orang tua dalam pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut: a) sebagian anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga anak-anak sekolah dalam kondisi yang tidak termotivasi. Perhatian orang tua terhadap proses pembelajaran anaknya tidak terlepas dari lemahnya tingkat pemahaman orang tua terhadap pentingnya suatu pendidikan. b) orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan terhadap perkembangan dan masa depan anaknya. Hal itu disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat.

Akan tetapi tidak semua masyarakat tidak memahami manfaat pendidikan anak-anaknya. Sebagian masyarakat memahami manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Masyarakat yang memahami pentingnya pendidikan akan memberikan perhatian dan motivasi dalam proses pendidikan anak-anaknya. Bagi orang tua yang memperhatikan masalah pendidikan anaknya sangat mendorong anaknya untuk terus belajar dan ikut serta dalam proses perkembangan tempat anaknya sekolah, hal itu dilakukan bagi masyarakat yang faham pentingnya peran orang tua bagi perkembangan

anaknya, mereka ikut terlibat secara langsung dalam program pendidikan disekolah, dan mendampingi anaknya belajar dirumah secara berkelanjutan.

Uraian kesimpulan di atas memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh empat unsur utama yaitu Tuan Guru sebagai *center of solidarity* memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga masyarakat, komite sekolah, dan orang tua. Keberadaan Tuan Guru sangat penting dalam perkembangan pendidikan pedesaan, terutama dalam memberikan *support* pada masyarakat.

Tuan Guru sebagai *machine of power* dalam menggerakkan gerbong pembangunan pendidikan melakukan banyak hal dalam mendorong pembangunan pendidikan, diantaranya adalah membangun Pondok Pesantren sebagai pusat pembelajaran formal dan non formal, membuka pengajian sebagai ajang memberikan ilmu-ilmu agama bagi masyarakat umum, dan terus memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus aktif berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. hal ini dilakukan dengan membangun sarana pendidikan berupa Yayasan dan pondok pesantren, yang di dalamnya terdapat sekolah-sekolah swasta sebagai tempat belajar siswa-siswa yang ada di pedesaan.

### **Implikasi**

Partisipasi masyarakat mengalami dinamika yang semakin kompleks, termasuk di dalamnya pengelolaan

pendidikan diantaranya adalah sekolah dasar yang dikelola oleh institusi pemerintah dan madrasah yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Kompleksitas partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, tingkat pendidikan masyarakat pedesaan yang masih rendah, pemahaman masyarakat pentingnya pendidikan masih kurang, dan mobilisasi penduduk.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menuntut pengelolaan pendidikan terus melakukan penyesuaian agar tidak ketinggalan dalam derasnya arus perkembangan IPTEK tersebut. Dalam melakukan penyesuaian pengelolaan pendidikan tersebut peran pemerintah dan masyarakat serta keterlibatan semua komponen-komponen pendidikan untuk bersama-sama membangun pendidikan sesuai dengan peranya masing-masing sehingga menghasilkan perubahan pendidikan yang siap menghadapi pesatnya perkembangan IPTEK dan mampu bersaing pada tingkat global. Perkembangan pendidikan sesungguhnya tidak berhenti pada satu target tertentu, karena satu target tertentu akan terus ditinggalkan oleh perubahan perkembangan IPTEK pada masa-masa tertentu, dengan demikian lembaga pendidikan harus merencanakan program pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Perencanaan pembangunan pendidikan dalam menghadapi pesatnya perkembangan IPTEK tidak terlepas

dari peran serta masyarakat di dalamnya. Partisipasi masyarakat bagi keberhasilan program pendidikan berada pada posisi strategis, karena masyarakat pada dasarnya merupakan *stakeholders* pendidikan yang paling utama. Oleh karena itu dalam pengelolaan pembangunan pendidikan masyarakat harus mendapat kesempatan dan tempat dalam pelaksanaan pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan mulai dari perumusan program (perencanaan), pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan.

Saat ini partisipasi masyarakat sebagai aset penting bagi pemberdayaan masyarakat untuk legitimasi publik atau partisipasi masih banyak bersifat semu. Sehingga sejumlah kebijakan atau program pendidikan tidak bisa berjalan secara optimal. Artinya adalah kebijakan-kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan dan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi perkembangan zaman tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak didukung oleh partisipasi masyarakat.

Partisipasi sangat diperlukan dalam pembangunan pendidikan, meskipun tidak mudah untuk membangun partisipasi, tetapi gerakan partisipasi adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan pendidikan dalam satu wilayah. Seperti halnya dijelaskan oleh Dwiningrum partisipasi sesungguhnya diperlukan bagi terbentuknya *Good Governance*. Implikasi tentang perubahan peran negara adalah perlu adanya redefinisi terhadap peran

masyarakat. Masyarakat menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan pendidikan pada era otonomi daerah, karena keterlibatan masyarakat dan orang tua akan berdampak positif bagi outcome pendidikan dasar dalam konteks ini adalah pendidikan di sekolah dasar.

Masyarakat dan orang tua adalah elemen terpenting dan paling sentral dalam pembangunan pendidikan sehingga peranya perlu dioptimalkan. Karena kegagalan dalam partisipasi masyarakat merupakan kegagalan dalam penerapan program pemerintah dalam pengembangan pendidikan. Karena dalam penerapan manajemen pendidikan diperlukan keterlibatan elemen-elemen masyarakat. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kepentingan bersama untuk membangun pendidikan menuju bangsa yang maju dan siap bersaing di tingkat global.

Ketimpangan konsep pembangunan pendidikan yang bersifat multidimensional membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang mampu menempatkan pendidikan sebagai kekuatan budaya, dan tidak terbelenggu dalam proses kapitalisasi pendidikan, disinilah partisipasi masyarakat diperlukan bagi penguatan proses pembangunan pendidikan demi tercapainya *Good Governance*. Kemampuan masyarakat secara sistematis dalam memahami permasalahan pendidikan akan membentuk kemampuan berfikir kritis yang dibutuhkan untuk membentuk kesadaran semua unsur bahwa pembangunan pendidikan merupakan

tanggung jawab bersama, sehingga pelaksanaan pembangunan pendidikan berjalan sesuai amanat undang-undang. Pada intinya pendidikan adalah milik bersama, oleh karena itu pendidikan harus berorientasi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat.

Dalam masyarakat yang demokratis, pendidikan seharusnya menjadi pelopor dan pusat perkembangan sumberdaya manusia untuk mencapai tarap kesejahteraan kehidupan yang lebih tinggi. Pembangunan pendidikan hendaknya menjadi bagian yang integral dengan masyarakat yang ada disekitarnya dalam menuju pendidikan yang berkualitas, berdaya saing untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pembangunan pendidikan demi kesejahteraan di masa yang akan datang.

Pemerintah diharapkan mampu menggali dan mengelola potensi masyarakat dan orang tua agar merasa bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program-program pendidikan baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, materi, atau partisipasi sosial sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan hubungan yang baik antara semua elemen pendidikan diantaranya adalah pemerintah, sekolah, Tuan Guru, orang tua, dan masyarakat. Hubungan dan kerjasama yang harmonis akan membangun trust antara semua komponen pendidikan sehingga akan menciptakan

program-program pendidikan yang berkualitas dan didukung oleh seluruh elemen pendidikan.

Sekolah hendaknya semakin mengembangkan pola komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Dalam pengembangan program pendidikan sekolah hendaknya melibatkan semua unsur baik perorangan maupun kelembagaan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sekolah hendaknya aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat vital dalam pembangunan pendidikan. Kemudian komite sekolah sebagai perwakilan orang tua perlu dilakukan revitalisasi. Karena dari hasil penelitian, peran komite sekolah dalam pembangunan pendidikan cukup pasif, sehingga peran komite sekolah sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan), dan *mediator agency* (mediator) belum berjalan dengan baik.

Masyarakat hendaknya terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya peran mereka dalam program pembangunan pendidikan. Masyarakat harus benar-benar terlibat dalam semua program pembangunan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan karena tantangan pendidikan kedepan sangat kompleks sehingga sekolah tidak akan mampu menghadapi berbagai permasalahan tersebut sendiri, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama, sinergi dan kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang

tua, dan masyarakat secara umum. Masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dalam perkembangan pembangunan pendidikan, masyarakat sepenuhnya adalah bagian terpenting dalam pendidikan, itulah sebabnya pendidikan tidak bisa terlepas dari peran aktif masyarakat.

Dalam aktivitas pendidikan masyarakat tidak bisa berinisiatif sendiri, dibutuhkan motivasi atau *support* dari berbagai pihak agar kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan semakin maju. Diperlukan peran aktif tokoh masyarakat dalam hal ini adalah Tuan Guru agar terus memberikan suntikan moral kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar mamahami manfaat pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya partisipasi masyarakat merupakan ruh bagi pembangunan pendidikan, masyarakat adalah elemen terpenting bagi pendidikan, dan masyarakat adalah pengguna dari hasil pendidikan. itulah sebabnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan harus benar-benar dioptimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohman, Fadilah P., et.al, (2012:) *Partisipasi warga dalam pembangunan dan demokrasi*. Program Sekolah dan demokrasi bekerjasama dengan Averroes press.
- Alif, M. & Soenarto. (2008) *Pelaksanaan peran komite sekolah: SMK di DIY*. *Jurnal pendidikan dan evaluasi pendidikan*,(1), 44-49.
- Alison, A.O., et.al, (2006) *The impact of a leadership training program on school based management and school community action in praya barat daya, lombok, Indonesia*. In partial fulfilment of the award of Doctor of Education Faculty of Education, University of Southern Queensland.
- Arcoro, J.S. (2005) *Pendidikan berbasis mutu: prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan*. Yogyakarta. Pusta Pelajar offset. Terjemahan dari buku asli; *Quality in Education: an Implementation Handbook*. St. Lucie Press, 1995
- Arnstein, S.R., (1969) A ladder of citizen participation. *Journal of international. JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224*. *Webmasters comment, November 2004*.
- Badrun & Ngongu (1994) *Menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan kelembagaan pertanian di daerah NTB*.

- Prosiding seminar pembangunan Nasional dalam menanggulangi kemiskinan. Sapuan dan C. Silitonga (Penyunting). Perhepi
- Barker P. (2000) Commentaries and reflection on mental health nursing in the UK at the dawn of the new millennium. *Journal of mental health*. 9: 617-19.
- Bourdeu P. (1990). *An introduction to the work of Piere Bourdieu: The practice theory*. London. The Macmillan Press Ltd.
- Cohen D. & Prusak L. (2001). *In good company: How social capital makes organizations work*. United State of America: Harvard Business School Press.
- Cohen, J.M. & Norma T.U. (1977) *Rural development participation; concept and measures for project design implementation and evaluation*. New York: Cornel University Press.
- Coleman, J. (1994). *The foundation of social theory*. Cambridge. Belknap Press of Harvard University Press.
- Coleman, P. & Portes, A., et.al, (1998). Social capital: Its origins and aplications in modern sociology. *Journal Annual Review of Sociology*, 24: 1-24.
- Columna L.T. & Rebecca L., et.al, (2008) Communicating with hispanic parents of children with and without disabilities. *Journal Of Physical Education, Recreation & Dance*. reston: April 2009. Vol. 80, Iss. 4; pg. 48, 7 pgs

- Creswell, J.W., (2009). *Research design: Qualitatif, quantitaif, and mixed methods approaches. Third Edition.* Thousand oaks California: SAGE Publication.
- Dahrendorf, R. (1959). *class and class conflict in industrial society.* Stanford Calif: Stanford University Press.
- Daryanto. (2006). *Administrasi pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta
- Davis, R. (2002) *Models and methods for systematic planning of education, cambride, maasschusetts:* United State of America: Center for studies in education and development Harvard University.
- Denzin, N.K. & Ivonna S.L. (2005). *Hanbook of qualitatof reseach. Third edition.* Thousan: SAGE Publication. Inc.
- DEPDIKNAS (2007) *Pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah.* Kegiatan pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah. Jakarta: Departemen pendidikan nasional, direktorat jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah.
- Dewantara K.H. (1994). *Karya Ki Hajar Dewantara bagian II: kebudayaan.* Yogyakarta: Offset Tamansiswa.
- Djajadiningrat, P.A.A. (1936). *Kenang-Kenangan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat.* Batavia: Kolff/Buning/Balai Poestaka.
- Dwiningrum, S. Irene A. (2009). *Desentralisasi pendidikan dan dinamika sosial.* Disertasi Doktor, tidak

- diterbitkan, Pascasarjana Sosiologi, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan: kajian teoritis dan empirik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- (2014) *Modal sosial untuk pengembangan pendidikan perspektif teoritik dan praktik*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Echols M.J. & Hasan S. (2006) *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Eva Cox. (1995). *A truly civil society*. Sydney. ABC Books
- Friere P., & Illich I., et.al, (2009). *Menggugat pendidikan: fundamentalis, konservatif, liberal, anarkis*. Terjemahan Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fukuyama F.(1999). *Social capital and civil society*. Institute of Public Policy. George Mason University. presented the paper at the IMF Institute conference on Second Generation Reforms November 8-9, 1999
- (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. New York. Free Press.
- (2000) *Social Capital and Civil Society*. Joournal of international. IMF Working Paper, Vol. , pp. 1-19, 2000.
- Fullan, M. (1982) *The meaning of educational change, teacher college*. Columbia University: Newyork and London
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar pembentukan struktur sosial masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Terjemahan Judul buku Asli. (1984). The

- constitution of Society: Outline of the theory of strukturation. USA: University of California Press.
- Glasser, W. (1992). *The quality school (managing student without coercion)*. United States of America: HapperCollins publishers.
- Glen H. & Forrest W. P., (1974) *Curriculum planing a new approach*. United Statesnof america: Allyn and Bacon
- Goodlad, J.I. (1984). *A place called school: prospects for the future*. United States: McGraw-Hill paperback.
- Govinda & Diwan, R. (2003). *Community participation and empowerment in primary education*. Newdelhi: sagepublication.
- Hasbullah (2006) *Sosial capital (menuju keunggulan budaya manusia indonesi)*. Jakarta. MR United Press.
- Hasbullah (2010) *Otonomi pendidikan: kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Holstein, J.A., & Gubrium (1994). *Phenomenology, ethnomenology, and interpretative practice*. Dalam Denzin, N.K., & Linkoln, Y.S. (eds). *Hanbook of qualitatof reseach*. Thousan: SAGE Publication. Pvt. Ltd.
- Horikosi H. (1987) *Kiyai dan perubahan sosial*. *University of California*. Di terjemahkan oleh Abdurrahman Wahid. Diterbitakn oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Hornby (2003) *Oxford learner's pocket dictionary*. Newyork: University Press

- Ibrahim (2006). *Manajemen peningkatan mutu sekolah dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ife, J. & Frank T., (2006) *Community development: Community-best alternatives in an age globalisation*. Australia: Aquatic drive frenchs Forest.
- Ikhsanuddin, E. (2010) *makna fungsi pendidikan sekolah dasar*, diambil tanggal 20 November 2013 dari <http://sdn-medangasem03.blogspot.com/2010/09/fungsi-pendidikan-sekolah-dasar.html>
- Jalal, F. & Supriadi, D., at,al, (2001) *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa
- Jhon, F. (2011) *Modal sosial*. Yogyakarta: kreasi wacana. Terjemahan buku asli (2003) *Social Capital*. London: Raoutledge
- Kabupaten Lombok Timur (2012) *Lombok timur dalam angkak*. Lombok Timur. Katalog 1102001.5203. BPPS Kabupaten Lombok Timur.
- Kartono K. (1977). *Tinjauan politik mengenai pendidikan nasional: beberapa kritik dan sugesti*. Jakarta: Pridnya Paramita
- Keesing, R.M. (1981). *Cultural anthropology: A contemporary perspective*. New York. Holt Reinhart and Winston.
- Khairawati (2001). *Partisipasi masyarakat (orang tua) terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar tingkat sltp pada pesantren di kalimantan barat. tesis master, tidak diterbitkan*, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

- Khairuddin, & Mahfuz J.M., et.al, (2007) *Kurikulum tingkat satuan pendidikan konsep dan implementasinya dimadrasah*. Yogyakarta, Nuansa Aksara.
- Kneller, G.F. (1967). *Philosophy and education, in George F Kneller* (ed), *Foundations of education*. New York. John Wiley and Sons, Inc.
- Koentjaraningrat (1990). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta; Gramedia.
- Kuntowijoyo (2000) *Budaya dan masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Maliki, Z. (2008), *Sosiologi pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada press.
- Mansur (2012). *Strategi membangun partisipasi masyarakat terhadap pendidikan Islam*. Departemen Agama Banjarmasin.  
<http://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=%20mansur001>. Diambil tanggal 27 Juli 2013.
- Mardikarto, T. & Poerwoko S. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Martono, N. (2012) *Kekerasan simbolik di sekolah: Sebuah ide sosiologi pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.
- Miles, H.B & Huberman A.M. (2007) *Analisis tentang data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Terjemahan; judul asli: *Qualitative data analysis*. (1994).

- Moleong, L.J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif: edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mortimore, P. & Pamela S., et.al, (1988). *School matters: the junior years*. Books Publishing Ltd. Beaumont House, Wells BA5 2 LD, Somerset. England.
- Moustakas, C.E. (1994) *Phenomenological research method*. Thousand Oaks, California: Sage Publication.
- Muhadjir, N. (2000) *Kebijakan dan perencanaan sosial: tantangan sumber daya manusia-telaah Cross discipline*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- (2001). *Identifikasi faktor-faktor opinion liader inovatif bagi pembangunan masyarakat*. SUplemen: tes Inventori, teori dan konstruksya. Yogyakarta: Rake sarasin.
- (2004) *Metodologi penelitian kebijakan dan evaluation research: integrasi penelitian kebijakan, dan perencanaan*. Yogyakarta Rake sarasin.
- (2011) *Metodologi Penelitian: Paradigma Positifisme Objektif penomenologi interpretatif logi bahasa platonis, chomskyist, hegelian dan hermeutik paradigma studi islam, matematika recursion-, set-teory dan struktural equestion modeling dan mixed*. Edisi VI pengembangan 2011. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- (2013). *Metodologi penelitian kebijakan*. Yogyakarta. Rake Sarasin.
- Muijs, D. & David, R., (2008). *Effective teaching evidence and practice*. London: Sage publication Ltd London.

- Mulyadi M. (2009). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa*. Ciputat Tangerang selatan: Nadi Pustaka.
- Mulyasa, E., 2011, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mundilarto (2007) *Konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah*, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. [www.dikdasmen.Depdiknas.go.id/html/plp/01PLP\\_MPMBS\\_KONSEP.htm](http://www.dikdasmen.Depdiknas.go.id/html/plp/01PLP_MPMBS_KONSEP.htm)
- Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). "Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage" dalam *Academy of Management Review*, 23/2, 1998.
- Nahdhi, Kh. (2012). *Nahdlatul wathan dan peran modal*. Yogyakarta: Insyira
- Nanang (2004). *Landasan manajemen pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasikun (2011). *Sistem sosial Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Nasution (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nugroho, R. (2008) *Pendidikan Indonesia: Harapan, visi, dan strategi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nurkholis (2006). *Manajemen berbasis sekolah*. Jakarta: Grasindo
- (2014). *Mutu sekolah dan budaya partisipasi stakeholders: studi fenomenologi disekolah kinfensional MIN Tegalsari Wlingi Blitar*. Disertasi Doktor, tidak

- diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Patton, Q.M. (2006) *Metode evaluasi kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka pelajar. Terjemahan dari: *How to use Qualitative methods in evaluation* (1991). Sage Pubication.
- Pidarta, M. (2005). *Perencanaan pendidikan partisipatori dengan pendekatan sistem* (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta
- Prastowo, J. (2010). *Belajar dari masyarakat; the best praktice Program KKN pembelajaran pemberdayaan masyarakat LPPM-UGM*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009) *RENSTRA Dinas DIKPORA Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013*. DIKPORA NTB
- Putnam, R.D. (1993). *The prosperous community: Social capital and public life*. TAP 4 (13).
- Rahardjo, D.M. (1985) *Pesantren dan pembaharuan*. Jakarta: LP3ES
- Rasydi U. & Danim S. (2007). *Paradigma guru dalam pendidikan dan dasar-dasar pedagoik*. dari <http://winithepooh.multiply.com/reviews/item/3?&item>.
- Rasyidi & Sudarwan, D. (2006). *Agenda pembaruan sistem pendidikan*. Yogyakarta; Pustaka pelajar.
- Republik Indonesia (1979) *Undang-undang nomor 5 tentang: Pengertian desa*. Jakarta.
- (1992) *Peraturan pemerintah nomor 39: tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional*. Jakarta

- (2000) *Undang-undang No.25 tentang: Program pembangunan nasional* . Jakarta
- (2002) *Kepmendiknas No. 044/U/2002, tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah.* Jakarta
- (2003). *Undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.* Jakarta
- (2005). *Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005: Tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta
- (2005). *Rencana strategis pembangunan pendidikan nasional 2005-2009.* Jakarta. DEPDIKNAS.
- (2010) *Peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggraan pendidikan.* Jakarta
- (2010) *Rencana strategis pembangunan pendidikan nasional 2010-2014.* Jakarta.
- Richard, C., et.al, (1990) *An Introduction to the work of Pierre Bourdeu: the practice theory.* London: The Macmillan Press.
- Rinata, (2010) *Hubungan antara tingkat pendidikan dan lingkungan sosial dengan prilaku konsumtif masyarakat desa tumpak kepuh, kecamatan bakung, kabupaten blitar.* Hasil penelitian. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Robert & Joanne (2000), *Fondation of education.* Allyn and bacon: university of Virginia.
- Robert C Bogdan & Sari Knopp Biklen (1992). *Qualitative research for education, an introduction theory and method.* United States of America. Allyn and Bacon.

- Rodliyah (2013). *Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan disekolah*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Rofangi, M. (1992) *Pembinaan kehidupan beragama pada karbol akademi angkatan udara di Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Rogers, E.M. & Shoemaker F. (1995). *Diffusion of innovations*. New York: The Free Press
- Rohman A. (2009) *Memahami pendidikan dan ilmu pendidikan*. Yogyakarta. Laksbang Mediatama.
- Sagala, S. (2010) *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan: Jakarta*. Pustaka Pelajar.
- Salim A. (2006). *Teori dan paradigma penelitian sosial: buku sumber untuk penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sam M.C., & Tuti T.S. (2008). *Analisis SWOT: kebijakan pendidikan era otonomi daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sergiovanni, T.J. (1994). *Building community in school*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Setiadi, E.M. & Usman K. (2011). *Pengantar sosiologi; Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori aplikasi dan pemecahannya*. Jakarta: Kencana prenatal media group.
- Seymour & Sarason, B. (1995) *Parental involvement in the political principle*. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Publishe.
- Soetarjo, K. (1984) *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soetomo (2010). *Membangun masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

- (2011). *Pemberdayaan masyarakat; Mungkinkah muncul Antitesisnya?.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- (2012). *Keswasembadaan masyarakat; manivestasi kapasitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2012). *Membangun masyarakat; merangkai sebuah kerangka.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soetrisno, L ((1995). *Menuju masyarakat partisipatif.* Yogyakarta: Kanisius
- Subakir S. & Sapari A. (2001) *Manajemen berbasis sekolah.* Surabaya: SIC
- Suharjo (2006). *Mengenal pendidikan sekolah dasar.* Jakarta: Departemen pendidikan nasional direktoran jendral pendidikan tinggi direktorat ketenagaan.
- Sukron (2005). *Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbais sekolah di MTsN 02 Semarang.* artikel 1005 diambil pada tanggal 23 Juli 2012: dari <http://re-searchengines.com/1005sukron.html>
- Sumarno (2013) *Decentralizing Indonesia edocation.* Presented at International seminar. Universitas of ahmadAhmad Dahlan and University of Nueva Caceres (UNC). Yogyakarta. Oktober 25<sup>th</sup>, 2013
- , (dalam Jalal F. & Supriadi D., at.al: 2001) *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah.* Yoyakarta: Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa
- Suparjan & Suyatni. (2003). *Pengembangan masyarakat dari pembangunan sampai pemberdayaan.* Yogyakarta: Aditya Media

- Suparmono (2014). *Total quality school characteristics: studies in private and state elementary schools. international refereed research journal*, www.researchersworld.com; Vol.- V, Issue - 1, Jan. 2014.
- Suryadi A., Budimansyah D. (2004) *Pendidikan nasional menuju masyarakat indonesia baru*. Bandung: Genesindo
- Suryosubroto (2002). *Humas dalam dunia pendidikan*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya
- Suryadi A., Budiman D. (2004) *Pendidikan nasional menuju masyarakat Indonesia baru*. Bandung. Genesindo.
- Suwignjo (1985) *Administrasi pembangunan desa dan sumber-sumber pendapatan desa*. Jakarta. GI.
- Suyata (2006). *Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan pendidikan dasar bermutu*. Makalahnya yang disampaikan dalam konsultasi semlok pengembangan pendidikan dasar (JFPR CDBEP) kawasan miskin di bali pada tanggal 26-28 April 2006.
- Tilaar, H.A.R. (2002) *Pendidikan untuk masyarakat Indonesia baru*. Jakarta: PT Gramedia
- (2004) *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Timar (1989) *The politics of school restructuring*. Jurnal Phi Delta Kappan, 71 (4) 256-175
- Tylor, E.B. (1871). *Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, custom*. London: J Murray.Zuhri.

- Veeger, K.J. (1985). *Realitas sosial; refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wasistiono, T. & Tahir, M. (2006) *Prospek pengembangan desa*. Jakarta: Fokus media.
- Wibisono, Y. (2007) *Membedah konsep dan aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Yafie, A. (1997) *Teologi sosial; telaah kritis persoalan agama dan kemanusiaan*. Yogyakarta: LKPSM.
- Yamin, M. (2013). *Ediologi dan kebijakan pendidikan (menuju pendidikan berediologi dan berkarakter*. Malang: Madani.
- Zamroni (2000) *Paradigma pendidikan masa depan*. Yogyakarta: Pt Bayu Indra Grafika.
- (2001) *Pendidikan untuk demokrasi (tantangan menuju civi society)*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- (2007) *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi (pra kondisi menuju era globalisasi)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- (2011). *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Jakarta: Gavin Kalam Utama.
- Zubaidi. (2006). *Pendidikan berbasis masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zuhri, Saifuddin (2001) *Guruku orang-orang dari pesantren*. Yogyakarta: Pustaka sastra LKIS.
- Zuriah N. (2006). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan (teori dan aplikasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

